

WACANA KONTEMPORER PARIWISATA

by Dewa Putu Oka Prasiasa

Submission date: 05-May-2020 12:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 1315751123

File name: Buku_4.doc (7.07M)

Word count: 33151

Character count: 226377

WACANA KONTEMPORER PARIWISATA

Oleh:

Dewa Putu Oka Prasiasa

Daftar Isi

Pendahuluan ___ i

- 1 Postfordisme sebagai Model Ekonomi Baru dalam Pariwisata
- 2 Terasering Sawah sebagai Daya Tarik Wisata: Kajian Estetika Postmodern
- 3 Tantangan Kearifan Lokal di Era Globalisasi Dalam Pariwisata
- 4 Pariwisata dalam Masyarakat Kapitalis
- 5 Ketidakadilan terhadap Perempuan dalam Pariwisata
- 6 Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata

Tentang Penulis

Daftar Pustaka

PENDAHULUAN

APA ITU WACANA KONTEMPORER PARIWISATA ? MENGAPA MEMBAHASNYA ?

³⁴ *Tempus mutantur, et nos mutamur in illud.* Waktu berubah, dan kita ikut berubah juga di dalamnya. Demikian pepatah latin kuno yang aktualitasnya masih berjalan sampai saat ini. Seiring dengan berjalannya sang waktu, ⁹² cara-cara manusia untuk mengekspresikan dirinya, mencari makna tentang siapa dirinya, dan orang lain termasuk dirinya sendiri juga berubah. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang paling kekal di dunia ini adalah perubahan. Begitu juga dengan wacana kontemporer pariwisata yang menjadi fokus kajian dan telaah dari buku ini, juga akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya sang waktu.

Menurut Foucault (2002) wacana atau diskursus merupakan cara menghasilkan pengetahuan beserta praktik sosial yang menyertainya, ¹⁰ bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial, serta saling keterkaitan di antara semua aspek tersebut. Untuk menghasilkan pengetahuan yang terkait dengan kekuasaan, maka pemilik kekuasaan akan mempergunakan hal-hal yang terkait dengan kekinian (kontemporer). Produksi pengetahuan yang terkait dengan kekuasaan dengan mempergunakan kekinian tersebut, menjadi ruang dan tempat pergulatan teori kritis dan teori postmodern. Giddens (1984) mengemukakan bahwa ⁷⁷ aktivitas manusia terdistribusi dalam ruang merupakan sesuatu yang mendasar dalam analisis tentang kehidupan sosial. Dengan demikian, wacana kontemporer pariwisata merupakan wacana kekinian dari ilmu pariwisata yang terkait dengan praktik-praktik kekuasaan beserta pengetahuan yang dihasilkan untuk memperkuat kekuasaan. Oleh karena itu, dalam pembahasannya dihadirkan contoh kasus-kasus riil pariwisata di masyarakat, terutama yang terkait secara langsung dengan topik-topik yang dimuat dalam buku ini. Harapannya, agar diperoleh pemahaman objektif terhadap berbagai kasus pariwisata yang bersifat kontemporer, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan nyata dalam kerangka pengembangan pariwisata. Selain itu pengkajian terhadap wacana kontemporer pariwisata dirasakan penting, karena dapat dijadikan media untuk

pengayaan informasi bagi sidang pembaca, khususnya yang terkait dengan pergulatan teori kritis dan teori postmodern dalam mengupas kasus-kasus terkait dengan wacana kontemporer pariwisata.

MENGAPA TEORI KRITIS DAN TEORI POSTMODERN ? KAITAN DENGAN KAJIAN BUDAYA ?

Pembicaraan yang terkait dengan pariwisata tidak bisa terlepas dari tiga pilar yang terkait yaitu pemerintah (*state*), masyarakat (*civil society*), dan dunia usaha (*merket*). Khusus untuk di Indonesia, pengembangan pariwisata sangat erat kaitannya dengan *state* melalui kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu wacana kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang pengembangan pariwisata di Indonesia. Pembahasan tentang kekuasaan dan ideologi merupakan wacana yang menarik dari postmodern, baik dalam konteks dekonstruksi maupun paparan teoritik. Selain itu, teori postmodern berdimensi politis, yakni tidak saja kritis terhadap pencerahan, tetapi kritis juga terhadap kondisi masyarakat dalam konteks kekinian yang dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalis. Teori postmodern merupakan varian dari teori kritis, keduanya memiliki persamaan. Meskipun mereka berada dalam satu kandang, yaitu teori kritis, namun menyamakan keduanya secara total sangat riskan. Tetapi keduanya memiliki persamaan atau titik temu (Agger, 2003; Best Kellner, 2003; Lyotard, 2003). Adapun titik temu/kesamaannya adalah sebagai berikut.

1. Teori kritis dan kebanyakan teori postmodern sama-sama menyetujui pentingnya kritik terhadap filsafat tradisional dan teori sosial. Keduanya menyerang divisi akademis pekerja yang menciptakan batas permanen antara wilayah realitas sosial, dan keduanya menggunakan wacana-wacana yang supradisipliner.
2. Keduanya mengemukakan kritik tajam terhadap modernitas dan wujudnya dalam dominasi sosial dan rasionalisasi.
3. Kedua teori menggabungkan teori sosial, filsafat, kritik kebudayaan, dan kepedulian politik, dan tidak seperti kebanyakan teori akademis. Kedua teori berorientasi pada teori dan praktek, dan mengorientasikan wacana ke arah politik. Jadi kedua teori ini mengharapkan bahwa teori harus berperan bagi proses transformasi dunia ke arah yang lebih berperikemanusiaan.

Dengan mengacu pada Agger (2003) teori kritis dan teori postmodern dapat diterapkan pada kajian budaya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik kajian budaya, sebagai "... salah satu contoh terbaik teori kritis interdisipliner yang benar-benar meliputi berbagai sumber teoritis dan disiplin". Untuk mencermati penerapan teori kritis dan teori postmodern dalam kajian budaya, dapat dicermati melalui karakteristik kajian budaya. Karakteristik kajian budaya menurut Lubis (2006) dan Sandar van Loon (2001) adalah seperti berikut ini.

1. Kajian budaya bertujuan mengkaji/meneliti berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah mengungkapkan dimensi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan (sosio-politik, ekonomi, pengetahuan, hukum, dan lain-lain).
2. Kajian budaya tidak membahasakan kebudayaan yang terlepas dari konteks sosial-politik, melainkan sebaliknya, yakni mengkaji masalah budaya dalam konteks sosial-politik dimana masalah kebudayaan itu tumbuh dan berkembang.
3. Dalam kajian budaya, budaya dikaji dari aspek objek lokasi tindakan selalu dalam tradisi kritis. Hal ini mengandung makna bahwa kajian budaya tidak hanya bertujuan merumuskan teori-teori, tetapi juga suatu tindakan praksis yang bersifat emansipatoris.
4. Kajian budaya berusaha mendekonstruksi (membongkar, mendobrak) aturan-aturan, dan pengkotakan-pengkotakan ilmiah konvensional, lalu berusaha mendamaikan pengetahuan yang objektif, subjektif (intuitif), universal dan lokal. Kajian budaya tidak saja memberikan penghargaan pada identitas bersama, tetapi juga mengakui saling keterkaitan dimensi subjek [tivitas] dan objek [tivitas] dalam penelitian.
5. Kajian budaya tidak merasa steril dari nilai-nilai (tidak bebas nilai) akan tetapi melibatkan diri dengan nilai dan pertimbangan moral masyarakat modern serta tindakan politik dan konstruksi sosial. Dengan demikian, kajian budaya bukan hanya bertujuan memahami realitas masyarakat atau budaya, tetapi juga merubah struktur dominasi, struktur budaya yang menindas dalam masyarakat kapitalis industrial.

PEMBABAKAN BUKU DAN BENANG MERAH YANG MENYATUKAN

Tulisan pertama yang berjudul **Postfordisme sebagai Model Ekonomi Baru dalam Pariwisata** memberikan pendasaran tentang perlunya mengimplementasikan pengembangan produk pariwisata yang berskala kecil, fleksibel, dan variatif untuk melayani pasar-pasar ceruk khusus (*niche market*). Model ekonomi yang merupakan reaksi terhadap *fordisme* ini, oleh Aglietta (1979) dipandang sebagai sebuah model yang mengarah pada sebuah mode regulasi sosial dan politik yang menstabilkan hubungan antara konsumsi dan akumulasi. Model ini juga mengasumsikan adanya kondisi produksi dan hubungan sosial politik dengan gaya hidup. Sedangkan Allen (1992) berpendapat bahwa *postfordisme* sebagai salah satu cara memahami restrukturisasi global dan perubahan kualitatif dalam pengorganisasian produksi dan konsumsi yang bersifat kekinian. Pergeseran pemasaran produk pariwisata dari massal ke individu merupakan sebuah contoh nyata dari *postfordisme*, sedangkan Lash dan Urry (1994) mengemukakan bahwa penawaran produk pariwisata alternatif oleh negara Dunia Ketiga kepada negara-negara Dunia Pertama merupakan praktik hegemoni pada model ekonomi *postfordisme*. Hegemoni merupakan konsep yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci (tergolong teori Marxism) melihat kemampuan kelas dominan untuk meyakinkan kelas-kelas di bawahnya untuk menerapkan nilai-nilai politik, moral, dan budaya tertentu. Sedangkan Eagleton (1991) memaknai hegemoni sebagai kemampuan persuasi dan secara kontras dapat diterapkan secara paksa. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan produk pariwisata, menurut Harvey (1989b) terjadi karena adanya *tekanan ruang-waktu* dari kapitalis dengan tujuan mengurangi waktu pergantian modal dan mempercepat waktu sirkulasi modal serta untuk mempertahankan keuntungan. Pada akhirnya, *postfordisme* merupakan proses untuk memahami tingkat perbedaan dan fragmentasi yang tinggi pada perubahan budaya kontemporer. Dalam konteks perspektif kajian budaya, model ekonomi baru dalam pariwisata ini dilihat secara materialisme dan non-reduksionisme, lebih mengembangkan materialisme kultural, pengeksploasian pemaknaan dalam konteks sarana dan kondisi-kondisi produksi, dan berhubungan dengan ekonomi politik. Adapun bentuk *postfordisme* dalam pariwisata antara lain: (1) penolakan terhadap beberapa bentuk pariwisata tertentu dan keragaman pilihan yang semakin meningkat, (2)

sedikit wisatawan yang berkunjung ulang, (3) menjamurnya lokasi dan atraksi wisata alternatif, (4) berkembangnya jenis liburan dan atraksi wisata berdasarkan penelitian gaya hidup, (5) lebih banyak informasi yang diberikan tentang liburan dan atraksi alternatif melalui media, (6) perputaran yang cepat pada lokasi wisata dan pengalaman wisata karena perubahan gaya hidup, (7) pertumbuhan 'pariwisata hijau', makanan, serta akomodasi yang berorientasi kepada desa wisata, dan (8) terjadi 'de-deferensiasi' pariwisata dari liburan, budaya retailing, pendidikan, olah raga dan hobi.

Selanjutnya tulisan kedua yang berjudul **Terasing Sawah sebagai Daya Tarik Wisata: Kajian Estetika Postmodern**, mengemukakan terasing sawah yang merupakan karya estetis manusia petani yang didasari oleh nilai estetis dan rasa estetis, perlu pelestarian di tengah-tengah konsumsi produk pariwisata yang bersifat kontemporer. Untuk pelestariannya, Philips (1985) mengemukakan bahwa (1) kepariwisataan menyediakan konservasi dengan pembenaran secara ekonomi, (2) kepariwisataan adalah salah satu cara menunjang pembangunan konservasi, dan (3) kepariwisataan membawa sumber-sumber daya untuk konservasi. Sebagai contoh adanya wacana untuk menjadikan terasing sawah di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD), berdasarkan elemen warisan budaya dunia, ada empat elemen yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) tujuan, (2) rencana tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, (3) keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, dan (4) manajemen konservasi. Dari sisi kajian budaya, pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan terasing sawah sebagai daya tarik wisata, berdampak pada pergeseran nilai estetis serta bentuk, fungsi, dan makna dari terasing sawah. Pergeseran nilai estetis serta bentuk, fungsi, dan makna terasing sawah inilah menjadi fokus tulisan ini. Dengan dijadikannya terasing sawah sebagai daya tarik wisata, terjadi pergeseran nilai estetis dari terasing sawah yaitu nilai ekonomi, nilai hiburan, nilai estetis, dan nilai religius. Aspek bentuk, ada pergeseran dengan dipergunakannya bahan-bahan yang berasal dari luar desa setempat sebagai pelengkap terasing sawah. Aspek fungsi, tidak terjadi pergeseran, karena terasing sawah tetap dipergunakan sebagai sarana menyalurkan air oleh *subak*. Aspek makna, dengan dijadikannya terasing sawah sebagai daya tarik wisata, timbul makna estetis berupa penyaluran rasa estetis petani pada saat membuat terasing sawah, makna

lingkungan berupa pelestarian terasering sawah, serta makna budaya berupa berkembangnya budaya global akibat pengembangan pariwisata di areal pertanian. Semua pergeseran yang terjadi dengan diadakannya terasering sawah sebagai daya tarik wisata, memberikan gambaran bahwa telah terjadi pergeseran konsumsi wisatawan karena pengaruh gaya hidup yang bersifat kontemporer. Namun yang terpenting adalah, bahwa pergeseran konsumsi wisatawan terhadap sebuah produk pariwisata hendaknya tetap mampu memberikan dampak positif, baik terhadap lingkungan di sekitar daya tarik wisata maupun terhadap masyarakat tempat pariwisata tersebut dikembangkan.

Tantangan Kearifan Lokal di Era Globalisasi Dalam Pariwisata. Pembahasan topik ini mengambil contoh-contoh pada kearifan lokal Bali dan dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di era globalisasi. Poespowardojo (1989) memandang globalisasi sebagai globalisasi kultural. Menurutnya, globalisasi kultural dewasa ini telah menyebabkan kondisi tarik menarik atau ‘tegangan’ (*tension*) dalam kaitan dengan berbagai pengaruh akibat globalisasi. Bentuknya dapat berupa akulturasi, baik yang mendatangkan *dominasi* maupun *integrasi*. Jika akulturasi mendatangkan *dominasi* kebudayaan asing, maka kearifan lokal (*local wisdom*) akan musnah, sebaliknya jika akulturasi mendatangkan *integrasi*, maka masyarakat akan mampu menyerap unsur-unsur kebudayaan asing untuk memperkokoh budaya setempat. Terkait dengan proses akulturasi ini, masyarakat Bali lebih melihatnya sebagai *touristification* yaitu mengintegrasikan kebudayaan asing ke dalam budaya lokal serta menjadikan budaya pariwisata sebagai bagian kebudayaan orang Bali. Selain itu, keberlanjutan kearifan lokal Bali terjadi karena kearifan lokal Bali memiliki keunggulan lokal (*local genius*). Kearifan lokal yang berbasis sistem nilai, berfungsi sebagai tumpuan ketahanan dan keberdayaan manusia dan masyarakat Bali menghadapi berbagai tantangan. Kearifan lokal Bali yang sebagian hidup sebagai ‘budaya lisan’ menghadapi tantangan antara lain kurang diketahui, kurang dihayati, dan kurang dipercaya karena lemahnya sosialisasi dan edukasi secara lintas generasi. Apalagi di masyarakat berkembang paradoks antara kearifan lokal dengan modus-modus baru kurang bersinergi sebagai akibat terbatasnya pengkajian, penulisan dan pendidikan secara efektif. Terkait dengan bidang pariwisata, tantangan kearifan lokal Bali berupa akulturasi (termasuk didalamnya dominasi, integrasi, dan turistifikasi), keseimbangan pelaksanaan *trihita karana* dalam

pengembangan pariwisata, eksploitasi sumber daya budaya berlebihan, dan marginalisasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Untuk mengatasi berbagai tantangan terkait kearifan lokal Bali, antara lain perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut (1) melaksanakan pendidikan multikultural melalui kurikulum berbasis lokal, dan (2) menginventarisasi berbagai kearifan lokal yang ada di Bali, selanjutnya dipublikasikan secara tertulis dan dijadikan media pembelajaran bagi generasi dahulu, generasi ¹²⁰sekarang, dan generasi yang akan datang. Hal ini sejalan dengan Pilliang (2006) yang menyatakan bahwa budaya lokal bisa digali, dilestarikan dan dikembangkan.

Hubungan antara politik dan pariwisata, terutama dari sisi bagaimana pariwisata dapat merubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu destinasi pariwisata, dapat disimak dari tulisan yang berjudul **Pariwisata dalam Masyarakat Kapitalis**. Tulisan ini tidak saja memusatkan pada sisi ekonomi dan pasar, fungsionalisasi, dan dekontekstualisasi, akan tetapi mengarah pada hubungan antara *civil society*, *state*, dan *market* melalui produknya yang berupa kebijakan pariwisata. Karena dalam kebijakan pariwisata tersebut terkait dengan kekuasaan, maka teori diskursus kekuasaan/pengetahuan yang merupakan ranah dari teori *poststrukturalisme* dari Foucault merupakan kritisasi masyarakat terhadap pemilik kekuasaan yang lebih melindungi kapitalis. Foucault (2002) menyatakan bahwa poststrukturalisasi ¹⁶merupakan reaksi terhadap strukturalisasi yang membongkar setiap klaim akan oposisi pasangan, hierarki dan validitas kebenaran universal, sebaliknya menjungjung tinggi permainan bebas tanda serta kestabilan makna dan kategori intelektual. Dalam mengatasi tekanan dari masyarakat yang memandang sebuah kebijakan pariwisata merugikan masyarakat setempat, pemilik kekuasaan akan mempergunakan politik kepastian. Menurut Ritzer (2005), dalam politik kepastian selalu mencari penegasan fakta bahwa pemilik kekuasaan telah membuat pilihan-pilihan yang tepat. Oleh karena itu pemilik kekuasaan tidak mau disalahkan dari kebijakan pariwisata yang digulirkan. Pariwisata internasional merupakan industri utama yang cepat berkembang dan terkait dengan kebijakan pariwisata nasional dan internasional. Dalam pelaksanaannya, untuk sementara mempertemukan orang-orang dari berbagai budaya di suatu wilayah yang tidak diketahui sebelumnya. Industri ini memiliki banyak aspek pertunjukan, beberapa komoditi perdagangan internasional. Sebagian dari industri ini adalah murni kesenangan, sebagian lainnya bisa sebagai suatu

kekuatan modernisasi yang merusak atau menghancurkan. Untuk itu keberadaan kebijakan yang bersifat politik pada semua aspek perlu dikaji dengan berbagai kepentingannya, dengan tidak menimbulkan marginalisasi bagi masyarakat di destinasi wisata, termasuk manajemen dari sebuah destinasi wisata.

Kajian yang berperspektif gender ditampilkan oleh tulisan yang berjudul **Ketidakadilan Terhadap Perempuan Dalam Pariwisata**. Dalam tulisan ini, ketidakadilan terhadap perempuan juga mengambil contoh pada perempuan Bali. Perempuan sering diposisikan sebagai kaum marginal dalam berbagai bidang kehidupan. Posisi perempuan seperti itu juga dialami oleh perempuan pada masyarakat Bali, baik secara akademik maupun ekonomi dalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan. Dalam kondisi seperti ini, pemahaman dan analisis aktivitas berperspektif gender menjadi penting dilakukan. Dalam membahas gender, menurut Ratna (2005) selalu yang dijadikan acuan adalah perempuan, oleh karena itu konsep yang penting dan perlu dipahami dalam rangka membahas perempuan adalah konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Konsep ini mempertajam pemikiran Foucault dan Althusser, yang mengkritik semangat reduksionisme dan anti pluralisme dari keseluruhan analisis di bawah pengaruh modernisme. Kritik ini juga sejalan dengan analisis hegemoni ideologi yang dikembangkan oleh Gramsci. Terkait dengan *cultural studies*, pembahasan tentang feminisme dan gender ini dikaitkan dengan kebudayaan, sebagai akibat kondisi perempuan yang ter-subordinasi-kan atas kebudayaan, artinya kebudayaanlah yang menyebabkan perempuan dianggap sebagai **memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki**. Posisi perempuan yang ter-subordinasi oleh kebudayaan terkait dengan diskursus (wacana) *developmentalism* yang disebut *women in development*. Pada beberapa daerah umumnya perempuan amat bergairah sebagai pekerja rumahan, karena kegiatan tersebut bisa dipadukan secara elastis dengan kegiatan domestik. Gejala ini tidak terlepas dari superstruktur ideologi yang mereka miliki, terutama bertalian dengan etos kerja. Etos kerja menentukan sikap dan perilaku manusia dalam menangani suatu pekerjaan. Namun dalam kenyataannya, faktor lain yang bersumber dari struktur sosial dan infrastruktur material, tentu tidak bisa diabaikan, karena bisa pula memberikan penguatan atau kendala terhadap etos kerja. Dalam kearifan lokal Bali, konsep etos kerja telah digubah dalam karya berbahasa Bali yang bernama *salampah laku*, yang dimaksud

dengan etos kerja adalah usaha yang sangat bermakna lewat perbuatan maksimal yang ditempuh lewat usaha yang sadar dan merupakan panggilan suci. Sementara itu perempuan Bali menganggap kerja adalah *yadnya* yang perlu dijalani serta diamalkan untuk peningkatan kualitas diri. Dalam kesehariannya, perempuan Bali meskipun mengalami ketidakadilan, namun mereka tetap membara semangatnya untuk memperoleh nafkah serta mampu berwirausaha. Sedangkan terkait dengan pelecehan seksual yang menimpa pekerja perempuan, hal tersebut terkait dengan relasi kuasa dan kepuasan. Pelecehan seksual dipersempit dengan cara menghadirkan perempuan sebagai agen yang berkuasa. Posfeminisme mendiskriminasi kejahatan perkosaan tanpa mengesahkan perilaku yang tampak seperti perkosaan. Namun mereka akan mengkategorikan perkosaan sebagai agresi, dan menghilangkan semua konotasi perkosaan sebagai korban hasrat dari sebuah kejahatan kekerasan, yang lebih dikenal sebagai kekerasan seksualitas.

Tulisan yang merupakan penutup sekaligus ramuan dari topik-topik sebelumnya, mengungkapkan keterpinggiran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berupa desa wisata. Topik terakhir dari buku ini berjudul **Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata**, dengan diperkaya contoh-contoh yang terjadi di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Topik ini mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat secara ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Namun kenyataannya, pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih berjalan jauh dari harapan masyarakat setempat, seperti masyarakat setempat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengembangan pariwisata, pengelolaan desa wisata yang didominasi oleh *desa dinas*, terhegemoninya partisipasi masyarakat, dan timbulnya konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mengkaji gap antara harapan dan kenyataan tersebut, dari sisi kajian budaya dipergulatkan beberapa teori, seperti teori hegemoni, teori komodifikasi, teori dekonstruksi, teori diskursus kekuasaan/pengetahuan, dan teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Gramsci (1971) mengemukakan bahwa hegemoni merupakan cara kelompok dominan untuk mendapatkan dukungan kelompok-kelompok sub-ordinasi melalui proses kepemimpinan intelektual dan moral, dengan dijebak mempergunakan diskursus tertentu, pihak yang dikuasai dibuat setuju atau berkonsensus untuk dikuasai. Diskursus atau wacana merupakan cara menghasilkan

10
pengetahuan beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial, serta saling keterkaitan dengan semua aspek tersebut. Dalam pengembangan pariwisata, untuk menarik masyarakat terlibat dalam pengembangan tersebut, diskursus yang dipergunakan adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*).⁵⁸ Penggunaan diskursus atau wacana, sejalan dengan pemikiran teori diskursus kekuasaan/pengetahuan dari Foucault (2002). Namun senyatanya, diskursus tersebut lebih memihak kepada masyarakat pemilik modal, sedangkan masyarakat kecil yang tidak memiliki modal tidak terakomodir. Oleh karenanya, diskursus tersebut sepatutnya didekonstruksi dengan pariwisata kerakyatan yang lebih mengakomodir seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial dan kelas sekaligus mencegah terjadinya pen-subordinasi-an pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, masyarakat setempat perlu lebih diberdayakan dan dilibatkan pada seluruh tahapan pengembangan pariwisata sesuai dengan kemampuannya. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan (bukan dialektika sejahtera yang belum sejahtera), dan mencegah logika komodifikasi yang keliru di kalangan masyarakat tempat pengembangan pariwisata.

Akhir kata, semoga kompilasi tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku ini, dengan segala kelemahan dan keunggulannya,²⁹ dapat memperkaya wawasan dan cakrawala pandang kita tentang wacana kontemporer pariwisata sekaligus mengasah daya kritis kita dalam membaca dan menyikapi reduksi-reduksi atau penyempitan-penyempitan cara pandang atau wacana kontemporer pariwisata yang mungkin semakin meruap dalam era globalisasi seperti sekarang ini.

POSTFORDISME SEBAGAI MODEL EKONOMI BARU DALAM PARIWISATA

A. PENGANTAR

Fordisme sebagai model praktik ekonomi, merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang dianut oleh negara bangsa. Ciri dari *fordisme* adalah adanya produksi besar-besaran barang-barang yang terstandarisasi dalam konteks konsumsi massa. Hal ini akan membawa konsekuensi pada sistem peng-gaji-an yang relatif tinggi, setidaknya bagi para pekerja inti, agar bisa menjamin lakunya barang-barang produksi massal. Tentunya *fordisme* adalah suatu bentuk model praktik di bidang ekonomi yang harus dikaji ulang, karena dibalik praktik tersebut ada pekerja (sebagian besar kaum perempuan) yang termarginalkan. Posisi perempuan yang termarginalkan dalam praktik *fordisme* dapat dilihat dari fenomena dibayarnya pekerja perempuan dengan sangat murah dalam memproduksi barang-barang yang terstandarisasi. Aspek kaum perempuan yang termarginalkan inilah yang menarik dikaji dari perspektif kajian budaya, yang pada akhirnya akan melahirkan *postfordisme*.

Untuk mencapai tujuan berupa produksi dengan barang-barang yang berstandar itu, maka *fordisme* menerapkan teknik-teknik “manajemen ilmiah” (Taylor, 1911) yang menekankan pada [1] adanya pembagian tugas berdasarkan divisi, [2] pemanfaatan studi gerak dan waktu untuk mendeskripsikan tugas-tugas kerja, dan [3] penggunaan insentif uang sebagai motivator utama pekerja.

Dalam perkembangan dari praktik ekonomi *fordisme*, banyak elemen konfigurasi sosial dan ekonomi yang berubah dan berjalan satu arah. Ada tiga istilah yang dipakai untuk menggambarkan perubahan itu, yaitu [1] *postfordisme*, [2] masyarakat post-industrial, dan [3] kapitalisme acak (*disorganized capitalism*). Dari ketiga istilah yang menggambarkan perubahan itu, berikut diuraikan tentang *postfordisme*.

B. POSTFORDISME

Jika ekonomi dilihat sebagai sebuah produksi, maka pergeseran atau perubahan dari *fordisme* ke *postfordisme* melibatkan pergeseran dari produksi massal barang yang homogen menuju penyesuaian skala kecil (*small batch customization*), yakni dari uniformitas dan standarisasi menjadi produksi yang fleksibel dan variatif untuk melayani pasar-pasar ceruk khusus (*niche markets*). Biaya yang dipergunakan untuk menyimpan cadangan stok dipangkas dan menerapkan sistem “tepat pada waktunya” (*just in time*).

Dalam bidang ketenagakerjaan, *postfordisme* melakukan restrukturisasi proses tenaga kerja. Targetnya adalah mendapatkan pekerja yang berketrampilan jamak dan membuang garis-garis batas kerja yang kaku untuk menciptakan organisasi tenaga kerja yang lebih horizontal dengan penekanan pada tanggungjawab bersama antar pekerja.

Selain terkait dengan spesialisasi kerja yang fleksibel, *postfordisme* juga mengarah pada sebuah mode regulasi sosial dan politik yang menstabilkan hubungan antara konsumsi dengan akumulasi, yakni antara berapa banyak yang dibelanjakan konsumen dengan berapa banyak yang diperoleh perusahaan. Analisis ini mengasumsikan adanya kondisi produksi dan hubungan sosial dan politik dengan gaya hidup (Aglietta, 1979).

C. PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

Kajian budaya banyak dipengaruhi oleh teori-teori pascastrukturalis tentang bahasa, representasi, dan subjektivitas. Kajian budaya tidak berbicara dengan satu suara dan tidak bisa dibicarakan dengan satu suara. Istilah “kajian budaya” tidak memiliki titik acuan yang bisa kita tunjuk. Kajian budaya lebih dibentuk oleh permainan bahasa (*language-game*). Meskipun kajian budaya menekankan pada analisis konjungtural, yaitu analisis yang “membumi, deskriptif, serta spesifik secara historis dan kontekstual”, ada konsep-konsep kajian budaya di seluruh dunia yang membentuk “suatu sejarah pencapaian nyata yang kini telah menjadi bagian dari tradisi kajian budaya”, dan mengabaikan sama saja dengan “rela menerima sesuatu yang tidak memadai” (Grossberg et al., 1992:8).

Kajian budaya merupakan wilayah kajian multidisipliner atau pascadisipliner, dengan menekankan pentingnya perubahan dan representasi dari dan “untuk” kelompok-

kelompok sosial yang terpinggirkan, terutama kelas, gender, dan ras (tapi juga kelompok usia, orang-orang cacat, kebangsaan, dan sebagainya). Kajian budaya adalah sebuah formasi diskursif, yaitu sekumpulan (atau formasi) gagasan, citra dan praktik yang menyediakan cara-cara untuk berbicara tentang sesuatu, menyediakan bentuk-bentuk pengetahuan dan tingkah laku yang diasosiasikan dengan suatu topik, aktivitas sosial atau wilayah institusional tertentu dalam masyarakat” (Hall, 1997a:6).

Bennet (1998) menawarkan “elemen dari definisi” kajian budaya sebagai berikut:

- a. Kajian budaya adalah bidang interdisipliner yang secara selektif mengambil berbagai perspektif dari disiplin lain untuk meneliti hubungan antara kebudayaan dan politik.
- b. Kajian budaya mengeksplorasi berbagai macam bentuk kekuasaan, termasuk gender, ras, kelas, kolonialisme, dan lainnya.
- c. Wilayah institusional utama kajian budaya adalah lembaga pendidikan tinggi.
- d. Kajian budaya tertarik pada segala macam praktik, lembaga dan sistem klasifikasi yang memungkinkan ditanamkannya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kompetensi-kompetensi, rutinitas hidup dalam bentuk perilaku khas yang menjadi kebiasaan pasar suatu populasi (Bennet, 1998:28).

Terlait dengan ekonomi, salah satu konsep yang digunakan dalam kajian budaya adalah konsep materialisme dan non-reduksionisme, yaitu kajian budaya lebih mengembangkan materialisme kultural, yaitu pengeksploasian pemaknaan dalam konteks sarana dan kondisi-kondisi produksi, dan dihubungkan dengan ekonomi politik. Non-reduksionisme dimaksudkan sebagai prinsip utama kajian budaya yang yakin kebudayaan memiliki makna, aturan dan praktik-praktik khasnya sendiri yang tidak bisa direduksi menjadi atau dijelaskan semata oleh kategori level formasi sosial.

Kajian budaya menolak klaim para empiris bahwa pengetahuan hanyalah masalah mengumpulkan fakta yang digunakan untuk mendeduksi atau menguji teori. Teori dipandang sudah implisit dalam penelitian empiris melalui pemilihan topik, fokus riset dan konsep-konsep yang dipakai untuk mendiskusikan dan menafsirkannya.

D. POSTFORDISME SEBAGAI MODEL EKONOMI BARU

Postfordisme merupakan salah satu cara untuk memahami proses restrukturisasi global dan perubahan kualitatif dalam pengorganisasian produksi dan konsumsi (Allen,

1992). Rezim yang dikenal sebagai *fordisme* (diambil dari nama pabrik mobil Henry Ford yang menghasilkan mobil dalam jumlah massal) membentuk ekonomi kapitalis. Paham ini menyatakan bagaimana penghematan biaya bisa dijamin dengan barang-barang diproduksi secara massal dan dikonsumsi secara massal. Dalam kondisi *postfordisme* sebagai rezim “ekonomi baru”, ada pergeseran kualitatif dari produksi dan konsumsi massal ke sistem produksi dan organisasi kerja yang lebih fleksibel. *Postfordisme* juga membuat hubungan sementara dengan perubahan bagaimana barang dan jasa dikonsumsi, dengan selera konsumen yang berubah cepat dan munculnya pasar yang tersegmentasi.

Dalam ranah perkembangan pariwisata, contoh dari model *postfordisme* adalah sebagai berikut. Pada awalnya, daya tarik wisata yang ditawarkan selalu yang berorientasi pada wisatawan massal. Namun saat ini, orientasinya telah bergeser menjadi daya tarik wisata untuk wisatawan individual atau daya tarik wisata yang menawarkan wisata alternatif. Penawaran wisata alternatif pada negara-negara Dunia Ketiga merupakan contoh wisata *postfordisme* yang nyata dalam kancah industri pariwisata global. Lebih lanjut, jika *postfordisme* dikaitkan dengan aktivitas pariwisata, dapat digambarkan berikut ini.

Tabel 1.1 Hubungan Postfordisme dengan Pariwisata

Postfordisme	Pariwisata
Konsumen semakin dominan dan produsen harus lebih berorientasi pada konsumen.	Penolakan terhadap beberapa bentuk pariwisata tertentu dan keragaman pilihan yang semakin meningkat.
Pergantian yang cepat dalam preferensi / kecenderungan konsumen.	Sedikit wisatawan yang berkunjung ulang dan menjamurnya lokasi dan atraksi wisata alternatif.
Segmentasi pasar yang meningkat.	Berkembangnya jenis liburan dan atraksi wisata berdasarkan penelitian gaya hidup.
Pertumbuhan gerakan konsumen.	Lebih banyak informasi yang diberikan tentang liburan dan atraksi alternatif melalui media.
Pengembangan banyak produk baru, yang masing-masing memiliki masa bertahan singkat.	Perputaran yang cepat pada lokasi wisata dan pengalaman wisata karena perubahan gaya hidup.
Kecenderungan yang meningkat dalam memunculkan berbagai bentuk produksi / konsumsi non massal.	Pertumbuhan ‘pariwisata hijau’ dan bentuk makanan serta akomodasi yang secara individual bagi wisatawan berorientasi kepada desa wisata.
Konsumsi semakin kurang berfungsi dan semakin diestetiskan.	Terjadi ‘de-deferensiasi’ pariwisata dari liburan, budaya retailing, pendidikan, olah raga dan hobi.

Diadopsi dari Lash dan Urry (1994:274)

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa selera wisatawan sangat cepat sekali berubah, dan akibat perubahan selera itu menimbulkan kelompok wisatawan yang sudah

tersegmentasi sesuai dengan keinginan serta ketertarikan mereka terhadap sebuah produk wisata. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi bagi para produsen produk wisata, untuk secara fleksibel memenuhi keinginan atau selera wisatawan, kapanpun mereka inginkan dan butuhkan.

Terkait dengan waktu pemenuhan kebutuhan wisatawan, Marxis David memaparkan konsep 'tekanan ruang waktu', yang menaruh perhatian besar dalam mengupas pertumbuhan dan pembangunan pariwisata Dunia Ketiga. Lebih lanjut Harvey dalam bukunya *The Conditions of Postmodernity* (1989b) menyatakan bahwa konsep 'tekanan ruang waktu' dapat dilihat pada langkah kehidupan ekonomi (termasuk kehidupan sehari-hari) dan percepatan yang fenomenal dalam pergerakan modal dan informasi. Contohnya, kita dapat mendatangi sebuah agen perjalanan di Jakarta untuk membeli tiket pesawat rute penerbangan dari Paris ke Lusaka dengan transit di Windhoek. Hal ini dapat terjadi karena adanya percepatan arus informasi serta kemampuan teknologi, termasuk penggunaan sosial media.

'Tekanan ruang waktu' berupaya menggabungkan intensifikasi pada saat para kapitalis berupaya mengatasi hambatan jarak dan merentangkan hubungan ekonomi mereka ke seluruh belahan dunia. Hal ini berarti perluasan hubungan produksi para kapitalis yang secara terus menerus dengan tujuan utamanya mengurangi waktu pergantian modal dan mempercepat waktu sirkulasi modal serta untuk mempertahankan keuntungan. Baik pasar baru maupun produk baru dicari untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, semakin banyaknya bermunculan destinasi wisata dalam industri pariwisata yang semakin mengglobal.

Dalam kaitan perputaran modal seperti bagaimana modal dituangkan, diserap, dan dikelola (Harvey, 1989b:131), dan transisi ekonomi atau pergantian kualitatif, Harvey berpendapat bahwa dari segi produksi masalah yang dihadapi dalam mencapai peningkatan produktivitas adalah kefleksibelan (Harvey, 1989b:vi). Dalam pariwisata, fleksibilitas ini sudah diakomodir, baik dalam produk wisata maupun dalam pola konsumsi. Adapun diagram tentang bagaimana terjadinya akumulasi fleksibel, dapat dilihat pada diagram berikut.

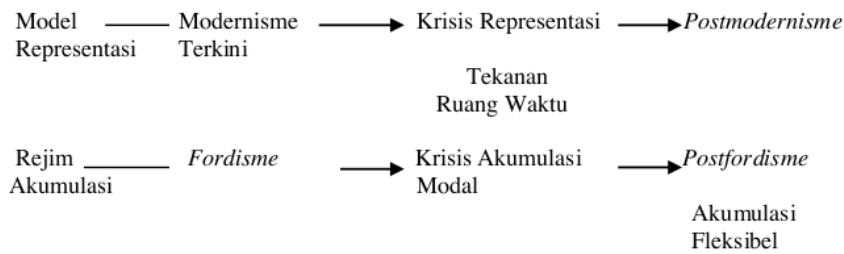


Diagram 1.1 Perubahan Model Postmodernisme menuju Postfordisme

Diagram di atas memperlihatkan bahwa perputaran modal dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan suatu tingkat ekspansi yang cepat. Dalam konteks pariwisata, dapat dilihat dari bergantinya *trend* destinasi wisata yang juga merupakan perwujudan dari 'tekanan ruang waktu'. Dengan logika akumulasi, modal mendorong pariwisata berkembang ke seluruh penjuru dunia. Dengan cara yang sama, faktor-faktor seperti bencana alam, ketidakstabilan politik, lingkungan serta lain-lainnya juga berperan dan andil bagi terjadinya pasang surut kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata. Dalam kaitan inilah, perlunya melibatkan budaya dan gaya hidup yang berkesinambungan.

Restrukturisasi ekonomi yang dramatis yang muncul dalam globalisasi sangat terkait dengan perubahan budaya yang luas (Jameson, 1984; Harvey, 1989b). Ketika pemikiran Harvey dilandaskan pada ekonomi, ia juga menekankan pentingnya perubahan budaya dalam restrukturisasi global. Lebih lanjut Harvey (1989:vii) menyatakan sebagai berikut. Ketika keserempakan dalam pergantian dimensi ruang dan waktu tidak membuktikan adanya hubungan berdasarkan kebuthan atau hanya sambil lalu, landasan *a priori* yang kuat dapat dikemukakan untuk membuat ulasan bahwa ada semacam hubungan yang dibutuhkan antara munculnya bentuk budaya post-modern, munculnya mode akumulasi modal yang fleksibel dan putaran 'tekanan ruang waktu' yang baru dalam organisasi kapitalisme.

Dalam pengertian yang luas, postmodernisme merujuk pada munculnya gaya budaya baru (dalam seni, arsitektur, musik dan objek pengalaman yang kita beli dan konsumsi), dan postmodernisme membantu menarik perhatian pada hubungan penting

antara kebiasaan konsumsi masyarakat Dunia Pertama dengan keinginan para kapitalis untuk meningkatkan waktu pergantian modal.

Ketika dunia yang mengglobal menimbulkan ekonomi global, demikian juga dalam proses tersebut timbul budaya global seperti adanya *big mac*, *coca cola*, banyak pengamat meramalkan bahwa masyarakat Dunia Ketiga tidak akan mampu meneruskan tradisinya menghadapi serangan nilai-nilai kebudayaan barat (Morrow, 1995). Pada akhirnya, postmodernisme akan membantu memahami tingkat perbedaan dan 'fragmentasi' yang tinggi yang ada pada perubahan budaya kontemporer (Harvey, 1989b), yang dalam masyarakat Dunia Pertama disebut kelas menengah baru.

Kelas menengah baru dalam postmodernisme diidentifikasi sebagai 'penghubung budaya baru' (Bourdieu, 1984). Kelas menengah baru ini semakin dikenal sebagai akibat pertumbuhan media, layanan jasa personal dan munculnya ekonomi berorientasi jasa secara lebih umum. Oleh karena itu, kelas menengah baru merupakan kunci dalam memulai, menyebarkan, menerjemahkan proses budaya dan pola konsumsi baru. Crompton (1993) berpendapat bahwa kebanyakan kajian tentang pertumbuhan kelas menengah dihubungkan secara krusial dengan kapitalisme konsumen dan penekanan pada 'gaya hidup'. Dengan perubahan budaya dan ekonomi yang cepat, kelompok sosial selalu mencoba untuk mencerminkan posisi mereka pada kelompok lain dalam 'tanaman masyarakat dan budaya baru' (Shurmer-Smith dan Hannam, 1994) atau dengan kata lain, mencoba untuk mempertahankan gaya hidup yang berbeda.

E. ANALISIS KRITIS

Sehubungan dengan [1] *postfordisme* melibatkan pergeseran dari produksi massal barang yang homogen menuju penyesuaian skala kecil (*small batch customization*), yakni dari uniformitas dan standarisasi menjadi produksi yang fleksibel dan variatif untuk melayani pasar-pasar ceruk khusus (*niche markets*), [2] dalam bidang ketenagakerjaan, *postfordisme* melakukan restrukturisasi proses tenaga kerja dengan targetnya adalah mendapatkan pekerja yang berketrampilan jamak, [3] *postfordisme* juga mengarah pada sebuah mode regulasi sosial dan politik yang menstabilkan hubungan antara konsumsi dengan akumulasi, yakni antara berapa banyak yang dibelanjakan konsumen dengan berapa banyak yang diperoleh perusahaan. Dari ketiga pergeseran yang dilakukan oleh *postfordisme* tersebut, jika dikaitkan dengan *cultural studies* dapat dikemukakan bahwa *postfordisme* telah melakukan hegemoni terhadap konsumen, yaitu konsumen harus dapat menyesuaikan diri dengan produk yang dihasilkan oleh rezim *postfordisme*. Tenaga kerja juga dihegemoni, karena para pekerja tersebut dipaksa untuk memiliki ketrampilan yang jamak atau tidak spesialisasi.

Hegemoni merupakan konsep yang dikembangkan oleh penganut Marxism berkebangsaan Italia, Antonio Gramsci, yang menekankan kemampuan kelas yang dominan untuk meyakinkan mayoritas kelas di bawahnya untuk menerapkan nilai-nilai politik, budaya, dan moral tertentu sebagai sebuah strategi yang lebih efisien dari pada memaksa kelompok kelas di bawahnya untuk menyesuaikan diri (Jackson, 1992). Oleh karena itu, hegemoni merupakan kemampuan persuasi yang dapat dibedakan dari ideologi, dan secara kontras dapat diterapkan secara paksa (Eagleton, 1991:112).

Hegemoni yang dilakukan oleh *postfordisme* tidak meliputi seluruh aspek kehidupan konsumen dan tenaga kerja, melainkan hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan konsumen dan ketrampilan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan kebaruan pemikiran Gramsci (pencetus teori hegemoni), yaitu bahwa hegemoni tidak pernah secara utuh dicapai dalam masyarakat kapitalis. Oleh karena itu, hegemoni harus terus 'diperbaharui, diciptakan kembali, dipertahankan, dimodifikasi' dan 'tidak dapat dipisahkan dari sengitnya pertentangan' (Eagleton, 1991:115). Ini berarti juga tidak selalu ada ideologi baru dibalik kapitalisme dengan faham barunya dalam bidang ekonomi.

F. PENUTUP

Ada tiga pergeseran yang terjadi dari *fordisme* ke *postfordisme* yaitu: [1] *postfordisme* melibatkan pergeseran dari produksi massal barang yang homogen menuju penyesuaian skala kecil (*small batch customization*), yakni dari uniformitas dan standarisasi menjadi produksi yang fleksibel dan variatif untuk melayani pasar-pasar ceruk khusus (*niche markets*); [2] dalam bidang ketenagakerjaan, *postfordisme* melakukan restrukturisasi proses tenaga kerja. Targetnya adalah mendapatkan pekerja yang berketrampilan jamak; [3] *postfordisme* juga mengarah pada sebuah mode regulasi sosial dan politik yang menstabilkan hubungan antara konsumsi dengan akumulasi, yakni antara berapa banyak yang dibelanjakan konsumen dengan berapa banyak yang diperoleh perusahaan.

Postfordisme mengalami 'tekanan ruang waktu', hal ini dapat dilihat pada langkah kehidupan ekonomi (dan kehidupan sehari-hari) dan percepatan yang fenomenal dalam pergerakan modal dan informasi. Hegemoni yang dilakukan oleh *postfordisme* tidak meliputi seluruh aspek kehidupan konsumen dan tenaga kerja, melainkan hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan konsumen dan ketrampilan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan kebaruan pemikiran hegemoni, bahwa hegemoni tidak pernah secara utuh dicapai dalam masyarakat kapitalis. Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan di Indonesia telah masuk dalam jerat ekonomi *postfordisme*, sehingga destinasi wisata beserta atraksi yang ditawarkan mengacu pada kebutuhan wisatawan dan juga ada dalam 'tekanan ruang waktu'. Oleh karenanya, kapitalis akan dengan mudah menghegemoni wisatawan beserta masyarakat yang merupakan objek dan subjek dalam kepariwisataan.

2

TERASERING SAWAH SEBAGAI DAYA TARIK WISATA: KAJIAN ESTETIKA POSTMODERN

A. PENGANTAR

Pariwisata merupakan kompleksitas bisnis, di dalamnya terdapat fenomena berupa hubungan timbal balik dan interaksi di antara *stakeholders* yang oleh Perlas (2000) disebut *Threefolding* yaitu antara pemerintah, pengusaha/dunia usaha pariwisata dan masyarakat penerima (*host*). Hubungan tersebut timbul dalam rangka penciptaan daya tarik wisata dan upaya menjamu wisatawan dan pengunjung (*visitor*) lainnya (Gartner, 1996:5-7). Dalam kaitan *threefolding* tersebut, masyarakat disebut sebagai dimensi budaya, pengusaha/dunia usaha pariwisata disebut sebagai dimensi ekonomi serta pemerintah sebagai dimensi politik.

Dalam kaitan dengan daya tarik wisata, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dari definisi tersebut terlihat bahwa begitu luasnya batasan yang diberikan untuk daya tarik wisata, sehingga hal-hal atau sesuatu yang menarik bagi wisatawan itu lebih lanjut dikelompokkan menjadi segala sesuatu yang berasal dari alam (*natural resources*), budaya (*culture*) dan segala sesuatu hasil buatan manusia (*man made resources*).

Berbicara tentang daya tarik wisata yang merupakan hasil kombinasi antara alam dan hasil buatan manusia, pembicaraan tentang daya tarik wisata tidak bisa terlepas dari keindahan, baik keindahan yang disediakan oleh alam maupun keindahan yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena keindahan itulah maka seseorang yang melakukan perjalanan wisata (*wisatawan*) akan tertarik untuk melihat dan mengunjungi daya tarik wisata tersebut, di samping adanya keamanan yang merupakan syarat utama dalam kepariwisataan. Dengan demikian keindahan merupakan salah satu faktor penarik atau daya tarik wisatawan berkunjung ke suatu destinasi wisata.

Salah satu daya tarik wisata yang merupakan kombinasi antara alam dan hasil karya manusia adalah terasering sawah. Terasering sawah yang dijadikan objek kajian adalah terasering sawah yang terdapat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Terasering sawah di desa tersebut di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, terkait dengan keberadaannya, pernah berkembang dua fenomena, yaitu: *Pertama* terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih diusulkan untuk dijadikan warisan budaya dunia (*World Culture Heritage*) dan sudah dinominasikan, bahkan sudah tercatat dalam registrasi UNESCO dengan Nomor C 1194 tanggal 21 April 2004. Fenomena ini jika dikaitkan dengan *International Cultural Tourism Charter* seperti yang diadopsi oleh ICOMOS pada bulan Oktober 1999 antara lain menyebutkan sebagai berikut.

”Konservasi warisan budaya merupakan media atau sarana untuk melakukan pertukaran budaya antara wisatawan domestik dengan internasional dengan masyarakat lokal, dan pemahaman tentang warisan budaya masyarakat lokal haruslah menjadi prioritas pertama. Apabila terjadi konflik kepentingan antara wisatawan di satu sisi dan masyarakat lokal di lain pihak, maka pengelolaan sumber daya budaya harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi kini maupun yang akan datang. Masyarakat dan penduduk asli harus dilibatkan dalam perencanaan konservasi pariwisata serta harus menguntungkan masyarakat lokal.”

Kedua, masyarakat petani di Desa Wisata Jatiluwih lebih memilih bertani atau mempertahankan budaya agraris dengan sistem pertanian tradisional, dan tidak tertarik untuk masuk ke kancah industrialisasi termasuk dalam sistem pertanian mereka, padahal desa-desa di sekitarnya sudah mulai masuk ke kancah industrialisasi (antara lain masyarakat mulai meninggalkan pertanian di desa dan pergi ke kota untuk bekerja pada berbagai sektor industri atau pertanian mereka sudah dimasuki oleh industrialisasi seperti penggunaan mesin-mesin untuk pertanian). Mengintroduksi Sairin (2002:172), kondisi ini merupakan pertentangan dari kondisi masyarakat Indonesia yang berada pada masa transisional, dengan ciri masyarakat transisional cenderung berpindah dari kehidupan agraris tradisional yang penuh nuansa spiritualistik dan majik menuju masyarakat industrial yang cenderung materialistik dan rasional. Kebertahanan masyarakat terhadap sistem pertanian tradisional ini bisa juga dilihat dari konteks perlindungan terhadap

pekerja wanita di pedesaan, karena jika industrialisasi dibiarkan berkembang pada pertanian, akan mengakibatkan menyusutnya lapangan pekerjaan bagi wanita di pedesaan (Collier, 1974; Sairin, 1976) atau juga bisa dilihat dari upaya memegang teguh prinsip "*safety first*" dan menolak introduksi teknologi baru dalam pertanian (Scott, 1976).

Dengan adanya dua fenomena di atas, jika terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih "berhasil" dijadikan warisan budaya dunia, akan timbul dua kemungkinan yaitu [1] masyarakat desa dalam hal ini petani yang sawahnya memiliki terasering yang indah dan kebetulan berada di lokasi warisan budaya dunia akan bisa mewujudkan keinginannya untuk menolak industrialisasi, karena mereka akan bisa terus bertani dengan sistem pertanian tradisional dan dapat mewariskan suatu bentuk sistem pengairan tradisional yang baik dan indah yang berwujud terasering kepada generasi mendatang, atau [2] masyarakat desa dalam hal ini petani justru akan terjebak dan masuk ke dalam industrialisasi, yaitu industrialisasi pariwisata. Kedua kemungkinan di atas tidak bisa terlepas dari keindahan yang ada pada terasering sawah tersebut, artinya jika terasering sawah tersebut secara ketat dipertahankan sebagai warisan budaya dunia, maka unsur keindahan tetap harus dijaga di samping keaslian, sedangkan jika masuk ke kancah industri pariwisata, maka unsur keindahan mutlak diperlukan dan terjadi komodifikasi. Selain keindahan, dalam pariwisata postmodern juga ditampilkan daya tarik wisata seperti gambaran tentang kemiskinan (Mowforth and Maunt, 2000:45). Kemiskinan berlawanan dengan keindahan. Dalam estetika juga demikian, menurut Stolnitz dalam Ali (2004:11) estetika tidak hanya menyelidiki yang indah, tetapi juga yang buruk.

Berdasarkan uraian di atas, perlu mengkaji unsur keindahan (estetis) dari terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih sebagai daya tarik wisata, dan daya tarik wisata itu akan semakin kuat manakala terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih dijadikan Warisan Budaya Dunia (WBD). Dalam konteks fenomena yang berkembang di masyarakat Desa Wisata Jatiluwih untuk mempertahankan sistem pertanian tradisionalnya, fenomena tersebut akan dapat memperkaya destinasi wisata tersebut.

B. DESKRIPSI KONTEKS BUDAYA

1. Deskripsi Objek

108

Desa Wisata Jatiluwih terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan lebih kurang 27 kilometer ke utara kota Tabanan. Jatiluwih merupakan salah satu daya tarik wisata di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari dua puluh enam daya tarik wisata yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998, Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 337 Tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 266 Tahun 2007. Keduapuluh enam daya tarik wisata yang ditetapkan berdasarkan ketiga Surat Keputusan Bupati Tabanan tersebut antara lain: Ulun Danu, Kebun Raya Eka Karya, Bedugul, Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri, Taman Pujaan Bangsa Margarana, Alas Kedaton, Tanah Lot, Sanggar Tari Whratnala, Museum Subak, Pantai Yeh Gangga, Taman Kupu-Kupu Lestari, Areal Batukaru, Jati Luwih, Yeh Panes Belulang, Yeh Panes Penatahan, Pantai Pasut, Pantai Kelating, Puri Gede Kerambitan, Puri Anyar, Pantai Soka, Pantai Sureberata, Sarinbuana, Hutan Mekori, Air Terjun, Perkebunan Pujungan, Desa Wisata Pinge dan Bendungan Telaga Tunjung. Khusus untuk Desa Wisata Jatiluwih, untuk pengelolaan daya tarik wisatanya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Penunjukan Kepala Desa Jatiluwih sebagai Pengelola dan Petugas Pungut Retribusi Tempat Parkir pada Daya Tarik Wisata Jatiluwih.

Desa Wisata Jatiluwih memiliki atraksi wisata yang sekaligus dapat diapresiasi oleh wisatawan. Aset wisata yang dapat disaksikan antara lain: [1] serangkaian potensi yang tersedia sepanjang tahun yaitu alam pegunungan, terasering sawah, dan arsitektur tradisional rumah-rumah penduduk khususnya keberadaan lumbung padi (*jineng*) di areal pekarangan penduduk setempat. Wisatawan dapat berjalan-jalan melintasi pematang sawah dan menikmati pemandangan sawah; [2] panorama sawah yang disertai aktivitas tradisional seperti membajak, menyiapkan bibit, menanam, menuai, dan memasukkan padi ke lumbung. Khusus tentang aset wisata point [2] tidak bisa terselenggara sepanjang tahun karena proses penanaman padi tidak berlangsung sepanjang tahun.

Bagi wisatawan yang menyukai kegiatan alam terbuka (*outdoor activity*), apresiasi pada pegunungan, terasering persawahan, dan pedesaan tradisional dapat ditingkatkan ke dalam aktivitas *trekking* (penjelajahan). Dalam aktivitas ini diharapkan

sebanyak mungkin unsur alam dapat dinikmati oleh wisatawan, misalnya: sawah, sungai, desa, jalan setapak, hutan, tanjakan, turunan, mata air, perkebunan, berbagai pemandangan untuk keperluan fotografi.

Aset wisata lain yang ada adalah upacara yang terkait dengan aktivitas pertanian serta persiapan dibalik upacara tersebut. Dalam implementasinya, kegiatan upacara ini melibatkan unsur masyarakat termasuk *subak*. Wisatawan dapat menyaksikan kegiatan tersebut, sehingga secara tidak langsung dapat melihat budaya pertanian yang ada di masyarakat desa setempat.

Terkait dengan potensi kesenian, tarian *joged bumbung* dari Desa Jatiluwih sudah dikenal oleh masyarakat. Potensi tarian *joged bumbung* ini bisa dikaitkan dengan aktivitas wisatawan selama berwisata di desa, misalnya sebagai pengiring bagi wisatawan yang sedang menikmati makan malam. Selain potensi kesenian berupa *joged bumbung*, beberapa kesenian lainnya yang ada di Desa Wisata Jatiluwih dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Kecuali *joged bumbung*, kesenian lain yang bersifat *sakral* dan *semi sakral* diselenggarakan untuk mendukung aktivitas ritual seperti upacara-upacara keagamaan.

Tabel 2.1 Potensi Kesenian Desa Wisata Jatiluwih

No.	Nama Kesenian	Eksis	Punah	Sakral	Semi Sakral	Profan
1.	Gong	X			X	
2.	Joged Bumbung	X				X
3.	Wayang Kulit		X			X
4.	Pesantian	X			X	
5.	Gender		X		X	
6.	Arja		X			X
7.	Janger		X			X
8.	Bondres		X			X
9.	Tupeng		X			X
10.	Baris		X		X	
11.	Jauk		X		X	
12.	Legong	X		X		
13.	Pendet	X			X	
14.	Baris Memedi	X		X		

Sementara itu *joged bumbung* lebih bersifat hiburan, dan sudah memperluas jangkauan pementasan, tidak hanya di Desa Jatiluwih tetapi juga sudah keluar Desa Jatiluwih.

2. Kekhususan Objek

Sebagai sebuah desa tradisional yang masih "polos" dan hampir tanpa "make up", Desa Wisata Jatiluwih memiliki panorama yang sangat indah, berlokasi di kaki gunung Batukaru dengan ciri khasnya adalah teraseringnya. Pola hidup masyarakat yang bertempat tinggal di desa ini adalah bersifat agraris-religius, dan merupakan daya tarik bagi wisatawan yang membutuhkan apresiasi budaya. Jika dirinci, beberapa kekhususan Desa Wisata Jatiluwih sebagai destinasi wisata adalah sebagai berikut.

- a) Adanya pola terasering yang memperindah pemandangan alam dan menjadi *setting* utama pemandangan setempat di samping aktivitas ritual yang terkait dengan bercocok tanam padi. Terasering sawah yang ada dibuat secara simetris dengan garis serta lekukan yang sangat indah dengan latar belakang alam pedesaan dan pegunungan yang indah.

Gambar 2.1 Lumbung Padi dan Terasering Sawah di Desa Wisata Jatiluwih



- b) Jenis kesenian yang ada di desa setempat.
- c) Tata desa dan arsitektur tradisional Bali yang spesifik.
- d) Kegiatan pertanian yang masih tradisional khas padi sawah Asia Tenggara, dengan ciri antara bulan Oktober-Januari berlangsung aktivitas penyiapan lahan, bibit dan penanaman, sedangkan Mei-Juni diisi dengan kegiatan menuai dan penyimpanan ke lumbung padi.

3. Konteks Budaya

Jika berbicara terasering sawah sebagai hasil karya manusia yang mempergunakan cipta, rasa, dan karsa, secara sederhana dapat dikatakan bahwa terasering sawah dapat dimasukkan sebagai produk budaya karena terasering sawah tersebut dibuat di samping untuk memenuhi fungsi utamanya sebagai media pengaturan irigasi persawahan juga dalam pengerjaannya mempergunakan rasa estetis sekaligus pikiran estetis yang didasarkan pada pengetahuan estetis yang dimiliki oleh seseorang.

Dilihat dari unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 1997:2) yang terdiri dari [1] sistem religi dan upacara keagamaan, [2] sistem dan organisasi kemasyarakatan, [3] sistem pengetahuan, [4] bahasa, [5] kesenian, [6] sistem mata pencaharian, dan [7] sistem teknologi dan peralatan, dalam konteks pengertian yang lebih luas, terasering sawah sebagai komponen pendukung sistem pertanian khususnya dalam hal pengairan juga dapat masuk ke dalam unsur kebudayaan yaitu sistem pengetahuan dan sistem mata pencaharian. Sedangkan jika dikaitkan dengan wujud kebudayaan (Koentjaraningrat, 1997:5) yang terdiri dari [1] wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, [2] wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan [3] wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, dalam konteks daya tarik wisata, terasering sawah dilihat sebagai produk hasil karya manusia yang mempergunakan pengetahuan serta memiliki nilai estetis, dan terasering sawah merupakan simbol dari perwujudan mata pencaharian masyarakat setempat. Ini berarti terasering sawah merupakan "produk" budaya yang bernilai estetis, dan berarti pula dalam membicarakan budaya akan selalu terkait dengan pembicaraan tentang estetis. Terasering sawah dianggap sebagai "produk" budaya karena kebudayaan adalah suatu realitas, suatu yang sudah diciptakan, sudah dihasilkan, sudah terbentuk atau sudah dilembagakan. Jika kebudayaan dilihat sebagai proses, maka proses itu pun adalah suatu proses, sebagaimana yang sudah ada dan sudah berjalan. Kalaupun selama proses ada perubahan, maka perubahan yang dilihat adalah perubahan yang bersifat *de facto*, yaitu bagaimana perubahan itu berlangsung dalam kenyataannya, termasuk "bentuk", "fungsi" serta "substansi" produk baru tersebut. Batasan ini dikembangkan oleh para ilmuwan sosial (Kleden, 1987:167-168). Jika dikaitkan dengan konteks terasering sawah, perubahan bentuk terasering dari sebuah

sawah adalah merupakan konsekuensi dari fungsi awal dari dibuatnya terasering, yaitu sebagai upaya memperlancar pengairan sawah. Kalaupun perubahan bentuk terasering itu disertai unsur estetis, maka itu merupakan dampak ikutan.

Berbicara masalah budaya yang dikaitkan dengan estetis, sejalan dengan definisi budaya menurut Raymond Williams (dalam Storey, 2003:2-3) yang mengatakan bahwa budaya merupakan proses umum perkembangan intelektual, spiritual dan estetis. Lebih lanjut Storey mengatakan bahwa budaya bisa merujuk kepada karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik. Jika dikaitkan dengan terasering sawah, maka terasering sawah tersebut diciptakan sebagai perkembangan dari pengetahuan petani akan sistem pengairan. Dalam proses penciptaan terasering itu ada sentuhan artistik dari petani yang hasilnya berwujud suatu bentuk terasering yang di samping memenuhi nilai estetis juga dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu untuk memperlancar pengairan sawah.

C. ESTETIKA

Estetika adalah salah satu unsur yang penting dalam hidup manusia, karena ia menggerakkan manusia ke arah konstruktif dalam berbagai lapangan hidup, antara lain kepada rasa *jengah* yang berlandaskan *rajasika* dan *satwika* (Mantra, 1996:12). Dengan adanya rasa *jengah* yang dilandasi *rajasika* dan *satwika* itu, manusia akan terpacu untuk berbuat dan menghasilkan sesuatu yang bernilai, baik bernilai guna maupun bernilai keindahan. Sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dalam konteks rasa *jengah* itu, tentu dari sisi "produk" atau bendanya akan terkait dengan [1] bentuk, [2] fungsi dan [3] makna.

Dalam bentuk, fungsi dan makna, terdapat satu hal yang harus digaris bawahi adalah bahwa bentuk, fungsi dan makna adalah merupakan sebuah pendekatan (Ratna, 2003:112). Pendekatan bentuk, fungsi dan makna jelas merupakan pemahaman total atas objek yang dikaji. Pendekatan ini sesuai dengan metode kualitatif dengan ciri adanya data yang bersifat alamiah, serta objek penelitian tidak terpisah dengan latar belakang sosial yang menghasilkannya. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dengan mempergunakan pendekatan ini adalah: [1] harus ada pemahaman tentang mana yang termasuk bentuk, fungsi dan makna, [2] penelitian difokuskan pada makna, bukan bentuk dan fungsi, dan [3] teori yang dipergunakan harus dapat menyatukan ketiga komponen

tersebut menjadi satu kesatuan. Pada umumnya bentuk terdiri atas deskripsi unsur-unsur formal, infrastruktur material dan sistem kebudayaan fisik. Fungsi terkait dengan struktur sosial dan sistem sosial, sedangkan makna terkait dengan suprastruktur ideologis dan sistem budaya (Mudana, 2003:88).

Selain pendekatan bentuk, fungsi, dan makna, dalam estetika dikenal dua pendekatan (Sutrisno dan Verhaak, 1993:81) yaitu: [1] langsung meneliti keindahan itu dalam objek-objek atau benda-benda atau alam indah serta karya seni, [2] menyoroti situasi kontemplasi rasa indah yang sedang dialami oleh subjek (pengalaman keindahan dalam diri orangnya). Dalam kerangka pemikiran postmodern, pendekatan yang sering dipakai adalah pendekatan yang kedua yang terkait dengan pengalaman keindahan. Hal ini sejalan dengan *credo* dari Clive Bell bahwa estetika mesti berangkat dari pengalaman pribadi yang berupa rasa khusus atau istimewa (bdk. "Art" London, 1914 hal. 6) dalam Sutrisno dan Verhaak (1993:81). Dalam kaitan dengan kontemplasi subjek tersebut, rasa (*teste*) subjek akan objek yang diapresiasi juga akan menentukan penilaian estetisnya, sehingga teori selera (*taste*) dapat dipergunakan sebagai pisau analisis akan pengalaman keindahan (Sutrisno, 1999:105).

Penilaian manusia terhadap keindahan (estetis) dari sebuah bentuk produk budaya, menurut Santayana (1961) dalam Ratna (2007:199) mengatakan bahwa keindahan adalah nilai. Sifatnya ideal, abstrak, tidak dapat disentuh dengan indra. Menurut Frondisi (2001:8) ada tiga kualitas nilai, yaitu: [1] kualitas primer, kualitas dasar, yang tanpa kehadirannya objek tidak dapat menjadi ada, [2] kualitas sekunder, kualitas yang dapat ditangkap oleh indra, kualitas yang harus menghadirkan subjek untuk memahaminya, seperti rasa, warna dan bau, dan [3] kualitas tersier yaitu nilai itu sendiri. Liang Gie (1976:145-146) membedakan delapan macam nilai manusiawi yaitu: [a] nilai ekonomis (mengandung aspek-aspek harga pasar), [b] nilai jasmani (mengandung aspek-aspek kesehatan badan), [c] nilai hiburan (mengandung aspek-aspek permainan dan waktu luang), [d] nilai sosial (mengandung aspek-aspek hubungan antar manusia), [e] nilai watak (mengandung aspek-aspek kepribadian), [f] nilai estetis (mengandung aspek-aspek keindahan), [g] nilai intelektual (mengandung aspek-aspek ilmu pengetahuan), dan [h] nilai religius (mengandung aspek-aspek ilahiah). Berdasarkan analisis estetis terhadap

terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih, kualitas estetis akan dilihat dari kualitas tersier dengan melihat penerapan delapan macam nilai manusiawi di atas.

D. ANALISIS BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA

Terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih (seperti Gambar 1), dengan mempergunakan analisis bentuk, fungsi dan makna, dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Bentuk

Terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih secara fisik berbentuk simetris (lebarnya hampir sama, tingginya hampir sama, bentuknya hampir sama dan dengan lekukan atau kelokan yang hampir sama) dan dapat digolongkan menganut *collective style*.

2. Fungsi

Fungsi awalnya adalah dipergunakan oleh petani dengan organisasi *subak*-nya untuk mengatur sistem pengairan sawah, sehingga semua sawah (meskipun ada di lokasi terbawah) dapat terjangkau oleh air.

3. Makna

Makna yang muncul dari keberadaan terasering sawah adalah sebagai berikut.

- a. Merupakan cerminan estetis dari petani di Desa Wisata Jatiluwih yang berwujud keberadaan terasering yang tampil sangat simetris hampir pada semua aspek dari terasering sawah tersebut.
- b. Merupakan sebuah kesadaran kolektif, yang tercermin melalui kegiatan gotong royong di antara pemilik sawah dalam membuat terasering sawah dan juga mengarah kepada budaya kolektif.
- c. Merupakan cerminan persatuan dan kerjasama serta senasib sepenanggungan di antara para petani di Desa Wisata Jatiluwih, yang tercermin dalam pembagian air di antara petani pemilik sawah di *teben* (hulu) dan di *luwan* (hilir).
- d. Merupakan cerminan kepribadian dari petani pembuat dan pemelihara terasering, dapat dilihat dari kerapihan dan kebersihan terasering sawah.
- e. Merupakan cerminan dari pemahaman *trihita karana* para petani yang membuat terasering sawah tersebut, khususnya yang terkait dengan hubungan yang selaras antara manusia dengan lingkungannya (*palemahan*), artinya petani dalam

membuat terasering harus mengikuti *landscape* alam dan tidak bisa memaksakan bentuk terasering seperti apa yang diinginkan oleh petani.

- f. Merupakan cerminan etos kerja yang tinggi dari petani, karena dengan pengetahuan yang dimilikinya (meskipun tradisional) berusaha berkarya untuk menghasilkan yang terbaik dalam upaya menjaga produksi pertanian.
- g. Terasering sawah merupakan upaya mempertahankan keberadaan *local culture* khususnya yang terkait dengan sistem mata pencaharian di bidang pertanian.

Setelah terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih dijadikan daya tarik wisata, dari pendekatan bentuk sudah mengalami perubahan (dilihat dari beberapa komponen terasering seperti *titi* antar *pundukan* yang dipisahkan oleh selokan atau sungai kecil) dulu dibuat dari kayu yang berasal dari pohon-pohon setempat, sekarang dengan masuknya pariwisata, dengan alasan menjaga keamanan wisatawan selama berwisata ke terasering sawah, *titi* (sejenis jembatan kecil antar parit di sawah) yang menghubungkan antar *pundukan* itu dibuat dari beton. Dari pendekatan fungsi, sampai saat ini belum mengalami perubahan, sedangkan dilihat dari pendekatan makna sudah ada pergeseran. Adapun pergeseran itu dapat digambarkan seperti berikut ini.

Tabel 2.2 Pergeseran Bentuk, Fungsi dan Makna Terasering Sawah Desa Wisata Jatiluwih

Pendekatan	Sebelum menjadi Daya Tarik Wisata	Setelah menjadi Daya Tarik Wisata
Bentuk	Bentuk simetris, mencerminkan <i>collective style</i> , mempergunakan bahan-bahan lokal.	Bentuk tetap simetris, namun pada beberapa komponen mempergunakan bahan non lokal dan ada sentuhan teknologi.
Fungsi	Sebagai pengatur sistem pengairan sawah.	Sebagai pengatur sistem pengairan sawah.
Makna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya cerminan estetis. 2. Adanya kesadaran kolektif. 3. Adanya persatuan dan kesatuan. 4. Adanya cerminan kepribadian. 5. Adanya pemahaman terhadap <i>trihita karana</i>. 6. Adanya cerminan etos kerja. 7. Adanya <i>local culture</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerminan estetis semakin tinggi, karena ada upaya komersialisasi. 2. Lingkungan diperkosa, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. 3. Ada pengaruh budaya global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa makna dari terasering sawah sebagai produk budaya akan berubah seiring dengan perubahan kegunaan dan peruntukan produk tersebut sebagai daya tarik wisata.

E. NILAI ESTETIS

Menurut Santayana (dalam Ratna, 2007) keindahan adalah nilai. Dengan mengacu pada nilai estetis yang dikemukakan oleh Liang Gie, daya tarik wisata berupa terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih berdasarkan analisis nilai estetis, akan dikemukakan pada tabel yang berisi uraian tentang ada tidaknya ke-delapan nilai pada terasering sawah tersebut, baik sebelum dijadikan daya tarik wisata maupun setelah dijadikan daya tarik wisata. Adapun perbandingan nilai estetisnya seperti berikut ini.

Tabel 2.3 Perbandingan Nilai Estetis Terasering Sawah Desa Wisata Jatiluwih Sebelum dan Sesudah dijadikan Daya Tarik Wisata

No.	Nilai Menurut Liang Gie	Sebelum dijadikan Daya Tarik Wisata	Setelah dijadikan Daya Tarik Wisata
1.	Nilai Ekonomi (adanya aspek harga pasar)	Tidak Ada	Ada (dalam bentuk <i>postcard</i>)
2.	Nilai Jasmani (adanya aspek kesehatan badan)	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Nilai Hiburan (adanya aspek permintaan dan waktu luang)	Tidak Ada	Ada (dikemas dalam bentuk <i>package tour</i>)
4.	Nilai Sosial (adanya aspek hubungan antar manusia)	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Nilai Watak (adanya aspek kepribadian)	Tidak Ada	Tidak Ada
6.	Nilai Estetis (adanya aspek keindahan)	Tidak Ada	Ada (tergantung pada penilaian wisatawan)
7.	Nilai Intelektual (adanya aspek pengetahuan)	Tidak Ada	Tidak Ada
8.	Nilai Religius (adanya aspek ilahiah)	Ada (dilakukan oleh petani terkait proses pengolahan sawah)	Ada (dilakukan oleh petani, dan upacara yang menyertai menjadi daya tarik wisata)

Uraian di atas memperlihatkan bahwa terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih semula dibuat dengan fungsi untuk sistem pengairan sawah, sehingga nilai estetis tidak ada. Terasering dibuat semata-mata agar air dapat dengan lancar mengalir dari sawah yang ada di permukaan tinggi ke sawah yang ada dibawahnya. Kalaupun terasering sawah dibuat berkelok-kelok, itu karena mengikuti *landscape* tanah. Terasering juga dibuat lurus namun tetap berundak-undak. Nilai ekonomis dan nilai hiburan tidak tampil, namun dalam proses pembuatannya disertai dengan ritual. Namun setelah terasering tersebut dijadikan daya tarik wisata, terdapat beberapa nilai yang porsinya semakin menonjol, seperti nilai ekonomis, nilai hiburan, nilai estetis dan nilai religius. Sementara itu nilai watak semakin menurun, hal ini antara lain karena adanya perubahan pada komponen-komponen dari terasering, seperti jembatan kecil (bahasa Balinya: *titi*) yang menghubungkan antara satu *pundukan* ke *pundukan* yang lain, dulu dibuat dari kayu seadanya yang ada di desa setempat, sekarang dengan dijadikan daya tarik wisata, semata-mata karena alasan keamanan untuk wisatawan, *titi* tersebut diganti dengan jembatan dari beton.

Terkait dengan kebudayaan yang menyimpulkan bahwa terasering sawah sebagai sebuah “produk budaya”, maka terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih belum mengalami *art by metamorphosis*, karena terasering tersebut meskipun sudah menjadi daya tarik wisata, namun masih tetap berfungsi untuk memperlancar pengairan sawah. Terasering sawah akan berperan sebagai *art by metamorphosis* manakala terasering sawah tersebut sudah tidak lagi berfungsi mengalirkan air, dan hanya dijadikan pajangan serta ditonton keindahannya (baik lekukan teraseringnya maupun kesimetrisan undak-undaknya yang merupakan cerminan *collective style*). Dengan demikian pendekatan fungsi menjadi kunci dari terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih, apakah dapat digolongkan *art by metamorphosis* atau tidak.

Selain adanya terasering sawah, dalam rangka memacu perkembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992 merekomendasikan untuk menjadikan desa ini sebagai Desa Wisata Terpadu (DWT). Untuk mendukung rekomendasi tersebut, pemerintah telah membangun sebuah rumah tradisional yang bernuansa arsitektur Bali sebagai sebuah rumah contoh. Rumah contoh tersebut dibangun di areal pekarangan seorang Kepala Desa. Pembangunan rumah contoh lebih bernuansa

politis, karena dibangun pada areal pekarangan seorang pejabat struktural dalam lingkup pemerintahan. Akibatnya, rumah contoh tersebut terbengkelai (*neglected arts*), di samping karena letaknya tidak strategis, juga karena adanya buntut dari resistensi sebagian masyarakat terhadap program DWT ini. Resistensi ini timbul karena *desa adat* Jatiluwih yang semula direncanakan untuk mengelola DWT Jatiluwih, ternyata dalam pelaksanaannya DWT Jatiluwih dikelola oleh *desa dinas* melalui Kepala Desa setempat sebagaimana yang diatur oleh Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2005. Keterpaduan antara *desa adat* Jatiluwih dengan *desa dinas* tidak tercipta, sehingga program pengembangan DWT di Desa Jatiluwih tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dengan mengacu pada fenomena kontemporer, Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2005 tersebut merupakan suatu bentuk hegemoni terhadap masyarakat Desa Wisata Jatiluwih.

Terkait dengan fenomena untuk menjadikan terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia, hal ini akan sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mempertahankan aktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kaitan warisan budaya dunia itu, perlu dilakukan konservasi terhadap terasering tersebut. Dalam kaitan konservasi inilah, Adrian Philips (Direktur Komisi Pedesaan Inggris) mengatakan bahwa kepariwisataan menyediakan konservasi dengan pembenaran secara ekonomi, kepariwisataan adalah satu cara untuk menunjang pembangunan konservasi, dan kepariwisataan dapat membawa sumber-sumber daya untuk konservasi.

Dari pernyataan Direktur Komisi Pedesaan Inggris di atas, jika dikaitkan dengan terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia dan daya tarik wisata, terlihat bahwa pariwisata akan mampu menunjang secara ekonomi untuk membiayai konservasi terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih jika sudah menjadi warisan budaya dunia melalui pendapatan yang diperoleh dari kunjungan wisatawan. Namun demikian, patut dicatat bahwa pariwisata juga memiliki sisi destruktif (merusak) jika aktivitas tidak dikendalikan. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh UNESCO bahwa antara tahun 1972 sampai tahun 1980, masyarakat seluas-luasnya dapat mengunjungi setiap situs-situs warisan dunia. Akibatnya, banyak diantara situs-situs warisan dunia itu tidak mampu menahan tekanan (Boniface, 1999:34). Apa yang dikemukakan oleh

UNESCO ini sebenarnya mengarah kepada daya tampung (*carrying capacity*), yang tidak boleh melampaui kemampuan menampung pengunjung.

Dengan demikian, agar masyarakat Desa Wisata Jatiluwih tetap dapat hidup bertani, terasering sawahnya dapat menjadi warisan budaya dunia dan tetap dapat menikmati hasil dari pariwisata tanpa komodifikasi yang berlebihan, maka peranan DWT akan sangat membantu mengatasi sekaligus mendukung kedua fenomena di atas, karena: [1] DWT akan lebih mengutamakan wisatawan individual (kalaupun *group* dalam jumlah terbatas, dan bukan *mass tourism*), sehingga *carrying capacity* dapat terjaga, [2] DWT akan mencegah komodifikasi yang berlebihan, karena DWT akan lebih banyak memasarkan produk lokal/desa setempat, [3] aktivitas pertanian tradisional (seperti membajak dengan sapi pakai *tenggala*, meratakan tanah bajakan dengan *lampit*, *metekap*, memanen padi oleh para wanita desa dengan ketam atau anggapan, dll) akan dapat berjalan seiring dengan aktivitas tersebut dijadikan daya tarik wisata, [4] secara langsung dan tidak langsung DWT akan membuka lapangan kerja di desa sehingga mencegah alih fungsi pertanian menjadi tempat industri berskala besar di pedesaan. Oleh karena itu, keselarasan hubungan antara *desa adat* dengan *desa dinas* dalam rangka pengembangan DWT perlu diciptakan dan dipelihara, termasuk menciptakan keharmonisan di antara pemangku kepentingan (*stakeholders*).

F. PENUTUP

Fenomena yang pernah berkembang di Desa Wisata Jatiluwih, yaitu *pertama*, terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih dijadikan warisan budaya dunia (*world culture heritage*), dan *kedua*, masyarakat Desa Wisata Jatiluwih lebih tertarik pada pertanian atau mempertahankan budaya agraris dengan sistem pertanian tradisional dan tidak tertarik masuk kepada industrialisasi dalam pariwisata. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Penunjukan Kepala Desa Jatiluwih sebagai Pengelola dan Petugas Pungut Retribusi Parkir pada Daya Tarik Wisata Jatiluwih merupakan bentuk hegemoni kepada masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, karena surat keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip pengembangan Jatiluwih sebagai Desa Wisata Terpadu (DWT) yang berprinsip *community based tourism*. Dari konteks budaya, terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih merupakan cerminan produk budaya

khususnya dari sistem mata pencaharian yang bernilai estetis. Dari pendekatan bentuk, terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih memiliki nilai estetis yang tinggi dan menganut *collective style*, sehingga saat ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berwisata ke Desa Wisata Jatiluwih. Dari pendekatan fungsi, tidak terjadi perubahan sebelum dan sesudah terasering sawah Desa Wisata Jatiluwih dijadikan destinasi wisata. Dari pendekatan makna, ada pergeseran. Sebelum dijadikan daya tarik wisata, makna terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih adalah: cerminan estetis, adanya kesadaran kolektif, adanya persatuan dan kesatuan, cerminan kepribadian, pemahaman terhadap *trihita karana*, cerminan etos kerja dan *local culture*. Setelah dijadikan daya tarik wisata maknanya adalah: cerminan estetis (akan semakin tinggi), adanya pemerksaan terhadap lingkungan, dan ada pengaruh budaya global.

Jika dilihat dari nilai estetis menurut Liang Gie, setelah terasering sawah dijadikan daya tarik wisata akan terjadi: nilai ekonomi semakin berkembang dan bisa menjadi dominan, eksploitasi yang berlebihan terhadap terasering sawah antara lain dengan memanfaatkan terasering sawah sebagai pusat aktivitas dan hiburan bagi wisatawan selama berwisata, interaksi masyarakat Desa Wisata Jatiluwih akan bertambah terutama secara nasional dan internasional, aspek kepribadian petani dan masyarakat pada terasering akan semakin memudar hanya karena usaha membuat produk yang *customer oriented*, eksploitasi yang berlebihan terhadap terasering sawah yang bisa berdampak kepada tampilan estesisnya dan juga bisa memperkosa alam, dan kekhawatiran utama adalah bisa mengakibatkan memudarnya nilai-nilai religius pada aktivitas yang dilaksanakan di terasering sawah tersebut.

Terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih sebagai produk budaya belum mengalami *art by metamorphosis*, karena terasering sawah tersebut masih berfungsi untuk sarana pengairan sawah meskipun menjadi daya tarik wisata. Karena adanya resistensi sebagian masyarakat setempat terhadap pengembangan Desa Wisata Terpadu (DWT) di Desa Jatiluwih, maka rumah tradisional yang berarsitektur Bali yang awalnya diharapkan berfungsi sebagai rumah contoh dan akomodasi bagi wisatawan akhirnya menjadi *neglected art*. DWT Jatiluwih merupakan salah satu solusi bagi masyarakat setempat jika tetap ingin hidup bertani, terasering sawahnya bisa menjadi *world culture heritage*, bisa menikmati hasil dari pariwisata tanpa komodifikasi.

3

TANTANGAN KEARIFAN LOKAL DI ERA GLOBALISASI DALAM PARIWISATA

A. PENGANTAR

90

Dalam era globalisasi ekonomi, informasi, dan kultural dewasa ini, budaya lokal mengalami kondisi tarik menarik atau ‘tegangan’ (*tension*) dalam kaitan dengan berbagai pengaruh akibat globalisasi. Di satu sisi, globalisasi dapat membawa kemajuan bagi tumbuh dan berkembangnya budaya lokal, namun pada sisi yang lain globalisasi dapat mengancam keberlanjutan budaya lokal yang merupakan potensi budaya atau kearifan lokal (Poespowardojo, 1989).

Kondisi seperti di atas juga dapat terjadi pada kearifan lokal yang ada pada beberapa daerah di Indonesia termasuk di Bali. Kearifan lokal Bali yang berbasis sistem nilai, berfungsi sebagai tumpuan ketahanan dan keberdayaan manusia dan masyarakat Bali dalam menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan ke depan. Namun dalam fungsi yang begitu strategis ini, sangat disayangkan kearifan lokal yang sebagian hidup sebagai ‘budaya lisan’ kurang diketahui, kurang dihayati, dan kurang dipercaya karena lemahnya sosialisasi dan edukasi secara lintas generasi. Apalagi di masyarakat berkembang paradoks antara kearifan lokal dengan modus-modus baru kurang bersinergi sebagai akibat terbatasnya pengkajian, penulisan dan pendidikan secara efektif, padahal berbagai kearifan lokal potensial bagi pembangunan *character building* manusia Indonesia (Swari Griya dan Wayan Griya, 2003).

143

Atas dasar uraian tersebut di atas, tulisan ini akan mencoba membedah kearifan lokal dari perspektif kajian budaya, jenis kearifan lokal Bali, implikasi kearifan lokal dalam bidang pariwisata serta solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh kearifan lokal Bali di era globalisasi. Adapun uraiannya sebagai berikut.

B. KEARIFAN LOKAL BALI: PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA

Kajian Budaya (*cultural studies*) merupakan bidang keilmuan yang interdisipliner, mencoba menunjukkan dan merekonsiliasikan pembagian pengetahuan

untuk mengatasi keterpisahan antara bentuk-bentuk *tacit knowledge* (pengetahuan intuitif yang didasarkan budaya-budaya lokal) dan *object knowledge* (pengetahuan universal) (Mariyah, 2006). Interdisipliner atau transdisipliner menurut Kleden (1987:110) adalah sebuah prosedur dialektis, artinya adanya pertarungan pendapat dan tukar menukar argumen, muncul pengertian yang lebih jernih dan terlihat pendapat yang lebih beralasan (yang sangat diperlukan secara ilmiah).

Potensi budaya lokal menurut Pilliang (2006) bisa digali, dilestarikan, dan dikembangkan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan yang bersifat desentralisasi yang ingin mengembangkan masyarakat daerah sesuai dengan potensi dan konteks sosial budaya setempat serta prinsip multikulturalisme. Menurut Saifuddin (2005:364) multikulturalisme muncul sebagai reaksi internal suatu bangsa terhadap proses anti integrasi dalam dirinya yang antara lain merupakan akibat pengaruh eksternal global, yakni arus gerakan demokrasi dan hak asasi manusia global yang sering kali lintas bangsa dan tidak mempertimbangkan integrasi internal suatu bangsa.

Secara konseptual, kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*) merupakan bagian dari kebudayaan. Kearifan lokal merupakan kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku yang melembaga secara tradisional mengelola sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya budaya untuk kelestarian sumberdaya tersebut bagi kelangsungan hidup berkelanjutan. Sedangkan keunggulan lokal adalah bagian dari kearifan lokal yang terseleksi, teruji dan sangat unggul dalam kualitas secara lokal serta universal, sehingga bukan saja berperan penting bagi pembentukan identitas dan kebanggaan, namun juga sangat potensial bagi pengembangan kemampuan kompetensi dan kompetisi secara lintas wilayah dan lintas budaya.

Kearifan lokal Bali sebagai bagian dari kebudayaan Bali jenisnya sangat beragam, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- (1) Berdasarkan fungsinya terkait dengan pelestarian sumberdaya, terdiri dari [a] kearifan lokal yang fungsional bagi konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, [b] kearifan lokal yang fungsional bagi pengembangan SDM, dan [c] kearifan lokal yang fungsional bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

- (2) Berdasarkan bentuknya terdiri dari [a] bentuk ritual atau upacara, [b] bentuk sastra, [c] bentuk nasihat dan petuah, [d] bentuk kepercayaan, [e] bentuk pantangan.
- (3) Berdasarkan makna, mencakup makna-makna berikut [a] makna religius, [b] makna sosial, [c] makna ekonomis, [d] makna etika dan moral, [e] makna politis.

Sementara itu nilai-nilai yang dijadikan acuan ada dua yaitu [1] nilai dasar yang terdiri dari nilai religius, nilai estetis, nilai sadenitas, nilai harmoni, nilai keseimbangan, nilai kebenaran, nilai iptek, nilai ekonomis, nilai kekuasaan dan nilai keadilan; dan [2] nilai instrumental yang dipengaruhi oleh variabel tempat, waktu dan situasi.

C. IMPLIKASI KEARIFAN LOKAL DALAM PARIWISATA

Aktivitas pariwisata merupakan salah satu bentuk konkrit dari gambaran tentang globalisasi. Dalam pariwisata terjadi berbagai aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu serta melibatkan manusia dari berbagai belahan dunia yang saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Dalam situasi seperti ini, proses akulturasi akan dapat timbul. Menurut Poespowardojo (1989:122) proses akulturasi dapat mendatangkan dominasi dan integrasi. Jika akulturasi mendatangkan dominasi kebudayaan asing, berarti memusnahkan *local genius* sebagai cerminan identitas budaya masyarakat setempat. Tetapi jika yang didatangkan adalah integrasi, maka masyarakat akan mampu menyerap unsur-unsur kebudayaan asing untuk memperkokoh budaya setempat, berarti juga menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat.

Terkait dengan proses akulturasi, masyarakat Bali lebih memilih mengintegrasikan kebudayaan asing ke dalam budaya lokal serta menjadikan budaya pariwisata sebagai bagian dari kebudayaan orang Bali, yang dikenal dengan *touristification*. Dengan demikian, mungkinkah *touristification* akan berdampak dengan kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan Bali, untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *a less extreme acculturation* yaitu unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli?. Untuk menjawab permasalahan ini, akan disajikan beberapa penelitian terhadap kebudayaan Bali yang terkait dengan *touristification*.

17
Internasionalisasi sebagai akibat perkembangan pariwisata khususnya terhadap pariwisata budaya yang dikembangkan di Bali membawa masyarakat lokal terjepit pada dua kutub, yaitu di satu sisi mereka wajib memelihara 'tradisi' yang merupakan aneka bentuk prinsip, konsep, pranata, tingkah laku, ekspresi, norma dan nilai-nilai yang telah didefinisikan di masa lalu secara kolektif dan diwariskan secara turun temurun (Pilliang, 2005), sementara pada sisi lain internasionalisasi melalui jaringan pariwisata berarti membenturkan kebudayaan lokal dengan dunia modern. Ini memberi peluang bagi hanyutnya budaya lokal dalam derasnya budaya global (Williams, 1995; Crick, 1989; Francillon, 1977; Picard, 1996). Sementara itu Bagus (1989:106) mengemukakan bahwa turistifikasi akan dapat mengubah inti kebudayaan Bali, pendangkalan terhadap kualitas kebudayaan, serta hilangnya bentuk-bentuk sosial yang telah terbukti mampu menopang integritas masyarakat Bali. Lebih lanjut (Lansing, 1974) berpendapat bahwa dampak kepariwisataan di Bali bersifat adaptif dan bukan substitutif, artinya dampak tersebut tidak menyebabkan transformasi secara struktural melainkan terintegrasi dalam kehidupan tradisional masyarakat.

Dalam kenyataannya, meskipun budaya pariwisata sudah dijadikan sebagai kebudayaan orang Bali, namun identitas masyarakat Bali masih tetap dan kekhawatiran akan bercerai berainya identitas orang Bali sepenuhnya tidaklah benar. Malahan pembangunan pariwisata telah menyebabkan proses *destructuring and restructuring* yang pada akhirnya akan memperkuat identitas budaya orang Bali. Lanfant (1995:37) menulis sebagai berikut “ ... *societies have now discovered in the international tourism a means of survival and even advancement. Tradition has been re-evaluated, integrated into the mechanisms of economic production and incorporated into the cultural systems of modern society*”.

Namun satu hal yang perlu dicatat, bahwa *touristification* hendaknya tidak memasukkan dampak negatif ke dalam kebudayaan Bali, serta harus berjalan searah, selaras dengan kearifan lokal dan bila mungkin memperkuat dan memperkaya khasanah kearifan lokal yang merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam konteks aktivitas di bidang pariwisata, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

140
(1) Mengingat Bali mengembangkan pariwisata budaya dengan harapan semua masyarakat Bali dapat disejahterakan dengan keterlibatan mereka di bidang

pariwisata (baik secara langsung maupun tidak langsung), maka kepada para *stakeholders* pariwisata (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) agar menjaga salah satu nilai-nilai dasar kearifan lokal yaitu 'keseimbangan' yang berupa keseimbangan pengembangan pariwisata dengan *trihita karana*.

- (2) Eksploitasi yang berlebihan dari sumber daya budaya yang berpotensi untuk pariwisata juga harus dicegah.
- (3) Tindakan memarginalisasi masyarakat dalam keikutsertaan mereka berpartisipasi di bidang pariwisata harus dicegah, karena hal ini bertentangan dengan nilai partisipasi yang merupakan salah satu nilai instrumental dari kearifan lokal.

Tiga hal di atas merupakan tantangan bagi kearifan lokal dalam bidang pariwisata di era internasionalisasi dan globalisasi akibat pariwisata.

D. SOLUSI

Untuk menjawab tantangan terhadap kearifan lokal sebagai akibat dari kegiatan pariwisata di era internasionalisasi dan globalisasi ini, maka solusi yang direkomendasikan adalah sebagai berikut.

(1) Melaksanakan pendidikan multikultural melalui kurikulum berbasis lokal.

Pendidikan multikultural bermakna "... pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan" (Azra, 2002:10). Tujuannya adalah untuk menanamkan tiga sub nilai yaitu [a] menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari, dan menilai warisan budaya seseorang; [b] menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang (dan dari) kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya; dan [c] menilai dan merasa senang dengan perbedaan-perbedaan itu sendiri. Perbedaan-perbedaan itu tidak saja dihargai, melainkan diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang dalam konteks kesederajatan (Blum, 2001; Tilaar, 2000; Dawam, 2003).

Sementara itu menurut Freire (1999) pendidikan multikultural harus dipraksiskan atau diaktualisasikan dalam bentuk karsa, kata, dan karya. Hal ini tentu sejalan dengan ajaran *trikaya parisudha* yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik.

Menurut Tilaar (2003:171) ada empat nilai inti atau *core values* dari pendidikan multikultural, yaitu [a] apresiasi pluralitas budaya, [b] tanggungjawab masyarakat dunia, [c] tanggungjawab terhadap planet bumi, dan [d] hakekat manusia serta Hak Azasi Manusia. Selain itu tujuan pendidikan multikultural adalah [1] mengembangkan perspektif sejarah yang beragam, [2] memperkuat kesadaran budaya, [3] memperkuat kompetensi interkultural, [4] membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai prasangka, [5] mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi, [6] mengembangkan ketrampilan aksi sosial.

Lebih lanjut James A. Banks (1994) menemukan beberapa tipologi dari sikap seseorang terhadap identitas etnik atau *cultural identity*, yaitu

[1] *Ethnic psychological captivity* yaitu sikap kefanatikan terhadap nilai-nilai budaya sendiri dan menganggap budaya lainnya inferior; [2] *Ethnic encapsulation* yaitu sikap yang menganggap budayanya sendiri yang paling baik dan paling tinggi dan biasanya curiga terhadap budaya kelompok-kelompok lain atau bangsa lain; [3] *Ethnic identifies clarification* yaitu sikap positif terhadap kelompok budayanya sendiri dan menunjukkan sikap menerima dan memberi jawaban positif kepada budaya-budaya lainnya, dengan terlebih dahulu mengetahui kelemahan budayanya sendiri; [4] *The ethnicity* yaitu sikap yang menyenangkan terhadap bentuk-bentuk budaya lain yang datang dari kelompok etnis atau budaya lainnya seperti budayanya sendiri; [5] *Multi ethnicity* yaitu sikap yang mendalam dalam menghayati jenis-jenis kebudayaan lain di lingkungan masyarakat bangsanya; [6] *Globalism* yaitu telah dapat menerima dan bergaul di berbagai jenis budaya dan bangsa lain secara internasional dan telah mengembangkan keseimbangan keterikatan terhadap budaya bangsa dan budaya global.

Terkait dengan tantangan tentang keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan implementasi *trihita karana* serta eksploitasi sumber daya budaya yang berlebihan, maka dengan pendidikan multikultural tantangan tersebut diharapkan akan dapat diatasi. Hal tersebut karena tujuan dan nilai dasar pendidikan multikultural adalah tanggungjawab dan kesadaran atas kepemilikan planet bumi. Ini berarti pemanfaatannya (apapun bentuknya) perlu memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan, dengan implementasi sesuai dengan budaya lokal masing-masing daerah. Dalam operasionalisasinya akan tercermin pada kandungan atau muatan lokal kurikulum

pendidikan multikultural. Untuk Provinsi Bali, hal ini sudah terus menerus digaungkan yaitu dengan mengimplementasikan kearifan lokal berupa *trihita karana* dalam berbagai aspek kehidupan manusia Bali. Terkait dengan tantangan untuk mencegah terjadinya marginalisasi dalam partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata, maka konsep partisipasi yang berorientasi pada *desa, kala, patra* telah diupayakan dengan tetap berorientasi pada kemampuan atau keahlian masing-masing.

(2) Inventarisasi berbagai kearifan lokal yang ada di Bali

Hasil inventarisasi berbagai kearifan lokal Bali, selanjutnya dianalisis untuk diberikan masukan tentang hal-hal yang masih relevan untuk dipraksiskan dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. Hasil analisis selanjutnya dipublikasikan secara tertulis, sehingga tulisan yang merupakan hasil analisis dari kearifan lokal ini dapat menjadi salah satu media edukasi dari generasi dahulu ke generasi sekarang serta dari generas sekarang kepada generasi yang akan datang.

PARIWISATA DALAM MASYARAKAT KAPITALIS

A. PENGANTAR

Kajian pariwisata dalam masyarakat kapitalis lebih ditekankan pada hubungan antara politik dan pariwisata, terutama dari segi bagaimana pariwisata dapat merubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu destinasi wisata dan sebaliknya. Pola-pola pariwisata dan proses-prosesnya merupakan jawaban atas nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Meskipun perkembangan pariwisata menarik dari sisi ilmu sosial, namun sebagian kajian pariwisata hanya terfokus untuk mengkaji pariwisata dari sisi ekonomi dan pasar (*market*) saja, dengan peran utama berupa kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh pariwisata.

Dari fokus kajian pariwisata yang hanya berpusat pada sisi ekonomi dan *market* tersebut, terlihat bahwa pendekatan yang dipergunakan cenderung merupakan pendekatan ekonomi yang sempit, bersifat fungsionalisasi dan de-kontekstualisasi (Roche, 1992). Contohnya, ketika sebuah kajian memasukkan pertimbangan dampak ekonomi kotor maupun bersih dalam permintaan dan penawaran produk pariwisata, permasalahan mengenai pemerataan tenaga kerja yang ada dan pendapatan serta waktu luang di destinasi wisata dan daerah-daerah lainnya yang sedang berkembang tidak banyak dibicarakan. Ini berarti permasalahan tentang “siapa mendapatkan apa”, “dimana”, “mengapa”, dan “bagaimana” tetap tidak akan terpecahkan. Semua bentuk pengembangan pariwisata melibatkan dominasi atas serangkaian nilai-nilai dan sejumlah nilai-nilai alternatif melalui pelaksanaan kekuasaan. Craik (1991:321) berpendapat bahwa hubungan antara tuan rumah dan pengunjung dalam pariwisata hanya dapat dimengerti dalam konteks hubungan internasional antara negara-negara berkembang dan negara-negara barat yang makmur. Dengan demikian, kebijakan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat pariwisata itu berlangsung.

Simmons dan Dvorin (1977) menyatakan bahwa analisis kebijakan khusus mengenai lingkungan akan berkisar tentang pengidentifikasian komponen-komponen keadaan dan ciri-ciri dinamis dari suatu lingkungan, khususnya lingkungan yang terkait

dengan kebijakan tersebut. Lebih lanjut Majone (1989) dalam Hall (1994:138) menyatakan bahwa suatu masalah sederhana tidak dapat dipecahkan dengan hanya menawarkan solusi teoritis yang tidak mempertimbangkan batasan-batasan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, akan sangat keliru bila mempergunakan standar ideal dalam menilai alat-alat kebijakan, karena standar tersebut harus berkaitan dengan lingkungan khusus tempat alat-alat kebijakan tersebut digunakan. Dengan demikian, lingkungan tempat kebijakan umum dibuat harus mencakup nilai-nilai, norma-norma, pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi serta pertimbangan-pertimbangan teknis yang sesuai dengan kriteria dalam memilih kebijakan yang akan dijalankan sehingga ada kejelasan dalam operasionalisasinya.

Britton (1991) menempatkan kritik sosial pada pariwisata dalam kerangka masyarakat kapitalis, di samping itu Urry (1990:23) menyatakan bahwa konsumsi jasa pariwisata tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan sosial yang terkait didalamnya. Oleh karenanya, pertimbangan faktor politik dalam aktivitas kepariwisataan terutama dalam pemanfaatan waktu senggang (*leisure time*) bukan semata-mata hasil dari kekuasaan ekonomi dan sosial, melainkan juga sebagai hasil dari perjuangan politik.

Pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik yang sangat terpengaruh oleh waktu dan ruang. Ketika kapitalis mengalami perubahan bentuk dan strukturnya, pariwisata juga mengalami perubahan bentuk dan struktur dalam jumlah yang besar. Dengan demikian berarti bahwa memahami pariwisata tidak dapat terlepas dari pemahaman tentang kapitalis. Roche (1992) menyebutkan pariwisata massal (*mass tourism*) merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan industri kapitalis modern dan fenomena sosiokultural. Industri kapitalisme bangsa barat telah mengalami perubahan struktur yang sangat tajam sekitar tahun 1980-an dengan adanya pergeseran-pergeseran dari regional, nasional dan internasional dalam kesempatan meningkatkan modal dan kesempatan kerja. Dalam pergeseran tersebut, pariwisata merupakan suatu komponen yang penting dan dianggap sebagai “postindustrialisme” atau “postfordisme”.

Pariwisata adalah bagian dari globalisasi ekonomi internasional, mandiri dan berjangkauan luas dengan ketergantungan yang semakin berkurang terhadap negara sebagai satuan organisasi ekonomi internasional. Dengan adanya perubahan ekonomi yang sangat dramatis itu berpengaruh pada budaya yang mengarah pada perpecahan (*fragmentasi*),

citra, bentuk pertunjukan, kekuasaan pasar dan pandangan wisatawan berpengaruh besar terhadap pengalaman wisatawan dalam berwisata.

Waktu senggang (*leisure time*) tidak hanya sekedar waktu bebas dari pekerjaan rutin, tetapi sudah merupakan suatu komoditi. Dalam masyarakat kapitalis, waktu senggang masyarakat dibentuk secara langsung dengan apa yang ditawarkan oleh “industri budaya”. Dalam kondisi seperti ini, negara melihat sebagai upaya penyesuaian dan pemberian dukungan kepada industri budaya agar masyarakat merasakan kesan dari tindakan-tindakan politiknya (Wilson, 1990). Ideologi yang dibentuk adalah hanya akan melegitimasi hubungan antara industri kebudayaan dengan ideologi yang dominan. Pada akhirnya, ideologi semacam ini membantu mengabadikan bahwa bersenang-senang dan dihibur benar-benar merupakan kemurahan hati dari akibat-akibat politiknya.

Dalam *the three player* atau *the three actor* industri pariwisata, akan tampil negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan pasar (*market*). Berbicara masalah pasar berarti juga berbicara konsumen dalam hal ini wisatawan. Dalam konteks politik pariwisata, ideologi mengenai “kekuasaan konsumen” juga mendorong serta menghargai atas pilihan *leisure time* sebagai kebebasan perseorangan. Dalam kaitan pemahaman politik yang dikaitkan dengan adanya dominasi dan pengawasan, seharusnya politik pariwisata dijauhkan dari modal yang terkait dengan *leisure time*. Seharusnya pula para birokrat mengarahkan pada pemanfaatan *leisure time* pada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik.

Selain *leisure time*, salah satu aspek penting yang terjadi sekarang ini adalah dijadikannya berbagai tempat sebagai komoditi pariwisata yang berupa destinasi wisata. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pemikiran tentang globalisasi pasar pariwisata sebagai akibat kapitalisasi dan komodifikasi. Sistem produksi pariwisata secara bersama-sama “menjual” tempat-tempat untuk menarik wisatawan, sarana-sarana pariwisata dibuat untuk melengkapi promosi penjualan yang dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang berkualitas kepada wisatawan. Ini berarti bahwa suatu tempat dibuat menjadi sebuah komoditi dan dirubah menjadi suatu pengalaman dan citra untuk dinikmati dan dikonsumsi oleh wisatawan.

Pembuatan tempat peristirahatan (*stop over*) pada lokasi-lokasi tertentu pada jalur wisata yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain dapat mempertahankan dan

mengkonsolidasikan hubungan-hubungan produksi yang ada. Perbedaan itu akan mencerminkan hierarki dari lingkup liburan dan kelas-kelas sosial. Menurut Clarke (1981:54) perbedaan kelas dapat digolongkan secara tidak sejajar satu dengan lainnya, dalam hal produksi, kekayaan dan kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan pertentangan satu dengan lainnya dalam hal dominasi dan sub-ordinasi. Oleh karenanya, dalam politik pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek yang mencakup lingkungan publik, tetapi juga lingkungan yang berada di luar lingkungan publik. Jika kondisi ini terjadi, akan dapat mengabaikan dampak yang lebih luas dari proses restrukturisasi dan akumulasi teritorial dalam kapitalis gaya baru.

Salah satu indikasi dari sisi demografi yang terkait dengan perkembangan pariwisata adalah timbulnya kawasan urbanisasi di sekitar destinasi wisata. Kawasan urbanisasi memposisikan dirinya sebagai pusat konsumsi dalam sistem kapitalis yang terus mendunia. Penciptaan ciri khas dengan memanfaatkan modal budaya menjadi dasar untuk menciptakan atau menghidupkan kembali tonggak investasi regional dan internasional. Atas dasar penciptaan yang memiliki ciri khas tersebut, maka produk pariwisata dapat dijadikan elemen penting dalam rangka politik pariwisata. Karena politik itu tidak jauh dari kekuasaan, “siapa memperoleh apa”, “dimana”, “bagaimana” dan “mengapa”, maka sudah tepat jika pariwisata diidentikkan dengan masyarakat kapitalis.

B. POLITIK PARIWISATA

Kajian yang berdimensi politik pariwisata cenderung bersifat insidental dengan pertimbangan sosial, ekonomi atau lingkungan sebagai fokusnya. Bahkan jika dikaitkan dengan kebijakan pariwisata, seharusnya penelitian dengan dimensi politik pariwisata lebih mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan, dan bukan apa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa dalam berbagai kajian pariwisata, hubungan antara politik dan pariwisata dapat terjadi pada level internasional, nasional, regional, lokal dan pada tingkatan perorangan. Tiap-tiap tingkatan tersebut akan menggambarkan kedinamisan struktur dan kedinamisan analisis dari penelitian tersebut. Jika dalam analisis tersebut dimasukkan sistem kapitalisme yang tengah berlangsung, maka penelitian pariwisata akan dapat menggambarkan makna sosial dan materialitas

ruang dan tempat yang diciptakan pada praktek pariwisata itu sendiri. Penggambaran tersebut menurut Britton (1991:478) dapat dimasukkan dalam “proses akumulasi”. Jika dikaitkan dengan fenomena pariwisata khususnya waktu senggang (*leisure time*), maka fenomena tersebut terkait dengan perjuangan untuk mengontrol waktu dan ruang yang melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Untuk mengungkap “proses akumulasi” yang berupa susunan hubungan antara masyarakat dan tempat dalam pariwisata, membutuhkan suatu teori yang secara lugas mengetahui dan mengungkap pariwisata sebagai aktivitas kapitalis yang terorganisasi oleh sistem dinamika sosial tersebut, dengan menghubungkan produksi, sosial dan ideologinya. Sebuah analisis tentang bagaimana sistem produksi pariwisata memasarkan dan mengemas masyarakat, merupakan suatu pelajaran dalam ekonomi politik dan susunan realitas sosial dan tempat struktur sosial, baik dari sudut pandang pengunjung dan masyarakat yang menjadi tuan rumah, modal pariwisata dan industri kebudayaan, atau negara dengan berbagai macam sistem yang terkait di dalamnya.

Kajian-kajian mengenai pariwisata juga berkisar pada pertentangan ideologi dan nilai-nilai. Sebagian besar kajian-kajian pariwisata khususnya yang terkait dengan analisa kebijakan terjebak pada praduga yang bernuansa intelektual mengenai pengambilan keputusan, yang lebih menekankan pada “mengetahui bahwa” dan bukannya “mengetahui bagaimana” serta terabaikannya aspek-aspek seni dalam analisa kebijakan. Hampir semua kajian pariwisata menganggap pokok permasalahannya sebagai pendekatan yang bebas nilai (*value free*).

Pariwisata merupakan elemen utama dari beberapa masalah utama di bidang ekonomi pada era politik sekarang ini. Contohnya adalah internasionalisasi modal, restrukturisasi regional dan nasional, pembangunan kota dan pertumbuhan ekonomi. Pemahaman ekonomi secara politik kritis dengan beberapa pengecualiannya (penelitian Urry, 1990a) hampir selalu terabaikan. Sebagai contoh dalam membahas politik pariwisata berkelanjutan, fokus utamanya cenderung pada masalah ekologi dan proses-proses ekonomi, sedangkan kerangka kerja politik dan budaya tidak mendapat perhatian.

Dalam mempelajari politik pariwisata, perlu mengetahui teori politik dan nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik secara secara eksplisit dan implisit. Karena dalam menganalisis menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang

berbeda, maka para pengkaji politik pariwisata cenderung mempergunakan pendekatan teoritis untuk menyerang masalah-masalah kebijakan.

Dalam kajian politik pariwisata juga diadopsi pendekatan dialektikal, dengan titik tolaknya adalah pandangan-pandangan yang ada pada masyarakat. Kesimpulannya adalah, bukan bukti-bukti formal, melainkan saling pengertian dari masalah-masalah yang dibahas. Namun demikian, beberapa penelitian pariwisata gagal menjelaskan pariwisata sebagai fenomena sosial yang kompleks.

Politik pariwisata yang bertujuan menganalisis kebijakan biasanya dimulai dengan premis posibilitas, dengan sudut pandang yang dapat diperdebatkan dan terus berubah, bukannya prinsip-prinsip yang mutlak dan fakta-fakta yang kaku. Analisa kebijakan bukannya menghasilkan bukti-bukti formal tetapi hanya argumentasi yang bersifat meyakinkan. Analisa kebijakan membantu pertimbangan-pertimbangan umum melalui kritik, nasihat dan pendidikan. Analisis kebijakan juga memberikan standar argumentasi dan struktur ilmiah bagi wacana publik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang penyusunan kebijakan serta interaksi elemen-elemen dalam lingkungan kebijakan adalah mutlak diketahui jika ada kemauan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pariwisata, pengembangan pariwisata dan manajemen sumber daya pariwisata.

C. POLITIK PARIWISATA: CULTURAL STUDIES SEBAGAI PISAU BEDAH

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan (*growth*) dengan mengandalkan modal dari kaum kapitalis dan apalagi menempatkan pariwisata dalam konteks kapitalisme akan banyak berhadapan pada apa yang dinamakan dominasi, yang dalam hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat tempat pariwisata itu dikembangkan atau juga pada daerah tempat pengembangan pariwisata itu dilaksanakan. Adapun sumber dominasi yang melanda masyarakat dan daerah tersebut dapat berasal dari [1] pemerintah melalui kebijakan yang dihasilkan yang terkait dengan pariwisata, dan [2] dari kapitalis melalui modal yang ditanamkan dengan tujuan mengeruk sebanyak mungkin sumber daya alam dan potensi sumber daya budaya yang ada di daerah itu. Akibatnya, masyarakat yang merupakan salah satu representasi dari *civil society* akan didesak oleh dua kekuatan politik yaitu negara (*state*) dengan kebijakannya dan kepentingan-kepentingan pasar (*market*) yang dibawa oleh kapitalis. Jika kondisi ini

tidak diatasi, masyarakat dan pariwisata akan tergerus oleh dinamika politik yang berkembang. Menurut Kitab Skanda Purana XVII.1 (Vettam Mani, 1989) dalam Titib (2006:138) menyebutkan bahwa pusat-pusat pertengkarannya yang menghancurkan kehidupan manusia, yaitu pada kekuasaan (politik), minuman keras, perjudian, pelacuran, dan harta benda serta kekayaan.

Untuk mencegah kehancuran pariwisata sebagai akibat tekanan politik dari *state* dan *market* itu, maka kajian-kajian akademis yang berperspektif politik dari pariwisata sangat diperlukan terutama bagaimana mengatasi dominasi *state* dalam pembuatan kebijakan pariwisata. Selain itu Agger (2005:362-363) menyebutkan bahwa kerja akademik yang berperspektif tertentu akan dapat menunjukkan bagaimana dominasi beroperasi dan bagaimana dominasi dapat dilawan dan diatasi dari hidup sehari-hari manusia maupun dari atas, oleh politisi dan pembuat kebijakan. Jika penyebabnya sudah diketahui, dengan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada, niscaya kehancuran pariwisata akibat politik akan teratasi, tentunya didukung oleh hasil-hasil kajian yang *applicable* guna mengeleminir kekhawatiran Matthew et.al (1991:122) tentang minimnya kajian-kajian yang mengangkat kepentingan-kepentingan dibalik pengembangan pariwisata.

Dalam konteks situasi *postmodern*, Bauman (1992:196) dalam Ritzer (2005:277) menyatakan bahwa secara eksistensial dalam situasi *postmodern* kekuasaan dari negara-bangsa terkikis. Bukannya terjadi pemusatan negara, kekuasaan malah menyerah pada agen-agen lokal dan parsial yang menangani serangkaian kebijakan-kebijakan lokal dan parsial. Dalam aplikasinya di lapangan, memang beberapa urusan yang terkait dengan perkembangan dan operasionalisasi pariwisata sudah diserahkan oleh negara kepada para agen-agennya (pemerintah daerah), namun agen-agen tersebut bertindak sebagai kapitalis, sehingga apa yang diharapkan oleh kondisi *postmodern* yang melanda pariwisata tidak tercapai karena kelihatan diserahkan kepada agen, namun agen tersebut masih diatur oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara (*state*) itu sendiri. Jika ada perlawanan dari masyarakat dari daerah tempat pariwisata itu dikembangkan akibat kebijakan yang dinilai oleh masyarakat merugikan, negara akan mempergunakan salah satu bentuk dari politik *postmodern* yaitu politik kepastian (*politics of certainty*). Menurut Ritzer (2005:278) dalam politik kepastian selalu mencari penegasan fakta bahwa mereka

telah membuat pilihan-pilihan yang tepat. Oleh karena itu negara tidak akan mau dilawan begitu saja dari kebijakan pariwisata yang gulirkan, karena mereka sudah menganggap tepat pilihan dari kebijakan tersebut.

Menurut Meethan (2001) dalam Smith dan Robinson (2006:8), dalam kondisi politik kepastian yang dibuat oleh *state* melalui kebijakan pariwisatanya, masyarakat sebagai bagian dari *civil society* tidak akan begitu saja menerima pariwisata, mereka akan melakukan kontestasi dan resistensi. Dengan demikian *state* harus siap membuat beberapa alternatif kebijakan untuk satu masalah pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dikontestasi oleh pengambil kebijakan dalam suatu masyarakat yang lebih luas, dengan harapan masyarakat mau mengkaji dengan berbagai pertimbangannya sebelum menentukan pilihan. Dalam kondisi ini, masyarakat akan diperkaya dengan pengalaman demokrasi dalam menentukan pilihan alternatif kebijakan pariwisata. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak ada yang berkenan dengan kebutuhan masyarakat, maka resistensi akan timbul.

Dari berbagai hal yang terkait dengan politik pariwisata (mulai dari kekuasaan, dominasi, politik kepastian yang dijalankan pemerintah, kontestasi, resistensi seperti di uraikan di atas), dan secara khusus dari 226 (*Bali Tourism Statistics 2005:66*) tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi dalam berwisata (*places of interest*) di Bali, ternyata sebagian besar ada di pedesaan. Oleh karena itu menurut Ari Dwipayana dalam Putra (2004:xvii), pengertian politik yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Bali yang banyak memiliki *places of interest* di desa-desa adalah dengan mengartikan politik dari pengertian luas, artinya *desa adat* di Bali tidak terjebak dalam ranah politik, sehingga *desa adat* tidak bisa diperdaya untuk memproduksi kepentingan kelompok-kelompok dominan, melainkan mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Dalam kaitan proteksi *desa adat* terhadap berbagai dominasi yang diakibatkan oleh perkembangan pariwisata, maka tidak saja hanya cukup dengan membuat aturan atau *awig-awig*, tetapi perlu dibarengi dengan berbagai pemahaman tentang berbagai kepentingan yang ada dan dibawa oleh pariwisata, termasuk ideologi dibalik dikembangkannya pariwisata tersebut. Hal ini menjadi fokus perhatian, karena ideologi merupakan benteng pertahanan terakhir dan merupakan bagian dari politik identitas. Di

samping itu, pariwisata tidak perlu dipolitisasi, karena akan membawa kehancuran bagi masyarakat dan daerah tempat pariwisata tersebut dikembangkan.

Salah satu solusi yang diajukan untuk mencegah penyalahgunaan (*to abuse*) pengaruh kekuasaan dalam pariwisata adalah dengan menerapkan strategi manajemen publik dalam aktivitas kepariwisataan. Contohnya adalah menerapkan manajemen destinasi wisata yang berbasis masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan yang melindungi masyarakat dan sumber daya nasional, baik sumber daya alam maupun sumber daya budaya. Harapan ini sejalan dengan Elliott (1997:xii), bahwa pariwisata secara politik harus dapat melindungi alam dan masyarakat.

D. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa (1) pariwisata dapat merubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu destinasi wisata, yang berwujud dominasi sebagai pelaksanaan dari kekuasaan; (2) pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik yang sangat terpengaruhi oleh ruang dan waktu; (3) kajian politik pariwisata telah menampilkan *the three player* atau *the three actor* dengan komponennya yaitu negara (*state*), masyarakat (*civil society*) dan pasar (*market*). Komponen yang paling baru dimasukkan sebagai pemain dan aktor politik pariwisata dan sekaligus merupakan pengaruh sosiologi adalah pasar (*market*); (4) kapitalisasi dan komodifikasi muncul sebagai akibat globalisasi pasar pariwisata atau sebagai buah dari internasionalisasi pariwisata; (5) penempatan pariwisata dalam ruang kapitalis sebagai konsekuensi dari politik pariwisata akan berbicara tentang “siapa memperoleh apa”, “dimana diperoleh”, dan “bagaimana memperoleh”; (6) dalam mempelajari politik pariwisata perlu mengetahui teori politik dan nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik, baik secara eksplisit maupun implisit.

5

KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PARIWISATA

A. PENGANTAR

Perempuan selama ini sering diposisikan sebagai kaum marginal dalam berbagai bidang kehidupan. Posisi perempuan seperti itu juga dialami oleh perempuan pada masyarakat Bali, baik secara akademik maupun ekonomi dalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini tentu saja memerlukan penanggulangan agar pemahaman terhadap berbagai aspek tentang kehidupan perempuan menjadi lebih luas, mendalam dan menyeluruh. Pemahaman itu dapat dipakai sebagai acuan untuk memberdayakan perempuan ke arah suatu kemajuan yang berbasiskan pada kebutuhan nyata dan budaya pada sebuah masyarakat.

Kajian-kajian terhadap perempuan, dengan mengambil contoh perempuan Bali, sudah banyak dilakukan. Couteau (1994) mengkaji pemikiran tokoh perempuan Bali kontemporer yaitu Ida Ayu Agung Mas. Menurut Mas, secara ideal perempuan Bali setara dengan laki-laki. Namun dalam kenyataannya tidak demikian adanya, justru laki-laki yang lebih memiliki hak dan gerak perempuan sangat dibatasi, sehingga terjadi ketimpangan gender. Salah satu prinsip yang digunakan untuk mendukung ketimpangan gender tersebut adalah sistem *purusa*, dan hal itu harus dilihat dari kaca mata budaya. Namun demikian, menurut Mas dalam kajian Couteau itu, disebutkan bahwa kebebasan yang masih dimiliki oleh perempuan Bali adalah pada pilihan-pilihan seksualnya. Selain itu kajian yang dilakukan Suryani (2003) telah memposisikan perempuan Bali pada dua konteks, yaitu konteks biologis dan konteks modernisasi, sehingga dihasilkan konstruksi formatif perempuan Bali yang berkarakter Bali. Terkait dengan sistem *purusa* di atas, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dwyer (2000), bahwa cerita rakyat Bali yang berjudul *Men Brayut* mengandung suatu ideologi *purusa* termasuk juga dalam cerita rakyat Bali yang berjudul *Tuang Kuning* juga terkandung ideologi *purusa* (Artika, 2006).

B. GENDER DAN KETIDAKADILAN

Terkait dengan upaya menciptakan pemahaman tentang gender, maka analisis aktivitas berperspektif gender khususnya terhadap perempuan dalam kepariwisataan tidak saja penting tetapi juga amat diperlukan, baik dilihat dari segi akademik maupun dilihat dari kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia. ¹³⁷ Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam melakukan analisis aktivitas berperspektif gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*). Hal ini menurut Fakih (1996:5-6) disebabkan oleh: *pertama*, karena mempertanyakan status perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, bahkan mempertanyakan posisi perempuan pada dasarnya berarti menggoncang struktur dan sistem *status quo* ketidakadilan tertua dalam masyarakat; *kedua*, dengan membahas masalah gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi dan menggugat *privilege* yang dimiliki selama ini. Selain itu menurut Abdullah (2006:6) perbedaan status, kelas, usia, gender, dan berbagai parameter lain menjadi relevan untuk diperhatikan sehingga makna kebudayaan menjadi sesuatu yang batas-batasnya tidak tegas tergantung pada posisi struktural masing-masing orang atau kelompok. Namun demikian dalam menciptakan rasa keadilan, meskipun pembahasan masalah yang berperspektif gender dapat menghadapi ketidaktegasan dalam memaknai budaya laki-laki dan budaya perempuan serta juga akan menghadapi perlawanan, analisis ini tetap perlu dilakukan. Sebagai contoh Provinsi Bali jika dilihat jumlah penduduknya pada tahun 2005 yang lalu antara jumlah penduduk laki-laki jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan hampir sama. Kondisi ini jika tidak disertai dengan penanganan yang baik dan adil, akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menjadikan gender sebagai tonggak terjadinya ketidakadilan. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota tahun 2005.

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005

Kabupaten/Kota	Jml. Penduduk Laki-Laki	Jml. Penduduk Perempuan	T o t a l
Jembrana	110392	114598	224990
Tabanan	201046	204438	405484
Badung	190109	184268	374377
Gianyar	192130	191461	383591
Klungkung	83468	87276	170744
Bangli	105344	105842	211186
Karangasem	196703	198706	395409
Buleleng	305198	312878	618076
Denpasar	239036	224879	463915
Bali	1623426	1624346	3247772

Sumber: BPS Provinsi Bali (2006)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 49% dari total penduduk Provinsi Bali pada tahun 2005 adalah laki-laki, sedangkan 51% adalah penduduk perempuan. Ini berarti dilihat dari sisi jumlah, pada tahun 2005 penduduk perempuan mendominasi Provinsi Bali. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa ada beberapa kabupaten yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki yaitu kabupaten Jembrana, Tabanan, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Dengan demikian dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Bali, hampir mayoritas kabupatennya berpenduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Keadaan ini perlu penanganan yang serius sehingga fenomena ketidakadilan berperspektif gender dapat dicegah. Lebih lanjut jika diredung dengan seksama, perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Dalam kenyataannya, perbedaan gender ternyata melahirkan ketidakadilan terutama bagi perempuan termasuk bagi perempuan yang bekerja di sektor pariwisata. Ketidakadilan yang menimpa perempuan yang bekerja di sektor pariwisata berupa pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif atau mengalami pelecehan seksual di tempat bekerja.

Secara umum ada beberapa bentuk ketidakadilan yang dapat menimpa perempuan antara lain posisi perempuan yang sering ter subordinasi dan termarginalisasi, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Ketidakadilan tersebut saling kait mengkait dan bersifat dialektis. Khusus tentang kekerasan terhadap

perempuan, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1993 Pasal 1 menyebutkan bahwa "kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi", dalam Jurnal Perempuan Nomor 26 (2002:13).

Dalam membahas gender selalu yang dijadikan acuan adalah perempuan, oleh karena itu konsep yang penting dan perlu dipahami dalam rangka membahas perempuan adalah konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Kata seks (jenis kelamin) merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya (Fakih, 1996:3-9). Misalnya, perempuan dikenal sebagai lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri atau sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan, artinya ada juga laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Sedangkan menurut Edgar dan Sedgwick (1999) dalam Ratna (2005:224) mendefinisikan gender sebagai lawan seks, dan gender bersifat psikologis cultural, sebagai perbedaan antara *masculine-feminine*. Sedangkan seks bersifat fisiologis, secara kodrati, sebagai perbedaan antara *male-female*. Meskipun dalam membahas perempuan selalu terkait dengan jenis kelamin dan gender, namun keduanya bukanlah merupakan korelasi absolut (Moore, 1988; Fakih, 1996; Abdullah, 2001).

Pembedaan kedua konsep ini dilakukan dalam kaitan pemahaman terhadap ketidakadilan sosial yang sering dialami oleh perempuan, dan dari sinilah lahir analisis gender. Ini berarti analisis gender merupakan analisis kritis yang mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Sebut saja analisis diskursus (*discourse analysis*) yang berangkat dari pemikiran Foucault dan Althusser, mereka mengkritik semangat reduksionisme dan anti pluralisme dari keseluruhan analisis di bawah pengaruh modernisme. Demikian juga analisis hegemoni ideologi dan kultural yang dikembangkan oleh Gramsci, merupakan

kritik terhadap analisis kelas yang dianggap sangat sempit. Kedua analisis di atas tanpa diikuti oleh analisis gender, sehingga kritik mereka kurang mendalam serta kurang mewakili semangat pluralisme yang diimpikan. Lebih lanjut Escobar (1989) menggunakan cara analisis yang dipakai Foucault untuk menganalisis hubungan yang bersifat dominatif antara negara berkembang (dunia ketiga) dengan negara barat melalui diskursus *developmentalism*. Oleh karena itu pada bagian tersendiri akan diuraikan hubungan antara perempuan dalam pembangunan (WID = *Women in development*) dengan *developmentalism*.

Dalam kerangka *cultural studies*, pembahasan tentang feminisme dan gender muncul sebagai akibat kondisi perempuan yang ter-subordinasi-kan atas kebudayaan, artinya kebudayaanlah yang menyebabkan perempuan dianggap sebagai memiliki kedudukan yang lebih rendah dengan laki-laki, dan bukan semata-mata karena kondisi biologis perempuan (Ratna, 2005:226). Sementara itu menurut Rosaldo (1974:23) dan Moore (1994:10-11) mengatakan bahwa subordinasi perempuan itu tidak bersifat kultural, tetapi juga berakar dari pembagian kerja berdasarkan gender. Pembagian kerja itu bersumber pada asosiasi simbolik antara perempuan dengan alam (*nature*) dan laki-laki dengan budaya (*culture*). Perempuan dengan fungsi reproduksinya diasosiasikan dengan domestik dan laki-laki dengan lingkungan publiknya melahirkan hubungan hierarki yakni laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior. Proses eksternalisasi merupakan fakta antropologis yang mendasar, dan sangat mungkin berakar dalam lembaga biologis manusia (Berger, 1994:5).

C. PEREMPUAN DAN ETOS KERJA

Kajian Artadi (1993) tentang perempuan Bali menunjukkan bahwa perempuan Bali termasuk pekerja keras. Gejala ini berkaitan dengan ideologi patriarki sebagaimana tercermin dari adanya sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Bali. Sistem ini mengakibatkan perempuan yang telah menikah harus masuk dan tinggal di lingkungan kerabat suaminya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, ideologi patriarki mengakibatkan perempuan ter-subordinasi-kan oleh laki-laki ataupun suaminya. Kondisi ini mendorong perempuan bekerja keras agar eksistensinya dihargai oleh suami maupun lingkungan keluarganya (Atmadja, 1998). Mereka *jengah pang ngelah ja sekaya* (mereka berjuang

keras agar memiliki penghasilan secara mandiri) sehingga kehidupan mereka tidak mutlak tergantung pada sang suami. Bahkan berkat kemandirian itu status mereka bisa pula terangkat di mata suami maupun lingkungan keluarganya.

Gambaran perempuan Bali sebagai pekerja keras yang tidak kalah hebatnya dari pada laki-laki digambarkan dalam Majalah Sarad (Edisi I, Nomor 12, 2000:21-22) yang khusus menelaah tentang budaya Bali, sebagai berikut: "Tak cuma lelakinya, kaum perempuan Bali pun pekerja ulet. Dengan bekerja perempuan Bali merasa bermakna, mandiri, dihargai, tidak menengadahkan tangan kepada suami. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa ada kesepakatan bahwa perempuan Bali tergolong perempuan yang ulet berkerja guna menyejahterakan kehidupan rumah tangganya."

Dalam perspektif sistem ekonomi kapitalis, pekerjaan yang dianggap bernilai tinggi dalam masyarakat adalah pekerjaan yang mampu menghasilkan uang tunai. Apalagi di era sekarang ini, manusia terjerat pada budaya belanja yang berlebihan (konsumerisme), bahkan telah mengarah pada pembentukan masyarakat yang menganut sistem ekonomi libido, maka kepemilikan akan uang agar bisa memenuhi nafsu mereka untuk mengkonsumsi aneka jasa dan barang yang persediaannya melimpah di pasar menjadi amat penting (Lury, 1998; Piliang, 1998, 1999). Kondisi masyarakat seperti ini dapat mendorong laki-laki maupun perempuan untuk bekerja lebih keras lagi, agar nafsu mereka mengkonsumsi barang dan atau jasa terpenuhi secara berkelanjutan, bahkan dalam kondisi yang semakin meningkat, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Jika hal ini dibiarkan, menurut Abdullah (2006:112) akan membentuk etos kerja kapitalistik yang berorientasi pada pencarian "kehidupan yang lebih baik". Hal ini mengingatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi tidak saja di sektor domestik tetapi juga di sektor publik, sehingga mereka tidak berada pada situasi menanti rejeki yang berasal dari sang suami yang penuh dengan ketidakpastian.

Pada beberapa daerah umumnya perempuan amat bergairah sebagai pekerja rumahan, karena kegiatan tersebut bisa dipadukan secara elastis dengan kegiatan domestik. Gejala ini menarik untuk ditelaah, terutama bertalian dengan latar belakang yang menyebabkan mereka begitu antusias menggunakan waktu untuk mengisi peluang kerja yang tersedia. Dengan mengacu kepada Weber (1979), Bellah (1992) dan Mubyarto *et al.* (1991) gejala ini tidak terlepas dari superstruktur ideologi yang mereka miliki,

terutama bertalian dengan etos kerja. Etos kerja menentukan sikap dan perilaku manusia dalam menangani suatu pekerjaan. Namun dalam kenyataannya, faktor lain yang bersumber dari struktur sosial dan infrastruktur material, tentu tidak bisa diabaikan, karena bisa pula memberikan penguatan atau kendala terhadap etos kerja (Alatas, 1988; cf. Sanders, 1993; Burn, Baumgartner dan Devilie, 1987). Oleh karena itu, usaha untuk menjelaskan antusiasme perempuan Bali terjun untuk mencari nafkah, dengan sendirinya tidak hanya dicari pada etos kerja, melainkan perlu pula ditelusuri pada aspek-aspek lain yang tercakup dalam struktur sosial dan infrastruktur material yang mereka miliki.

Dalam kearifan lokal Bali, konsep etos kerja telah digubah dalam karya berbahasa Bali yang bernama *Salampah Laku* (Suastika, 2006). Dalam karya tersebut yang dimaksud dengan etos kerja adalah usaha yang sangat bermakna lewat perbuatan maksimal yang ditempuh lewat usaha yang sadar dan merupakan panggilan suci. Sementara itu perempuan Bali menganggap kerja adalah *yadnya* yang perlu dijalani serta diamalkan untuk peningkatan kualitas diri. Konsep peningkatan kualitas diri melalui etos kerja direspons oleh masyarakat Bali, sebagai contoh Geertz (1977) seperti dikutip Suastika (2006:282) tentang kebangkitan bangsawan di Tabanan pada tahun 1960-an untuk bangkit ke sektor perdagangan dan perhubungan. Mereka mendirikan berbagai firma seperti transportasi yang pada saat itu kebutuhannya sangat dirasakan manfaatnya. Ini dikatakan sebagai kebangkitan budaya kewirausahaan masyarakat Bali pada waktu itu. Marzali (2005:90-92) mengemukakan bahwa wirausaha (*entrepreneurship*) berkaitan dengan "mentalitas manusia" yang kreatif, inovatif, berani menghadang resiko, hidup secara berencana, menghargai waktu dan sebagainya, yang akan membentuk etos kerja. Mentalitas manusia ada yang menyebut *human factor* (Inkeles, 1966), faktor kultural (Rogers, 1969), ⁴³ *the state of mind* (Harrison, 1995), faktor non ekonomi (Kuntjoro Jakti, 1972), faktor psikokultural (Budiman, 1989) dan sikap mental (Koentjaraningrat, 1974). Dalam kesehariannya, perempuan Bali meskipun mengalami ketidakadilan, namun mereka tetap berkobar semangatnya untuk memperoleh nafkah serta mampu berwirausaha meskipun secara kecil-kecilan.

Dalam melaksanakan perbuatan maksimal terkait dengan etos kerja, dalam kearifan lokal Bali ada tiga model yang terkait yaitu *dharma yatra*, *dharma karya* dan *lascarya*. Menurut Suastika (2006) *dharma yatra* mengandung makna pengisian diri

secara maksimal dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan (teknologi) yang dapat digunakan sebagai pandangan dan pegangan dalam menjalankan kehidupan, dicapai melalui proses pendidikan yang tidak pernah putus. *Dharma karya* adalah perilaku yang kuat dan kokoh dalam berkarya. Selanjutnya konsep ini merupakan etos kerja, yaitu sikap batin yang melahirkan semangat sehingga ulet dalam bekerja, kemudian tekad ini dipakai dasar dalam berkarya, sehingga terpacu untuk bekerja secara optimal dengan kebulatan tekad untuk menyelesaikannya, serta menghasilkan karya yang berkualitas dan bermutu. *Lascarya* mengandung makna bahwa dalam berkarya meniru konsep *kedis sangsiah*, bahwa dalam berkarya atau berprofesi didasarkan atas *dharma* dan keikhlasan, selalu berani berbuat, selalu belajar berkarya dan mengabdikan sepenuhnya untuk masyarakat Bali. Menurut ⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:271) etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.

Antusiasme mereka terjun ke sektor publik untuk mencari nafkah dapat mengakibatkan sumbangan wanita terhadap aset ekonomi rumah tangga mereka menjadi amat berarti. Hal ini tentu mempengaruhi posisi wanita di lingkungan keluarga, bahkan bisa terhindar dari posisi ter-subordinasi-kan oleh laki-laki, sebagaimana yang diamanatkan dalam ideologi patriarki. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Sanderson (1993) atau Marx (dalam Elster, 2000; Magnis Suseno, 1999) bahwa ketimpangan penguasaan aset antara laki-laki dengan perempuan bisa memperkuat subordinasi laki-laki terhadap wanita. Sejalan dengan gagasan ini, menarik pula untuk dikaji tentang posisi politisi perempuan sebagai implikasi dari keterlibatan mereka dalam memberikan sumbangan kepada aset keluarga mereka. Dalam konteks inilah pola pembagian kekuasaan dalam keluarga merupakan hal penting untuk dibahas.

D. POLA PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KELUARGA

Dengan mengikuti Dahrendorf (1986) dalam setiap hubungan sosial, termasuk hubungan suami istri dalam keluarga selalu terselip aspek yang terkait dengan kepemilikan kekuasaan, artinya dalam hubungan sosial tersebut ada aktor yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, sehingga dia mampu mengarahkan perilaku aktor lainnya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Bahkan dalam perspektif teori sosial-konflik, karena kekuasaan yang dimilikinya, maka dalam keluarga terdapat hubungan kelas, yakni

kelas kapitalis dengan kelas proletar, yang satu menindas yang lainnya. Disamping itu terkait dengan konflik, Sunastri (2004) mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan dan laki-laki sulit melakukan pembagian waktu karena pekerjaan di kantor dan di masyarakat, kedua jenis pekerjaan tersebut sangat penting dan datangnya bersamaan.

Berdasarkan kelas-kelas yang ada pada teori sosial-konflik, maka pendistribusian kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan bisa dijelaskan dengan berbagai teori antara lain "resources theory of power" (Havemann dan Lehtinen, 1986:227-228). Menurut teori ini sumber ketimpangan tersebut bertalian dengan penguasaan sumber daya material, pendidikan, prestise kerja dan latar belakang keluarga. Barang siapa yang lebih banyak menguasai sumber daya tersebut, baik dalam artian kualitas maupun kuantitas, maka ada kemungkinan mereka akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada yang lainnya.

Terkait dengan sumber ketimpangan yang berasal dari pendidikan, berikut disajikan data tentang pendidikan tertinggi yang dicapai oleh penduduk Provinsi Bali bulan Februari 2006 terutama bagi penduduk yang tercatat sudah bekerja.

Tabel 5.2 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Di Propinsi Bali, Bulan Februari 2006

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Belum/tidak pernah sekolah	61458	97967	159425
Tidak Lulus SD	87052	98459	185511
SD	288434	269513	557947
SMP	162479	109088	271567
SMU	237471	117331	354802
SMK	94968	52218	147186
DI/II	25724	18797	44521
DII/Sarjana Muda	12500	8886	104479
S1/S2/S3	71379	33100	104479
Jumlah	1041465	805359	1846824

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2006.

Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa secara kuantitas terjadi ketimpangan pendidikan pada penduduk Bali yang sudah bekerja sampai dengan Februari 2006.

Penduduk laki-laki secara kuantitas dari tamat SMP sampai dengan tamat S3 lebih banyak dari penduduk perempuan, sedangkan untuk yang belum/tidak pernah sekolah sampai tamat SD perempuan lebih banyak dari laki-laki. Gambaran data ini memberikan makna bahwa secara kuantitas, pendidikan laki-laki di Bali sampai Februari 2006 terutama bagi yang sudah bekerja lebih baik dibandingkan dengan pendidikan perempuan. Kondisi ini jika diabaikan akan dapat berpotensi melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, hegemoni laki-laki terhadap perempuan atau bahkan men-subordinasi-kan perempuan secara terus menerus.

Model penjelasan serupa itu, namun dengan cakupan yang lebih luas, dikemukakan pula oleh teori materialis non-Marx. Penganut teori ini mengkaitkan ketimpangan tersebut dengan kondisi teknologi, ekonomi, demografi dan ekologi khusus. Kondisi-kondisi tersebut menghendaki partisipasi besar perempuan dalam bidang produksi ekonomi. Hal ini bisa menimbulkan implikasi bahwa perempuan dapat menduduki status yang relatif tinggi dalam masyarakat. Kalau tidak, mereka cenderung ter-subordinasi-kan oleh laki-laki (Sanderson, 1993). Burns, Baumgartner dan Devilie (1988) berpendapat bahwa dalam suatu sistem sosial akan ada hubungan kekuasaan, yang satu berhak mengatur atau mengontrol yang lainnya, sehingga dia mau berperilaku sebagaimana yang diharapkannya. Kepemilikan kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari sumber kekuasaan yang dipunyainya.

Sumber kekuasaan itu dapat berupa informasi, lambang, sebuah aturan atau sumber lain. Juga atribut dapat berguna sebagai basis kekuasaan, pendidikan menengah, penampilan yang menarik, serta reputasi keahlian. Kekayaan dan hal-hal yang berharga pada umumnya, alat-alat produksi, alat pemaksa, begitu pula kedudukan sosial, hak serta kewajiban, jaringan hubungan sosial dan organisasi dapat dikerahkan dan dimanfaatkan dalam proses pengawasan sosial (Burns, Baumgartner dan Devilie, 1988:193-194). Sedangkan Sajogyo (1983) menunjukkan bahwa basis kekuasaan bisa bersumberkan dan atau berkaitan dengan proses sosialisasi, pendidikan, latar belakang perkawinan, kedudukan dalam masyarakat dan pengaruh luar lainnya. Dengan demikian jelas terlihat bahwa sumber kekuasaan amat kompleks, yakni tidak semata-mata terkait dengan sumber daya ekonomi tetapi terkait pula dengan sumber daya sosial, budaya dan fisik. Mereka yang memilikinya secara lengkap, dengan sendirinya akan bisa menguasai pihak lainnya.

Besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki seseorang antara lain tercermin pada hubungan perempuan dan laki-laki dalam keluarga, yakni dalam bentuk tindakan "menyusun atau mengatur kondisi-kondisi, mengatur masukan dan proses-proses pengambilan keputusan serta tindakan dari pelaku sosial lainnya" (Burns, Baumgartner dan Devilie, 1988:193). Pola pengambilan keputusan dalam keluarga tidak bisa dilepaskan dari hubungan kekuasaan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa pola pengambilan keputusan dalam keluarga pada hakekatnya menggambarkan bagaimana pola atau struktur kekuasaan dalam keluarga (Lestari, 1990). Bahkan, menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981) metode yang sering digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam keluarga adalah dengan menanyakan siapa yang mengambil keputusan terakhir tentang sejumlah persoalan dalam keluarga.

Berkenaan dengan itu, Sajogyo (1983) menunjukkan bahwa ada berbagai variasi dalam pengambilan keputusan pada suatu keluarga, yakni (1) pengambilan keputusan hanya oleh istri; (2) pengambilan keputusan hanya oleh suami; (3) pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, di mana istri lebih dominan; (4) pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, di mana suami yang dominan; dan (5) pengambilan keputusan bersama oleh suami dan istri, setara.

Sedangkan White sebagaimana dikutip Sukes (1995:325-336) memilah bahwa ada tiga stereotipe umum dalam masyarakat yang saling bertentangan, yakni (1) hubungan laki-laki dan perempuan yang berbeda tetapi setara; (2) berbeda dan tidak setara, yang ditunjukkan oleh kekuasaan perempuan yang nyata tetapi tersembunyi; (3) berbeda dan tidak setara, dalam bentuk penundukkan perempuan yang nyata tetapi tersembunyi. Dengan demikian, tampak bahwa dalam pengambilan keputusan di lingkungan keluarga ada beberapa variasi yang mungkin terjadi yang pada intinya bisa setara atau yang satu mendominasi yang lainnya.

Keputusan pada dasarnya merupakan hasil dari kekuasaan yang kelahirannya melalui proses kekuasaan. Hal ini tidaklah statis, melainkan berdinamika dalam arti pada saat mereka menelorkan keputusan, selalu ada kemungkinan bahwa yang satu memberikan perlawanan terhadap pihak lainnya. Karena itu agar proses kekuasaan bisa berjalan dengan baik, pihak-pihak yang terlibat bisa berkonvergensi, yakni bermufakat sehingga perbedaan yang ada terjembatani yang akhirnya membawa mereka ke arah satu

haluan dalam memilih berbagai alternatif yang ada guna mewujudkan tujuan yang mereka inginkan (Burns, Baumgartner dan Devilie, 1988). Namun, dalam konvergensi itu pihak yang berkuasa akan memiliki daya tawar yang lebih besar, mengingat bahwa dengan kekuasaannya, dia bisa mendominasi pihak lainnya dengan cara menerapkan hukuman dan ganjaran. Selain itu, mereka bisa pula menghegemoni pihak lainnya, misalnya melalui pendidikan/pengetahuan atau propaganda dengan menggunakan idiom-idiom budaya, sehingga kepatuhannya terhadap penguasa terlegitimasi secara kultural (Burns, Baumgartner dan Devilie, 1988; Sugiono, 1999; Simon, 2000; Hendarto, 1993).

Aplikasi kekuasaan dalam bentuk pengambilan keputusan bisa tercermin pada berbagai aktivitas dalam keluarga, areanya bisa amat luas dan kompleks. Namun dengan mengikuti Lestari (1990) dan Scanzoni dan Scanzoni (1981), dan dengan memperhatikan pula arena kegiatan suatu keluarga pada masyarakat Bali (Atmadja, 1988) maka medan sosial yang bisa memberikan makna bagi adanya hubungan kekuasaan antara istri-suami dapat dilihat pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut.

- (1) Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini penting, karena merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup suatu keluarga.
- (2) Pengambilan keputusan dalam beberapa persoalan rumah tangga. Persoalan keluarga amat banyak, karena itu bisa dikhususkan pada aspek-aspek tertentu saja, yakni pengambilan keputusan yang berkaitan dengan menu sehari-hari, pembelian perabot rumah tangga maupun barang-barang berharga, alat-alat produksi kenelayanan, dan pendidikan anak-anak.
- (3) Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterlibatan istri maupun suami dalam memilih suatu pekerjaan, mengikuti kegiatan pada lingkungan *desa adat*, *desa dinas*, partai politik, dll.

Dengan memperhatikan pola pengambilan keputusan pada medan sosial tersebut diharapkan bentuk pendistribusian kekuasaan dalam keluarga akan bisa terpahami secara global.

Berbicara masalah kekuasaan, menurut Foucault (dalam Lubis, 2004:163-165) menyebutkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang ada begitu saja, tetapi dibentuk melalui relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu dengan memproduksi kebenaran, dan kebenaran itu ada dalam kekuasaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kuasa

terkait dengan pengetahuan, karena demikian eratnya hubungan diantara keduanya sehingga tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan tidak ada pula kuasa tanpa pengetahuan. Bagi Foucault kuasa bukan sebagai ontologi, akan tetapi lebih merupakan strategi yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

E. PEREMPUAN DALAM PARIWISATA

Kajian pustaka tentang pengaruh pariwisata dalam proses pembangunan memperlihatkan perhatian yang kecil terhadap peran perempuan. Beberapa kajian mencatat bahwa pariwisata turut andil dalam perubahan peran gender perempuan di beberapa tempat, sedangkan kajian lain mencatat bahwa pariwisata memperluas kesempatan perempuan berperan dalam bidang ekonomi, sosial bahkan politik. Di beberapa tempat, perempuan lebih berperan dalam perubahan kegiatan ekonomi yang dibawa pariwisata dan dapat mendapat keuntungan dari perubahan ini dibandingkan pria (Brown dan Switzer, 1991). Walaupun demikian banyak juga kajian yang mengungkapkan dampak negatif yang umumnya berkisar pada eksploitasi perempuan karena pelacuran atau pelecehan seksual dalam kegiatan pariwisata (Truong, 1990; Holden, Horlemann, Pfaffin, 1985).

Pariwisata sebagai perjalanan dengan memanfaatkan waktu luang (*leisure time*) dan berbagai industri yang mendukungnya dibentuk oleh hubungan-hubungan manusia sehingga dipengaruhi oleh hubungan gender yang bersifat lokal maupun global (Swain, 1995). Hubungan antara *host* dan *guest* bisa dianalisis dengan berbagai macam karakteristik seperti gender, kelas, usia, etnis dan ras serta negara. Studi-studi teoretis tentang pariwisata dan hubungan sosial akhir-akhir ini kurang memperhatikan isu gender secara substansial. Namun demikian Kinnaird (1994:14) justru mengarahkan pertanyaan yang bersifat fundamental tentang pembagian kerja, baik yang berupah (*paid work*) maupun yang tidak, dan implikasinya pada hubungan gender baik bagi *host* maupun *guests*.

Selain itu beberapa kajian juga telah menemukan bahwa pariwisata mampu membawa dampak bagi perluasan peluang kerja, berupa mempertegas pembagian kerja gender atau mengubahnya sesuai dengan munculnya peluang kerja atau penghasilan baru (Monk dan Alexander, 1986; Levy dan Lerch, 1991).

Sementara itu dalam kaitan keterlibatan perempuan dalam pariwisata perlu mempertimbangkan peran ganda perempuan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Dilain pihak, terdapat pendapat bahwa peran ganda perempuan yang ingin diciptakan tanpa mengurangi beban tradisional atau sekurang-kurangnya menciptakan modifikasi dalam kehidupan sebagai perempuan tradisional adalah suatu hal yang akan menyulitkan perempuan.

F. WID DAN DEVELOPMENTALISM

Women in development (WID) yang dalam *cultural studies* merupakan narasi besar dan harus ditolak, dibentuk sebagai jawaban atas kegagalan pembangunan (*developmentalism*), dan program pembangunan tersebut hanya mampu menjawab persoalan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan. WID menjadi bagian diskursus pembangunan, dan merupakan sebuah pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan negara berkembang (Dunia Ketiga). Pada saat digulirkan, gagasan WID dianggap satu-satunya jalan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dialami perempuan di dunia ketiga. Namun dalam perjalanannya, WID dianggap bagian dari agenda dunia pertama untuk mendominasi dunia ketiga. Konsep WID sendiri dianggap membawa bias feminis liberal, kelas menengah kulit putih, yang dianggap tidak memiliki kepentingan pembebasan kepentingan kaum perempuan.

WID merupakan strategi utama *developmentalism*, lebih menghasilkan penjinakan dan pengekangan perempuan Dunia Ketiga, ketimbang membebaskan kaum perempuan. WID dalam perjalanannya banyak menuai kritik. Ada yang mengkritik dari segi ekonomi dan teknologi (Stamp, 1989; Boserup, 1970), dari aspek isu diskursus dan pengetahuan/kekuasaan (Mueller A., 1987), maupun dari aspek lingkungan (Shiva, 1989) serta aspek-aspek lainnya (Sen, 1987; Ahmed, 1985; Charlton, 1984; McCarthy, 1984; Dixon, 1980; de Wolf, 1986).

Jadi dapat disimpulkan bahwa WID merupakan strategi dan diskursus *developmentalism* untuk melanggengkan dominasi dan penindasan terhadap perempuan Dunia Ketiga, melalui upaya penjinakan (*cooptation*) dan pengekangan (*regulation*) perempuan, dan berarti pula menghindari upaya emansipasi. Selain itu dalam tataran teori, feminisme memunculkan emansipasi dan gender (Ratna, 2005:224) serta WID

melanggengkan dominasi laki-laki, penindasan terhadap perempuan dan menghindari emansipasi. Sementara itu menurut Sztompka (2005:211) dari sisi sosiologi, aliran developmentalisme ini dianggap menggunakan pendekatan keteraturan proses sejarah dan keteraturan tersebut berkembang menurut kekuatannya sendiri serta bergerak menuju tujuan tertentu. Pendekatan ini diragukan dan banyak menuai kritik antara lain dari Karl R. Popper, Robert Nisbet, Charles Tilly dan terakhir dari Immanuel Wallerstein.

G. KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PARIWISATA

Dari Badan Pusat Statistik tentang Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2006 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja perempuan 846.565 orang, sedangkan pada tahun 2005 bertambah menjadi 905.376 orang atau mengalami peningkatan 58.811 orang dengan pertumbuhan mencapai 6,95%. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja laki-laki, tahun 2004 jumlah angkatan kerja laki-laki mencapai 1.078.240, sedangkan tahun 2005 berjumlah 1.096.795 atau dengan pertumbuhan mencapai 1,72% (Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2006). Sedangkan jika dilihat dari lapangan usahanya, pada tahun 2005 jumlah laki-laki Bali yang bekerja di bidang perdagangan, rumah makan dan hotel mencapai 178.797 orang (42%) dan untuk perempuan pada tahun 2005 jumlah yang bekerja pada bidang yang sama mencapai 237.577 orang (58%) [Bali Dalam Angka 2006].

Berdasarkan informasi tersebut, dari sisi pertumbuhan, baik untuk angkatan kerja maupun dari lapangan usahanya, pertumbuhan (*growth*) tenaga kerja perempuan Bali lebih baik dari tenaga kerja laki-laki Bali. Dengan tidak mengesalkan makna pertumbuhan tersebut, memang dari sisi *cultural studies* pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dianggap gagal menjalankan perannya. Kondisi kegagalan tersebut antara lain ditandai dengan timbulnya masalah terhadap tenaga kerja perempuan Bali di bidang pariwisata berupa marginalisasi di berbagai proyek kepariwisataan dan pengembangan masyarakat, marginalisasi perempuan di sektor publik pariwisata yang berorientasi kekuasaan, kekerasan, pelecehan seksual dan berbagai stereotipe negatif yang sering menimpa perempuan. Semua masalah tersebut pada akhirnya bermuara pada ketidakadilan terhadap pekerja perempuan pada sektor pariwisata.

Dengan mengesampingkan latar belakang pendidikan pekerja perempuan Bali seperti telah diuraikan pada Tabel 5.2, kiranya semua masalah yang ditimbulkan oleh kegagalan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan seperti diuraikan sebelumnya dan berdampak pada pekerja perempuan sektor pariwisata di Bali harus disikapi sebagai kekurangmampuan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan ketenagakerjaan bidang pariwisata di Bali. Pemangku kepentingan tersebut kurang memperhatikan aspek budaya dari pekerja perempuan Bali, sehingga perempuan Bali hanya dijadikan mesin uang dari kapitalis yang diwakili oleh pengusaha, serta hegemoni pemerintah terhadap para pekerja perempuan di sektor pariwisata (baik pekerja formal maupun informal) untuk mau mengikuti dan mentaati berbagai aturan yang ditetapkan tanpa sebelumnya mengajak pekerja kaum perempuan untuk bermusyawarah tentang berbagai aturan tersebut.

H. PELECEHAN SEKSUAL DARI SISI KAJIAN BUDAYA

Pelecehan seksual yang dialami oleh pekerja perempuan di sektor pariwisata, dari sisi *Cultural Studies* dapat dilihat dari adanya relasi antara kuasa dan kepuasan. Foucault dengan karyanya yang berjudul *The History of Sexuality* (1981a) dalam Brooks (1997:287) menyebutkan bahwa seksualitas dan seks merupakan bentuk baru dari kuasa, hubungan antara kuasa dan kepuasan serta artikulasi tentang hubungan antara perlawanan dan identitas.

Pelecehan seksual yang dialami oleh kaum perempuan akan dapat dijadikan modal oleh kaum perempuan yang menjadi "korban" untuk melakukan perlawanan terhadap mereka yang melakukan pelecehan seksual. Dalam konteks teori posfeminisme, menurut Agger (2005:244) cakupan "korban" yang terkait dengan pelecehan seksual dipersempit dengan cara menghadirkan perempuan sebagai agen yang berkuasa. Posfeminisme akan mendiskriminasikan kejahatan perkosaan tanpa mengesahkan perilaku yang tampak seperti perkosaan. Namun mereka akan mengkategorikan perkosaan sebagai agresi, lalu menghilangkan semua konotasi perkosaan sebagai korban hasrat, dengan bersikukuh bahwa itu hanyalah sebuah kejahatan kekerasan, yang lebih dikenal sebagai kekerasan seksualitas.

Dari uraian di atas terlihat bahwa meskipun feminisme melakukan perlawanan terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh kaum perempuan, namun perlawanan itu hanyalah menghasilkan istilah "kekerasan seksual" yang dikelompokkan dalam kejahatan kekerasan. Hal ini tentunya akan sangat menyinggung dan men-subordinasikan perempuan yang sangat berlebihan dan selalu memposisikan di bawah kuasa. Kondisi ini akan melahirkan perlawanan yang berkelanjutan, sebagai akibat ketidakadilan yang menimpa perempuan dalam melawan tekanan dari kuasa.

I. PENUTUP

Untuk mengatasi masalah tersebut, diajukan rekomendasi sebagai berikut. [1] Dalam jangka pendek perlu dilakukan tindakan antara lain: a) menggalakkan kembali berbagai organisasi perempuan yang telah ada; b) kaum perempuan mulai memberi pesan tegas akan penolakan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual; c) memberi pelajaran kepada kaum perempuan tentang berbagai teknis praktis menghentikan kekerasan, pemerkosaan dan pelecehan; d) lebih aktif menyampaikan *uneg-uneg* perempuan pada kolom pembaca di media massa cetak seperti koran; e) melancarkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. [2] Dalam jangka panjang perlu dilakukan peperangan terhadap berbagai hambatan di masyarakat yang bersifat ideologi, antara lain dengan melakukan kesadaran kritis dan pendidikan umum kepada masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender dengan berbagai langkah pendukungnya, antara lain dengan melakukan berbagai studi yang terkait dengan ketidakadilan gender. Hasilnya dapat dijadikan bahan dalam rangka melakukan advokasi yang terkait dengan ketidakadilan gender.

6

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT DI DESA WISATA**
(Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan Bali sebagai Kasus)

A. PENGANTAR

Pengembangan pariwisata sebagai andalan perekonomian nasional dalam operasionalnya bertumpu pada potensi alam, potensi budaya serta kehidupan masyarakat di lokasi pengembangan pariwisata. Hal ini berarti, permintaan terhadap produk wisata oleh wisatawan terkait dengan alam serta kehidupan dan budaya masyarakat tempat pariwisata tersebut dikembangkan. Dengan demikian, diharapkan terjadi hubungan timbal balik antara alam, budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Hubungan timbal balik tersebut harus saling menguntungkan, artinya pariwisata harus mampu meningkatkan budaya dan alam serta sebaliknya dapat menumbuhkan kemajuan pariwisata di suatu destinasi.

Destinasi pariwisata di Indonesia memiliki berbagai aset wisata dan telah banyak menarik perhatian wisatawan. Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke suatu destinasi wisata, peranan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama-sama dengan masyarakat antara lain dapat berupa tindakan menjaga keamanan yang merupakan investasi bagi industri pariwisata, meningkatkan sadar wisata masyarakat setempat dan melakukan penganekaragaman (diversifikasi) produk wisata. Diversifikasi produk wisata yang dilakukan pada intinya mengacu pada potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh suatu destinasi dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai inti dalam pengembangan produk wisata.

Pengembangan produk wisata dengan melibatkan masyarakat setempat, dari perspektif kajian budaya merupakan suatu reaksi terhadap kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh modernisasi Dunia Pertama terhadap Dunia Ketiga, di samping merupakan koreksi terhadap penciptaan produk wisata dari pendekatan *fordisme* menuju pendekatan *postfordism* serta untuk menarik wisatawan baru.

Pada pengembangan produk wisata di Indonesia, berkembang berbagai macam diskursus antara lain diskursus tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan yang tidak kalah populernya adalah diskursus tentang pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang sangat berbeda dengan pendekatan konvensional yang selama ini dijalankan, yaitu dengan sistem *top-down* dan sentralistik. Pendekatan pembangunan pariwisata dengan sistem *top-down* ini banyak membatasi ide-ide yang ada di dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan produk wisata.

Selain adanya pendekatan pengembangan pariwisata yang bersifat *top-down*, banyak sekali tuduhan yang timbul dalam pengembangan pariwisata, antara lain berupa perusakan lingkungan, ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengontrol pertumbuhan liar pariwisata, pelanggaran tata ruang yang tidak ditindak, peralihan fungsi tanah pertanian, dan hal-hal lain yang menyebabkan reputasi pengembangan pariwisata di suatu daerah menjadi ternodai. Belum lagi pariwisata dijadikan ajang pertarungan politik yang bersifat terbuka, yang melahirkan oposisi yang kian meningkat terhadap pemilik kekuasaan dan perbedaan pandangan antara masyarakat dan pengembang (*developer*) pariwisata.

Bali sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia juga pernah mengalami tuduhan seperti di atas dalam pengembangan pariwisatanya. Atas dasar berbagai tuduhan tersebut dan untuk tetap dapat mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya, pemerintah daerah Bali pada *International Conference on Cultural Tourism* di Yogyakarta tahun 1992 mengumumkan Desa Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), Desa Penglipuran (Kabupaten Bangli) dan Desa Sebatu (Kabupaten Gianyar) sebagai desa wisata. Ketiga desa wisata tersebut diharapkan secara optimal mampu melibatkan masyarakat setempat melalui aktivitas sosial, budaya dan ekonomi pada produk wisata yang akan ditawarkan.

B. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Uraian tentang pengembangan pariwisata lebih difokuskan pada Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan Bali. Hal ini dilakukan agar uraian yang disajikan lebih

komprehensif serta didukung oleh informasi dan fakta yang akurat, mengingat penulis pernah melakukan penelitian di desa wisata tersebut khususnya tentang pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat.

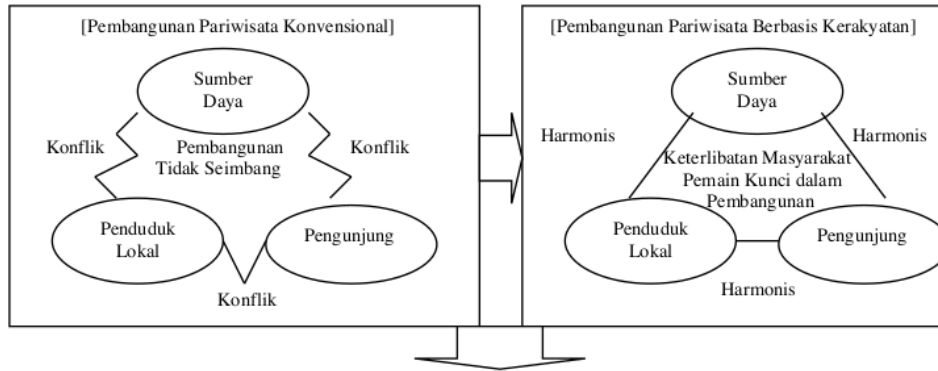
Terkait pengembangan pariwisata yang berupa pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata, secara akademik sebenarnya ada beberapa peneliti yang sudah mengkajinya, yaitu Pitana (1999) dan Arka (1999). Pendekatan penelitiannya adalah paradigma budaya dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh gambaran tentang kedua penelitian tersebut adalah seperti tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Penelusuran Terhadap Penelitian di Desa Wisata Jatiluwih

No.	Peneliti	Pendekatan	Substansi
1.	Arka (1999)	Paradigma Budaya	<ul style="list-style-type: none"> □ Permasalahan yang dibahas adalah latar belakang <i>Desa Adat</i> Penglipuran dikembangkan menjadi desa wisata terpadu, upaya pemberdayaan <i>desa adat</i> dalam pengembangan desa wisata terpadu, dan makna pemberdayaan bagi masyarakat <i>Desa Adat</i> Penglipuran. □ Subjek penelitian adalah masyarakat <i>Desa Adat</i> Penglipuran.
2.	Pitana (1999)	Sosiologis	<ul style="list-style-type: none"> □ Membahas hal-hal yang bersifat umum seperti penataan ruang, pembuatan tempat parkir, serta dominasi desa dinas terhadap <i>desa adat</i> dalam operasional Desa Wisata Jatiluwih. □ Subjek penelitian adalah masyarakat <i>Desa Adat</i> Jatiluwih.

Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat juga menarik perhatian para ahli pariwisata untuk memberikan kontribusinya. Hitchcock, King, dan Parnwell (1993) dalam bukunya yang berjudul *Tourism in South-East Asia* menelaah pariwisata dunia, khususnya pariwisata di Asia Tenggara dalam berbagai dimensi, termasuk pengembangan pariwisata di Bali dan Indonesia antara lain tentang pariwisata berkelanjutan, pariwisata berwawasan lingkungan, kesan (*image*) terhadap pariwisata, pariwisata berwawasan kebudayaan lokal, kajian tentang masyarakat lokal dalam kaitan dengan pengembangan pariwisata, cenderamata yang berupa kerajinan tangan masyarakat lokal, pariwisata dalam kaitan dengan konservasi dan preservasi, sumber daya manusia lokal dalam pengembangan pariwisata, peran *banjar* dalam pengembangan pariwisata, pariwisata berbasis masyarakat, serta pariwisata dengan kearifan lokal.

Selanjutnya Natori (2001) dengan bukunya yang berjudul *A Guidebook for Tourism-Based Community Development* telah membedakan pembangunan pariwisata konvensional dengan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan. Model pembangunan pariwisata konvensional, interaksi antara sumber daya, penduduk, dan pengunjung tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Selanjutnya, pada model pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan, sumber daya, penduduk lokal, dan pengunjung berinteraksi secara harmonis, di samping menjadikan masyarakat sebagai pemain kunci dalam pembangunan pariwisata. Adapun penggambaran perbedaan pembangunan pariwisata konvensional dengan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan seperti gambar berikut ini.



- * Pembangunan diartikan untuk kesejahteraan hidup masyarakat
- * Revitalisasi masyarakat melalui penggunaan sumber daya
- * Promosi pariwisata harmonis dengan kehidupan lokal dan lingkungan hidup
- * Kapasitas merespon untuk meningkatkan permintaan pariwisata

Gambar 6.1 Konsep dan Arti Penting Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan

Sumber: Natori (2001:6)

Dari perspektif kajian budaya, untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ada beberapa teori yang dapat digunakan secara *eklektik*. Teori tersebut antara lain teori Hegemoni, teori Komodifikasi, teori Dekonstruksi, teori Diskursus Kekuasaan/Pengetahuan, dan teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Hegemoni menurut Gramsci dalam Patria (1999) adalah pemikiran kritis untuk menggiring orang atau kelompok orang untuk mengikuti apa yang diinginkan dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan politik dan ideologi berdasarkan konsensus atau persetujuan yang secara langsung atau tidak langsung dan secara terbuka atau diam-diam, dengan mempergunakan komponen-komponen yang ada di masyarakat.

Komodifikasi adalah kapitalisme yang menjadikan sesuatu secara langsung dan sengaja (dengan penuh kesadaran dan perhitungan) sebagai sebuah komoditas untuk dijual di pasar dan terjadi tidak saja pada aspek produksi, tetapi juga terjadi pada aspek konsumsi dan aspek distribusi (Barker, 2004).

Derrida dalam Kristeva (1980) mengemukakan bahwa dekonstruksi adalah model analisis yang terkait dengan "pembongkaran" terhadap berbagai konstruksi, paradigma, struktur (bahasa, kekuasaan, dan institusi objek sosial) tanpa harus melakukan penghancuran terhadap elemen-elemen yang sudah ada sehingga tersusun konstruksi baru ke dalam tatanan dan tataran yang lebih signifikan dengan hakikat objek dan aspek-aspek yang dianalisis sehingga dapat dimanfaatkan semaksimalnya.

Diskursus kekuasaan/pengetahuan adalah dipergunakannya pengetahuan oleh individu atau kelompok tertentu sebagai suatu kekuatan untuk mencapai tujuan atau kepentingan mereka melawan kehendak di pihak lawan. Dalam hal ini kekuasaan itu dipraktikkan dalam suatu lingkup karena dalam lingkup itu ada posisi-posisi strategis yang terkait satu dengan yang lainnya (Foucault, 2002:9).

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat sebagai kristalisasi teori-teori kritis adalah pembangunan yang berfokus pada penggunaan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau merupakan kebalikan dari pembangunan konvensional, yakni dengan menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata yang berupa pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata menimbulkan komodifikasi pada bangunan tradisional *saka roras*, dan semakin meningkatnya penjualan tanah di sekitar pura dan penjualan tanah di hutan sebelah utara Pura Luhur Petali. Penjualan tanah tersebut terus berlanjut seiring pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Penjualan tanah di sekitar pura terkait dengan sosio-religius, kultural, dan ekonomi masyarakat setempat, serta dari sisi *bhisama*

kesucian pura merupakan pelecehan *trihita karana* (*parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*), adat, dan agama. Sedangkan komodifikasi terhadap bangunan tradisional *saka roras* pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih terjadi sebagai akibat konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha pariwisata. Namun, dalam masyarakat, akibat konflik yang timbul, terjadi perpecahan sehingga masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.

C. KETERLIBATAN MASYARAKAT

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih berwujud partisipasi dapat dilihat pada lima tahap. Adapun keterlibatan dalam bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Tahap Persiapan.** Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong kehadiran pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata.
2. **Tahap Perencanaan.** Tahap ini terdiri atas identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat setempat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang berasal dari luar desa setempat yang diberi kepercayaan dalam pengembangan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata.
3. **Tahap Operasional.** Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik dan partisipasi berbentuk nonfisik. Pada **partisipasi berbentuk fisik** (*physical participation*), partisipasi masyarakat setempat dilakukan dengan (a) mobilitas sendiri, artinya masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan pariwisata di desanya. Wujudnya berupa pembangunan pos retribusi di *Dusun Kesambi* dan *Dusun Gunungsari* Desa, pembangunan *Cafe* Jatiluwih dan salah seorang warga desa setempat mendirikan akomodasi berupa *Inn*. (b) Partisipasi untuk bahan insentif, artinya partisipasi dari masyarakat setempat dengan menyediakan sumber-sumber seperti bangunan tradisional tiang duabelas (*saka roras*) yang mengalami komodifikasi menjadi "rumah contoh". Pada **partisipasi berbentuk**

nonfisik (*nonphysical participation*), partisipasi masyarakat dilakukan dengan (a) mobilitas sendiri, artinya masyarakat dengan penuh kesadaran mempelajari bahasa asing tertentu dalam kaitan pengembangan pariwisata di wilayah desa mereka, serta mempelajari kesenian berupa gamelan dan tari-tarian, (b) partisipasi interaktif, berupa pengiriman lima orang pemuda setempat untuk belajar perhotelan dan pariwisata pada lembaga pendidikan formal.

4. **Tahap Pengembangan.** Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat spontan antara lain dengan mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan, seperti: pengelolaan usaha penginapan, usaha cuci pakaian, usaha kerajinan perak, usaha warung makanan dan minuman, serta usaha yang menjual kebutuhan sehari-hari.
5. **Tahap Pengawasan.** Pada tahap ini, partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif, untuk mencegah agar desanya sebagai daya tarik wisata tidak tercemar oleh tindakan-tindakan negatif. Secara umum partisipasi masyarakat pada tahap ini bersifat manipulatif. Partisipasi yang bersifat manipulatif dari masyarakat terjadi, di samping karena program-program yang dibuat untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Jatiluwih tidak sepenuhnya berjalan, juga karena masyarakat setempat tidak memiliki kekuasaan (*power*) untuk mengatur dan mengawasi sendiri pengembangan desanya sebagai desa wisata. Dengan demikian, penguatan dan revitalisasi desa dari pengembangan pariwisata berupa desa wisata tidak dapat berjalan.

D. DAMPAK PENGEMBANGAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DESA WISATA JATILUWIH

Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih berdampak terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Pengelolaan Desa Wisata

Sesuai dengan pengembangan desa wisata yang berkarakteristik pariwisata berbasis masyarakat, menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan. Tujuannya adalah agar pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut.

Sesuai dengan konsep dasar pengembangan desa wisata bahwa setiap program pembangunan yang akan direncanakan terhadap desa akan ditolokkan pada berbagai sistem norma, adat, dan budaya setempat. Sistem kelembagaan yang direncanakan menyanggah program-program yang akan diusahakan semaksimalnya untuk menggunakan kelembagaan lokal atau kelembagaan desa yang sudah ada.

Berangkat dari konsep dasar pengembangan tersebut, pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dilihat dari kelembagaan yang ada, khususnya dari struktur organisasi pengelola yang berbentuk *steering committee*, masih mencerminkan struktur pengelolaan yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat. Dalam struktur organisasi tersebut masih dijumpai unsur-unsur pemerintah, baik sebagai pelindung maupun sebagai pembina.

Masuknya unsur pemerintah sebagai pengelola utama Desa Wisata Jatiluwih, dapat memperkuat kekuasaan yang dimilikinya dan dengan diskursus pengetahuan dapat menyebabkan terhegemoninya keterlibatan masyarakat pada pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih. Diskursus yang dipergunakan untuk menghegemoni adalah yang melemahkan masyarakat, seperti masyarakat tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan desa wisata, dan masyarakat tidak memiliki keahlian sebagai pengelola. Hal ini menurut Foucault (dalam Storey, 2003:132) merupakan suatu bentuk praktik-praktik kekuasaan yang terkait dengan posisi-posisi yang strategis. Posisi strategis itu adalah sebagai pengelola utama Desa Wisata Jatiluwih.

Masuknya unsur-unsur pemerintahan dalam struktur organisasi pengelola Desa Wisata Jatiluwih, yakni merupakan suatu cara atau teknik yang dikembangkan untuk tetap ikut dalam pengelolaan pembangunan pariwisata. Padahal, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratcharak (2007) dan Prasiasa (2008) di Phuket Thailand terkait implementasi *community based tourism*, pemerintah setempat sudah tidak ikut mengatur dalam pembangunan pariwisata. Pengaturan diserahkan kepada masyarakat setempat (dapat bekerja sama dengan *partner*) baik pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, implementasi, maupun pengawasan. Masuknya unsur pemerintahan dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, menurut Foucault (dalam Lubis, 2004:165) merupakan "strategi" pemilik kekuasaan untuk berlindung di balik regulasi. Dalam hal ini, pemilik kekuasaan menjadikan regulasi sebagai pembenar masuk dalam struktur organisasi pengelola desa wisata, yaitu sebagai pelindung. Masuknya

pemilik kekuasaan (pemerintah) sebagai pengelola antara lain bertujuan untuk menghegemoni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, sehingga dapat meredupkan inovasi dan daya kreasi masyarakat setempat.

Sesuai dengan roh pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, seharusnya masyarakat (*desa adat* dan *subak*) diberikan kekuasaan penuh atas seluruh pengelolaan yang ada di Desa Wisata Jatiluwih. Pemerintah dan pelaku pariwisata hanya bertindak sebagai mitra kerja. Untuk itu, ke depan, struktur organisasi yang melibatkan pemerintah sebagai pemeran utama dalam pengelolaan desa wisata perlu didekonstruksi. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat benar-benar seluruhnya terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih, sehingga Desa Wisata Jatiluwih pengelolaannya benar-benar berpusat pada masyarakat setempat. Hal ini diperkuat oleh Pujaastawa (2005:142) bahwa apabila kondisi *subak* dan *desa adat* sudah mapan, maka peran pemerintah dan pelaku pariwisata dapat dikurangi dan bahkan mungkin tidak dilibatkan lagi.

Selain dilihat dari sisi pengelolaan desa wisata, masuknya unsur pemerintah pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, juga berdampak terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih. Hal ini dimaksudkan sebagai masuknya unsur pemerintah (dalam hal ini yang ditunjuk adalah Kepala Desa Jatiluwih) sebagai pengelola retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih. Masuknya kepala desa sebagai pengelola retribusi masuk, di samping sebagai cerminan ketidakpercayaan terhadap masyarakat setempat, juga sebagai bentuk hegemoni terhadap keterlibatan masyarakat setempat pada pengelolaan retribusi masuk desa wisata. Hegemoni yang dilakukan terhadap masyarakat setempat ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kepala Desa Jatiluwih sebagai Pengelola Retribusi Masuk Desa Wisata Jatiluwih.

Keluarnya dua Surat Keputusan Bupati di atas, menurut Barker (2005:81) merupakan penggambaran terjadinya perang posisi pemerintah melawan perang manuver masyarakat. Masyarakat melakukan manuver berupa keinginan mengelola retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih, sedangkan pemerintah berkemauan juga untuk mengelola retribusi masuk tersebut karena sudah berjasa dalam pengembangan Desa

Wisata Jatiluwih. Dengan adanya keinginan yang sama dari kedua belah pihak, menyebabkan terjadinya perang posisi.

Dengan keluarnya kedua Surat Keputusan Bupati Tabanan tersebut, yakni membuat inisiatif dan kreativitas masyarakat terpasung dalam mengelola retribusi masuk. Dengan demikian, secara tidak langsung aspirasi masyarakat juga terhambat. Kondisi ini mengembalikan model pengelolaan dari berbasis masyarakat (*bottom-up*) ke model pengelolaan dengan budaya lama (*top-down*) sehingga masyarakat selalu tergantung kepada pemerintah dalam sektor pariwisata. Hal ini berarti kekuasaan berupaya menghasilkan sesuatu yang baru dalam rangka melanggengkan ketergantungan setiap orang padanya. Berkaitan dengan hal ini, Foucault (dalam Piliang, 2005:111-114) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kekuasaan yang paling efektif adalah dengan cara memberi ruang hidup atau ruang gerak seluas-luasnya bagi pelepasan berbagai bentuk hasrat di dalam kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini, hasrat kekuasaan itu berupa keinginan untuk berkuasa pada pengelolaan retribusi masuk Desa Wisata Jatiluwih.

Dalam rangka pengembangan ke depan, batasan keterlibatan masyarakat perlu mendapat ketegasan dari semua *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan retribusi masuk, yakni dengan tujuan agar masyarakat setempat benar-benar terlibat sepenuhnya dalam pengelolaan retribusi masuk tersebut. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam masyarakat, khususnya pada pengelolaan retribusi masuk dapat dipenuhi dengan memberikan bimbingan serta pelatihan.

Posisi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk dapat bersifat koordinasi, artinya dengan model seperti ini akan meniadakan pemikiran tentang dominasi dari kedua belah pihak. Dengan posisi seperti ini, dapat menimbulkan interaksi yang bersifat terbuka antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk, di samping berpeluang timbulnya berbagai inovasi dalam menjawab tantangan pengelolaan pengembangan pariwisata, khususnya terkait dengan retribusi masuk desa wisata.

Terkait dengan tantangan pengembangan pariwisata, khususnya dalam pengelolaan retribusi masuk ke daya tarik wisata, penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bali (2008) merekomendasikan penerapan sistem pungutan retribusi

satu pintu masuk Bali, melalui pembentukan perusahaan daerah, penyusunan peraturan daerah, dan merancang sistem dan prosedur pungutan retribusi satu pintu.

Hasil penelitian Bappeda Provinsi Bali di atas jika dikaitkan dengan sistem pemungutan retribusi yang telah dilakukan di Desa Wisata Jatiluwih, memiliki beberapa kesamaan dalam hal dampak yang akan ditimbulkan. Dampak tersebut sebagai berikut. *Pertama*, timbul rasa ketidakadilan. Hal ini akan timbul manakala hasil dari pemungutan retribusi masuk satu pintu ke Bali tersebut tidak secara merata terdistribusi kepada kabupaten/kota yang ada di Bali. Sedangkan untuk Desa Wisata Jatiluwih, rasa ketidakadilan tersebut muncul sebagai akibat tidak meratanya pembagian hasil retribusi masuk daya tarik wisata antara *Desa Adat* Jatiluwih dengan *Desa Adat* Gunungsari. *Kedua*, timbul pungutan liar pada daya tarik wisata yang bersifat *public good*. Kondisi ini terjadi karena masyarakat sekitar tempat daya tarik wisata yang bersifat *public good* (seperti pemandangan alam) tersebut ingin mendapatkan hasil dari daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Untuk mencapai keinginan tersebut, dilakukan pungutan liar terhadap wisatawan yang kebetulan menikmati daya tarik wisata *public good* tersebut. Terkait dengan Desa Wisata Jatiluwih, pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat berupa "biaya *shooting*" atau biaya pengambilan gambar, selain disebabkan oleh keinginan mendapatkan hasil dari pemandangan yang disajikan oleh terasering sawah, juga sebagai akibat dangkalnya pemahaman masyarakat setempat terhadap implementasi pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih.

2. Pengambilan Gambar oleh Wisatawan

Pada beberapa daerah ada kecenderungan bahwa pengembangan pariwisata selalu dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Sebagai dampaknya timbul usaha-usaha untuk mengkomodifikasikan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikomodifikasi, seperti keramahamahan dan keindahan alam dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari pengembangan pariwisata yang dilakukan.

Pada musim-musim kehadiran wisatawan ke suatu destinasi wisata, sering kali hubungan antara wisatawan dengan penduduk yang menerima kehadiran mereka merupakan hubungan yang bersifat komodifikasi. Akibatnya, ada hal-hal yang termasuk unik (*curiosity*) dan daya tarik sosial (*social interest*) dibuat sedemikian rupa sehingga

setiap wisatawan yang hendak menyaksikan sesuatu harus dengan imbalan yang setimpal. Kejadian seperti ini sering terjadi di beberapa destinasi wisata. Untuk di Bali, yang pernah terjadi adalah kalau wisatawan membidikkan kamera pada seseorang, maka secara spontan orang tersebut menengadahkan tangannya dengan mengatakan, "One dollar, sir!". Hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang pariwisatanya sudah berkembang. Sementara itu, untuk daerah-daerah yang pariwisatanya belum berkembang, kalau ada wisatawan yang membawa kamera ke daerah-daerah terpencil dan bertemu penduduk setempat, maka secara otomatis penduduk setempat akan membuat barisan dan mereka meminta untuk di foto. Setelah di foto mereka tidak akan meminta bayaran, tetapi mengucapkan terima kasih.

Fenomena tentang "One dollar, sir!" di atas juga terjadi di Desa Wisata Jatiluwih, tetapi dengan objek yang berbeda. Jika ada wisatawan yang memotret terasering sawah dengan latar belakang keindahan alamnya, maka wisatawan tersebut akan didatangi oleh warga yang melihat aktivitas mereka untuk dimintai uang, yang mereka sebut sebagai "biaya *shotting*". Hal ini berarti masyarakat desa setempat sudah melakukan komodifikasi terhadap keindahan alam. Sehubungan dengan hal ini Barker (2004:408) mengemukakan bahwa komodifikasi sebagai sebuah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme sehingga objek, kualitas, dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Dalam hal ini komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar.

Jika dikaitkan dengan proses yang dilalui oleh komodifikasi, dari proses produksi, konsumsi, dan distribusi, maka pada saat pengambilan gambar terasering sawah dengan latar belakang keindahan alam, sebenarnya sudah terjadi proses produksi sekaligus konsumsi. Pemandangan dan keindahan alam sebagai komoditas pada saat itu hanya dinikmati oleh wisatawan tersebut. Tetapi jika komoditas tersebut diproduksi secara massal, misalnya sebagai *postcard*, maka pada proses inilah terjadi keterlibatan kapitalisme, yang menurut Turner (1992:115-138) tujuannya adalah ekonomi uang yang didasarkan atas semangat menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada kondisi seperti ini kapitalis akan memproduksi *postcard* dalam bentuk massal (*mass product*).

Adanya kejadian seperti ini sempat meresahkan para pelaku pariwisata yang secara kebetulan mengemas Desa Wisata Jatiluwih dalam paket wisata mereka. Hal ini

berdampak pada citra (*image*) kepariwisataan Desa Wisata Jatiluwih pada khususnya dan Bali pada umumnya.

Dari sisi masyarakat setempat, komodifikasi terjadi karena adanya interpretasi yang salah terhadap pariwisata berbasis masyarakat pada pengembangan desa wisata di desa setempat. Masyarakat terlalu keblablasan dalam mengartikan pengembangan pariwisata ¹³¹ dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Menurut masyarakat setempat, apa pun boleh dilakukan sepanjang untuk masyarakat setempat. Hal ini tentulah suatu interpretasi yang kurang tepat. Untuk mengatasinya, perlu konsensus di antara *stakeholders* yang terlibat, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, serta penataran terhadap masyarakat terkait dengan tingkah laku dan kesenangan wisatawan selama berada di daya tarik wisata. Hasil pendidikan, pelatihan dan penataran tersebut dapat dijadikan kebijakan pengembangan pariwisata yang sedang dan akan dilaksanakan di desa wisata tersebut.

3. Penyerapan Pekerja dari Masyarakat Setempat

Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih pada aras praktis berdampak terhadap terserapnya masyarakat setempat sebagai pekerja pada usaha pariwisata. Masyarakat desa setempat yang terserap bekerja pada usaha pariwisata, bekerja secara langsung pada usaha restoran dan penginapan. Secara tidak langsung masyarakat setempat bekerja sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha pariwisata tersebut. Jumlah masyarakat setempat yang bekerja secara langsung pada usaha pariwisata sangat kecil. Sebagian besar kesempatan kerja langsung yang ada diisi oleh pekerja pendatang, baik dari luar Desa Wisata Jatiluwih maupun dari luar Bali.

Penggunaan pekerja pendatang merupakan sebuah konsekuensi dari pengembangan pariwisata, yang seakan-akan secara langsung dan tidak langsung pariwisata mengundang pekerja-pekerja dari luar. Hal ini menurut Pitana (2003:131) berasosiasi dengan proses indigenisasi masyarakat Bali dan meningkatkan in-migrasi dari luar pulau. Selanjutnya, jika dilihat dari konsep "kemerekaan" dan "kekitaan" atau *keliyanan*, Bali dengan destinasi-destinasi wisatanya dituntut untuk tidak saja menjadi "kota plural", tetapi terutama sebagai "kota multikultural", tempat bertemu dan silang-menyalangnya ⁸⁴ manusia dari berbagai suku, ras, agama, bangsa, profesi, seks, serta objek,

yang menunjukkan hubungan interteks lintas budaya, antar-budaya, multikultural, dan subkultural yang kompleks (Piliang, 2004:474-475).

Penyerapan pekerja yang sangat kecil dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, selain disebabkan oleh kecilnya kesempatan yang diberikan oleh pemilik atau pengontrak usaha pariwisata di desa setempat, juga disebabkan oleh pengaruh internal masyarakat setempat. Generasi muda dari Desa Wisata Jatiluwih lebih tertarik bekerja di luar desa mereka. Hal ini karena besarnya faktor penarik yang berasal dari luar desa mereka, khususnya dari daya tarik wisata yang sudah maju dan terkenal yang ada di Bali, seperti: Tanah Lot, Kuta, Nusa Dua, Sanur, Candidasa, dan Lovina serta daya tarik bekerja ke kapal pesiar. Dengan kuatnya daya tarik yang berasal dari destinasi wisata yang sudah maju dan berkembang itu, membuat para pekerja yang memiliki keahlian dan kemampuan, yakni lebih banyak terserap bekerja ke luar desa setempat atau ke destinasi wisata yang sudah maju dan terkenal.

Larinya generasi muda desa setempat untuk bekerja ke destinasi wisata yang sudah maju dan terkenal di perkotaan, menurut Giddens (dalam Abdullah, 2006:38) merupakan *emancipatory politics* dan *life politics*. Sebagai *emancipatory politics*, konsumsi perkotaan membebaskan manusia dari hambatan-hambatan posisi sosial tradisional. Selanjutnya, sebagai *life politics*, konsumsi perkotaan yang dilakukan oleh generasi muda Desa Wisata Jatiluwih merupakan politik aktualisasi diri dalam lingkungan yang terorganisasi secara reflektif, dalam hal ini refleksivitas menghubungkan diri dan tumbuh ke dalam sistem global.

Masyarakat yang terserap bekerja pada usaha pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, meskipun jumlahnya masih sangat kecil, telah merasakan adanya peningkatan pendapatan dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya yang mereka tekuni. Peningkatan pendapat ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka, baik dilihat dari sisi *artha*, *dharma*, dan *kama*.

Dalam kerangka meningkatkan kualitas pengembangan pariwisata, lebih tertariknya pemuda setempat bekerja di luar desa mereka merupakan bentuk peningkatan terhadap pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), di samping juga merupakan penarik datangnya pekerja pendatang dari luar Desa Wisata Jatiluwih. Untuk itu, perlu ditanamkan sedini mungkin kepada para calon tenaga

kerja dari desa wisata tentang kearifan lokal *jele melah gelahang*, artinya hasil apa pun yang terjadi pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, sepatutnya masyarakat setempat yang memenuhi kualifikasi tetap menjadi pemain inti di antara pekerja yang bekerja pada usaha pariwisata yang ada di desa wisata tersebut.

Dalam konteks pergeseran tempat, berpindahnya sebagian generasi muda Desa Wisata Jatiluwih bekerja ke kota, menurut Appadurai (dalam Abdullah, 2006:38) telah menghilangkan batas-batas kebudayaan karena kota memiliki *landscape* dan *ethnoscape* yang berbeda dengan desa. Dalam kondisi seperti ini, menurut Anderson dan Friedman (dalam Abdullah, 2006:38) yang patut dipertanyakan kepada generasi muda tersebut adalah masalah identitas ke-lokal-an mereka. Identitas ke-lokal-an yang dipertanyakan, tidak saja menyangkut gaya hidup mereka setelah bergaul dan mengonsumsi modernitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana generasi muda tersebut melakukan reproduksi lokalitas, terutama yang terkait dengan pengembangan pariwisata di desa asalnya. Reproduksi lokalitas ini menjadi penting karena dapat dijadikan pendorong bagi pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, meskipun generasi muda tersebut tidak bekerja secara langsung pada usaha pariwisata di desa setempat.

4. Pelecehan *Trihita Karana* (*Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan*)

Sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan dalam memahami kebudayaan Bali pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, berdampak pada terjadinya pelecehan terhadap *trihita karana*, salah satunya terhadap *parhyangan*. Pelecehan terhadap *parhyangan* ini berupa pelecehan radius kesucian Pura Luhur Petali sebagai pura *dang kahyangan* di desa setempat, terjadi karena adanya pembangunan Vila Petali.

Pembangunan Vila Petali yang berada di kawasan suci pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, yakni menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara pihak-pihak terkait. Pada pembangunan tersebut, masyarakat setempat yang menolak kehadiran Vila Petali bersama-sama dengan elite desa ingin mempertahankan keberadaan hutan yang berada pada kawasan suci dan disucikan oleh masyarakat sesuai kearifan lokal *wana kerthi*. Hal ini juga diperkuat dengan *bhisama* tentang kesucian pura dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI Pusat) sesuai keputusannya Nomor 11/Kep./I/PHDIP/1994.

Masuknya kapitalisme ke pedesaan adalah sebagai akumulasi primitif (*primitive accumulation*) yang merupakan suatu kekuatan pengubah Orde [tatanan] Lama pra-kapitalis menuju pada terbentuknya Orde [tatanan] Baru yang kapitalis. Pada masyarakat desa, akumulasi primitif ini setidaknya dapat dilihat pada dua hal, yaitu (1) adanya negaraisasi tanah dan kekayaan alam kepunyaan rakyat melalui hukum atau kekerasan, kemudian untuk lembaga-lembaga negara (birokrasi pemerintah, pengadilan, dan lain-lain) yang memberikan hak-hak baru kepada pihak pengusaha/proyek lain; dan (2) konsentrasi tanah dan kekayaan alam melalui proses sosial-ekonomi, baik berbentuk transaksi ekonomi jual beli maupun berbentuk ekstra ekonomi seperti gadai atau sejenisnya. Kedua bentuk akumulasi primitif ini jelas terlepas dari akses dan kontrol petani yang ada di pedesaan.

Mengutip Seda (1996:272) terdapat lima prinsip kapitalisme, yaitu (1) kapitalisme adalah pengakuan penuh pada hak milik perorangan atau individu tanpa batas-batas tertentu. Hak milik pribadi adalah jaminan bagi individu yang bersangkutan untuk menegakkan kebebasan dan kemerdekaan; (2) kapitalisme merupakan pengakuan akan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi; (3) kapitalisme adalah pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi dalam bentuk semangat untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya; (4) kapitalisme adalah pengakuan adanya kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain; dan (5) kapitalisme mengakui berlakunya hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar.

Kehadiran kapitalisme ke Desa Wisata Jatiluwih telah mengorbankan matra *parhyangan* karena dibangunnya Vila Petali yang mencaplok wilayah kesucian Pura Luhur Petali. Pembangunan Vila Petali pada radius kesucian Pura Luhur Petali merupakan pelecehan sekaligus telah diabaikannya kekuatan spiritual yang hidup dalam masyarakat yang menjadi *pengempon* pura tersebut.

Mengacu pada *bhisama* tentang kesucian pura, telah diatur ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyengker*. Untuk pura *sadkahyangan* dipakai ukuran *apeneleng agung* (minimal lima kilometer dari pura) dan untuk pura *dang kahyangan* dipakai ukuran *apeneleng alit* (minimal dua kilometer dari pura). Selanjutnya, untuk pura *kahyangan tiga* dan lain-lain dipakai ukuran *apenimpug* dan *apenyengker*. Ukuran

minimal tersebut adalah batas minimal dari pura yang diperbolehkan untuk melakukan pembangunan.

Pada kasus pembangunan Vila Petali yang berada di sebelah utara Pura Luhur Petali sebagai pura *dang kahyangan*, vila ini sudah melanggar *bhisama* kesucian pura dan juga telah mengganggu pura tersebut karena berada pada jarak kurang dari dua kilometer (padahal menurut *bhisama* seharusnya minimal dua kilometer). Hal ini berarti tidak sesuai dengan aturan *apeneleng alit*.

35
Untuk mengatur keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan, dalam kearifan lokal Bali dikenal adanya konsep *trihita karana* yang meliputi tingkat kehidupan mikro (keluarga), meso (*desa adat*), dan makro (daerah). Secara mikro (keluarga), *trihita karana* terwujud dalam (1) individu-individu anggota keluarga sebagai *pawongan*, (2) rumah dan pekarangan sebagai *pelemahan*, dan (3) *merajan* atau *sanggah* sebagai *parhyangan*. Secara meso (*desa adat*, desa, dan seterusnya) dan secara makro (daerah), *trihita karana* terwujud dalam (1) masyarakat sebagai *pawongan*, (2) lingkungan teritorial atau wilayah sebagai *palemahan*, dan (3) pura yang ada di wilayah tersebut sebagai *parhyangan*. Selain *trihita karana*, di Bali juga dikenal kearifan lokal (*local genius*) seperti konsep *sukla* dan *leteh* atau antara suci dan tidak suci. Selanjutnya, dalam tata letak bangunan, di Bali dikenal adanya *trimandala*, dengan peruntukkan sebagai berikut: (1) tempat suci berada pada *utama mandala*, (2) perumahan atau pemukiman berada pada *madya mandala*, dan (3) tempat-tempat yang kotor, seperti: kamar mandi, kandang hewan berada pada *nista mandala*.

Dalam hal ini, jika keberadaan Pura Luhur Petali dikaitkan dengan ketiga *lokal genius* di atas, maka Pura Luhur Petali merupakan *parhyangan* (dari sisi *trihita karana*), Pura Luhur Petali merupakan kawasan *sukla* (dari sisi *sukla* dan *leteh*) dan Pura Luhur Petali berada pada *utama mandala* (dari sisi *trimandala*). Sebagai pura *dang kahyangan*, Pura Luhur Petali memiliki radius kesucian *apeneleng alit* atau dua kilometer yang titik pusatnya adalah Pura Luhur Petali.

Dalam RDTR tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005, khususnya pada Pasal 14, Ayat (5) butir b) menyebutkan kebijakan pengelolaan sebagai berikut.

Bangunan yang telah ada dan ternyata melanggar radius kawasan suci/tempat suci diberlakukan tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1. bila pelanggaran yang terjadi meresahkan masyarakat dan berdampak luas/lintas kabupaten dan kota dikenakan pembongkaran;
2. bila pelanggaran meresahkan masyarakat dan berdampak lokal, dikenakan pembatasan umur bangunan maksimum lima tahun dan setelah itu dibongkar; dan
3. apabila pelanggaran berdampak kecil dikenakan pemberian status quo (bangunan boleh dimanfaatkan sampai kondisi bangunan rusak, dengan tanpa melakukan perbaikan).

Dari tiga butir kebijakan pengelolaan di atas jika dikaitkan dengan bangunan yang melanggar kesucian pura terlihat subjektivitas dalam menegakkan kebijakan terkait pelanggaran yang terjadi. Subjektivitas tersebut terutama terhadap cara pandang pada dampak [akibat] yang ditimbulkan bangunan yang melanggar radius kesucian pura. Padahal seharusnya tindakan untuk melindungi kesucian pura sebagai sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, penggunaan kata-kata "berdampak lokal" dan "berdampak kecil" juga memiliki arti yang sangat abstrak dan subjektif. Berdampak lokal bisa diartikan sebagai lokal desa setempat, lokal Kabupaten Tabanan, atau lokal Provinsi Bali. Kemudian, berdampak kecil juga sangat abstrak untuk diartikan. Penggunaan kata-kata seperti ini, menurut Foucault (dalam Lubis, 2006:151) menganggap manusia lebih ditentukan oleh struktur/sistem (sosial, politik, ekonomi, dan bahasa) yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, pikiran manusia diciptakan atau dikonstruksi oleh bahasa/budaya. Lebih lanjut menurut Foucault, hal ini merupakan kematian manusia (*the death of man*).

Pihak-pihak yang mendukung keberadaan Vila Petali mengklaim bahwa kegiatan di vila tersebut tidak akan menimbulkan *leteh* bagi pura sekitarnya. Menurut mereka, orang-orang yang singgah ke vila tersebut adalah mereka yang sedang melaksanakan kegiatan wisata berjalan menyusuri hutan (*trecking*), dan biasanya adalah wisatawan yang berpendidikan, mengerti alam, dan sangat menghormati budaya dan adat istiadat setempat.

Perbedaan sudut pandang antara pihak yang menolak dan mendukung keberadaan Vila Petali memberikan gambaran bahwa "pemaknaan kesucian pura" didekonstruksi oleh logika komodifikasi. Masyarakat desa setempat yang berpegang pada ideologi

trihita karana pantang untuk mengkomodifikasi wilayah kesucian pura, sedangkan masyarakat yang berlogika komodifikasi menganggap wilayah kesucian pura sebagai komoditas untuk dijual ke pasar. Menurut Habermas (dalam Atmadja dkk., 2008:247-248) pendukung logika komodifikasi terjebak dalam rasionalitas instrumental yang berimplikasi pada pemaknaan zona suci pura, yakni bukan sebagai zona protektif kesakralan, melainkan sebagai instrumen untuk mendapatkan uang. Lebih lanjut, menurut Atmadja, logika komodifikasi menguasai para aktor yang terlibat dalam desakralisasi zona suci pura, dan bisa pula menjangkiti *pengempon* pura.

Dengan terjadinya kekisruhan pada penegakan tata ruang sebagai akibat dilanggarnya kawasan suci oleh pembangunan vila-vila, membuat wakil rakyat yang merupakan representasi masyarakat ikut memberikan pendapatnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi, DPRD Bali melalui Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Raperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah membahas masalah kawasan suci, baik berorientasi pada kondisi riil yang terjadi di lapangan maupun berdasarkan peraturan daerah (perda) yang berlaku. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dalam pandangan umumnya menyampaikan sebagai berikut.

”... Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah yang sudah barang tentu mengatur dan mengikat seluruh kabupaten/kota yang ada di Bali. Karena bersifat mengikat, maka pemerintah kabupaten/kota wajib taat dan patuh terhadap perda dimaksud. Selanjutnya, dalam menetapkan perda di tingkat kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Misalnya, perda tentang tata ruang yang mengatur kawasan suci, kondisi riil yang terjadi di lapangan kawasan suci dimaksud dilanggar oleh kabupaten/kota.”
(Majalah DPRD Bali, Triwulan II, Tahun 2008, hal. 2)

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (F-PG) juga ikut menyuarakan tentang kawasan suci. Fraksi ini dalam pandangan umumnya menyampaikan sebagai berikut.

”... tentang kewenangan pemerintah provinsi agar dapat dijalankan secara konsisten dan tidak tumpang tindih dengan kabupaten/kota mengingat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini tentang pemanfaatan lahan, seperti: hutan, danau, kawasan suci, dan lain-lain yang menjadi polemik belakangan ini, menurut pandangan kami adalah sebagai akibat kurangnya pemahaman

tentang kewenangan urusan pemerintahan sehingga investasi yang seharusnya melalui pemerintah provinsi, diambil alih oleh kabupaten/kota.” (Majalah DPRD Bali, Triwulan II, Tahun 2008, hal. 10)

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat [Daerah] yang merupakan representasi masyarakat sudah mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar benar-benar memperhatikan implementasi dari perda tentang tata ruang serta *bhisama* kesucian pura, tetapi tuntutan tersebut tidak berarti apa-apa bagi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan betapa mekanisme demokrasi sudah berjalan, tetapi kekuatan hegemoni jauh lebih dahsyat sehingga mengalahkan segala hal yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat. Begitu kuatnya hegemoni merasuki masyarakat yang mendukung keberadaan Vila Petali sehingga mereka rela mengorbankan religiusitas yang sudah jauh tertanam di hati mereka serta di hati para *leluhur*-nya. Pengorbanan religiusitas ini merupakan suatu keterpaksaan yang dilakukan oleh masyarakat karena sudah sangat tidak berdaya menghadapi hegemoni pemerintah.

Pelanggaran terhadap isi *bhisama* kesucian pura oleh kapitalisme sebagai akibat penafsiran yang dilakukan, perlu dilakukan dekonstruksi sehingga menurut Lubis (2004:103) akan diperoleh makna baru sesuai dengan apa yang diharapkan oleh *bhisama* tentang kesucian pura. Menurut Atmadja dkk. (2008:249) dekonstruksi terhadap makna kawasan (zona) suci pura sudah terjadi, yakni zona suci sebagai ruang yang mematikan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal serta zona suci sebagai simbol ketidakadilan. Pemaknaan terhadap zona suci sebagai simbol ketidakadilan terjadi karena masalah yang sama dijumpai pada pura lain, tetapi berada pada posisi pembiaran.

Munculnya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Surat Keputusan tentang Kawasan Wisata serta Penetapan Daya Tarik Wisata Bali menyiratkan telah dibukanya ruang-ruang (*space*) yang ada di Bali bagi kepentingan pariwisata. Dalam hal ini tampak bahwa keputusan dan perencanaan terkait dengan implementasi program-program pembangunan di bidang pariwisata pada masa Orde Baru datang dari atas (*top down*), dan masyarakat di tingkat akar rumput kurang dilibatkan dalam perencanaan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat dibuat terkejut karena secara tiba-tiba mereka harus melaksanakan program-program pembangunan, yang sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahui pembangunan yang

akan dilaksanakan. Dengan mengorbankan perasaan, martabat, serta harga diri, mereka terpaksa menerima program-program pembangunan tersebut.

Dengan semakin dikenalnya Desa Wisata Jatiluwih, mengakibatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung menarik pemilik modal besar (investor) menanamkan modalnya dalam bentuk pengembangan sarana kepariwisataan di lokasi-lokasi yang strategis di desa tersebut. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2005 tentang RDTR Kawasan Pelestarian Alam dan Budaya Jatiluwih, luas wilayah perencanaan mencapai 2.233 hektar. Dari luas wilayah perencanaan tersebut, khusus untuk kawasan budi daya pariwisata diarahkan pada pembangunan fasilitas daya tarik wisata berupa pondok wisata (*homestay*) maksimum tiga kamar per unit bangunan dengan fasilitas makan dan minum, tempat-tempat peninjauan/pengamatan panorama, serta fasilitas atraksi wisata seperti *trekking* dan agrowisata. Pengembangan fasilitas daya tarik wisata pada kawasan pemukiman dilakukan secara berbaur, terutama pada pengembangan pondok-pondok wisata serta fasilitas makan dan minum.



Gambar 6.1

Hutan Lokasi Vila Petali di Desa Wisata Jatiluwih

Dengan dibangunnya vila di atas tanah di tengah hutan seperti Gambar 6.1, berarti ada perbedaan kepentingan dalam penggunaan tanah. Berkaitan dengan hal ini, Aditjondro (1995) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan dalam penggunaan tanah potensial menimbulkan konflik tanah. Konflik tanah mencakup konflik-konflik internal yang terdiri atas konflik kelas, konflik adat, dan konflik gender. Selanjutnya, konflik eksternal, yakni terdiri atas konflik antara negara dengan warga negara, konflik antar sistem ekonomi, konflik antar ekosistem, konflik mayoritas dan minoritas, dan konflik

ekologi politik khas Asia Tenggara (lihat Metera, 1996). Dalam pembangunan Vila Petali, karena tanah yang dibangun tersebut berada pada radius kesucian pura, maka fenomena konflik yang muncul adalah antara warga negara (masyarakat) dengan negara (pemerintah), di samping juga konflik ekologi terkait dengan ketersediaan air bagi kesinambungan kegiatan pertanian rakyat dan perusahaan perkebunan.

Jika konflik tersebut dikaitkan dengan ideologi *trihita karana* yang menekankan pada keharmonisan hubungan pada aras *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, maka konflik tersebut menurut Atmadja dkk. (2008:256) karena adanya perbedaan anutan ideologi. Kelompok pro-vila mendukung neoliberalisme, sedangkan kelompok pro-*bhisama* mendukung ideologi *trihita karana*. Lebih lanjut Atmadja dkk. (2008:245) menyatakan bahwa roh neoliberalisme adalah keserakahan.

Kehadiran Vila Petali dan juga penjaga vila lengkap dengan aktivitas kesehariannya, berpengaruh terhadap lingkungan (*palemahan*), terutama terhadap ketersediaan air. Ketersediaan air di desa ini dapat terancam karena aktivitas kehidupan sehari-hari di vila tersebut (seperti membersihkan vila, mandi, memasak, mencuci, termasuk menyiram tanaman hias yang ditanam di sekitar vila) mempergunakan air tanah yang ada di tengah hutan. Keterancaman terhadap air tidak saja terhadap kehidupan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih, tetapi juga terhadap aktivitas pertanian. Masyarakat tidak banyak yang mempermasalahkan tentang air pada pembangunan vila tersebut. Mereka sebenarnya memahami akan pentingnya air, baik untuk kehidupan mereka maupun untuk kepentingan sawah-sawah pertanian. Mereka lebih banyak memperbincangkan tentang kawasan suci pura, dengan harapan apabila masalah vila tersebut terselesaikan, maka secara otomatis permasalahan air juga akan terselesaikan.

Pembangunan di tengah hutan, di samping merusak flora, fauna, serta sumber daya lainnya yang ada di hutan juga akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan hutan untuk menyimpan air hujan sebagai air tanah. Dalam hal ini ditambah lagi dengan pengambilan air tanah di tengah hutan, maka semakin mengurangi ketersediaan air tanah di hutan. Tampak bahwa orientasi pembangunan Vila Petali lebih banyak bermotif ekonomi daripada mempertimbangkan aspek ekologi atau aspek *palemahan*. Menurut Susilo (2003:2) pembangunan yang berorientasi ekonomi kerap akan menciptakan dekomposisi ekologi. Dekomposisi ekologi adalah suatu keadaan tidak adanya komposisi

yang ideal dalam suatu sistem ekologi tertentu akibat intervensi manusia yang berlebihan untuk tujuan yang dimilikinya terhadap sistem ekologi tersebut.

Dalam pembangunan Vila Petali, dekomposisi ekologi berupa berkurangnya ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya terkait dengan kebutuhan air oleh petani dalam pengerjaan sawah. Akibatnya, setelah panen padi, petani desa setempat saling "adu cepat" untuk memulai mengolah tanah sawah karena berebut air. Hal ini menyebabkan [sebagian] petani yang seharusnya tidak membakar jerami sebelum mengolah tanah sawah, kemudian menjadi membakar jerami karena takut kehabisan air. Oleh karena air dan sawah di Bali selalu berhubungan dengan organisasi tradisional *subak*, maka *subak* pun mendapat ancaman.

Menurut Arthanegara (2005) *subak* adalah sistem pengelolaan air yang dilakukan oleh petani di Bali berdasarkan filosofi *trihita karana*. Ekosistem *subak* adalah semua elemen yang terdapat dalam pengelolaan *subak* dan setiap elemen merupakan mata rantai jaring kehidupan dari *subak* serta setiap elemen saling memberikan pengaruh pada kehidupannya. Elemen-elemen yang terdapat dalam ekosistem *subak* meliputi petani, lahan sawah, sumber air, jaringan irigasi, peralatan untuk pengolahan tanah, ternak, unsur *parhyangan*, semua unsur *palemahan*, dan unsur *pawongan*, termasuk *awig-awig*.

Kenyataan yang terjadi sekarang, memang *subak* masih eksis. Namun, dari beberapa anggota masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani mengaku ketersediaan air untuk mengairi sawah sudah semakin berkurang, terutama setelah selesai panen padi bali. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perebutan air di antara petani yang berpotensi menimbulkan konflik di antara petani. Di samping itu, oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijadikan alasan untuk melanggengkan hegemoni pengalihan sawah menjadi tempat untuk membangun sarana yang diperlukan oleh pengembangan pariwisata.

Masalah ekologi sebagai implementasi dari matra *pawongan* dan matra *palemahan* tidak saja muncul pada pemerintahan Orde Baru, tetapi juga muncul kembali di Orde Reformasi, yakni dengan kondisi yang lebih parah sebagai akibat pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sebagai akibat keinginan untuk memperbesar pendapatan asli daerah (PAD). Fenomena ini menurut Bagus (2004:285) merupakan tantangan berat dalam pemerintahan Orde Reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengusung desentralisasi lewat otonomi daerahnya. Otonomi daerah sesungguhnya mengandung suatu itikad baik, yakni keinginan untuk mewujudkan kemandirian yang bertanggung jawab dan kemerdekaan pembangunan yang benar-benar "dari bawah", tetapi dalam pelaksanaannya, yakni karena kewenangan pemerintah terletak di aras kabupaten/kota dan bukan di provinsi, tidak terhindarkan kemunculan sejumlah dampak negatifnya.

Pembangunan Vila Petali lebih mementingkan libido kapitalis untuk memiliki vila di kawasan suci sekaligus untuk mempertontonkan identitas sosial atau kelas sebagai orang kaya baru (OKB). Dengan pembangunan vila tersebut, masyarakat Desa Wisata Jatiluwih akan terjebak pada satu ironi. Di satu sisi mereka tetap ingin berpegang pada ideologi *trihita karana*, sedangkan di sisi lain (Atmadja dkk., 2008:261) mereka terlibat pada sekularisasi spiritual dan libidinalisasi spiritualitas, disebut sebagai *hibrid-spiritualitas*.

Menurut Piliang (2007:175), wacana *hibrid-spiritualitas* adalah sebuah wacana yang di dalamnya spiritualitas melakukan proses kawin silang (*hibridity*) dengan wacana keduniaan di dalam ruang kontradiksi. *Hibrid-spiritualitas* adalah kawin silang dua kekuatan bertentangan atau lebih menjadi satu kekuatan kontradiktif, yaitu ketuhanan/konsumerisme, transenden/imanen, dan kesucian/kedangkalan. *Hibrid-spiritualitas* adalah ruang hasrat yang di dalamnya mesin-mesin kecepatan (*domology*) melakukan simbiosis dengan mesin kekhususan.

E. MAKNA PENGEMBANGAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DESA WISATA JATILUWIH

Pengertian "makna" pertama kali dikemukakan oleh C.K. Ogden dan I.A. Richards tahun 1923 dalam bukunya yang berjudul *The Meaning of Meaning*. Dengan mengintroduksi pendapat Hirsch, Juhl (1980:27) membedakan pengertian "arti" dan "makna". Dalam hal ini "arti" direpresentasikan oleh teks, sedangkan "makna" merupakan hubungan antara arti, person, konsep, situasi, dan segala sesuatu yang diimajinasikan, di samping makna berbeda-beda sesuai dengan situasi pembaca.

Lebih lanjut, menurut Leech (1983:9-23), untuk memperjelas perbedaan antara "arti" dan "makna", dikemukakan tujuh tipe makna, yakni sebagai berikut: (a) makna

konseptual, makna denotatif atau kognitif, sebagai makna utama bahasa; (b) makna konotatif, apa yang diacu melebihi maknanya secara konseptual, sebagai ciri-ciri umum bahasa sastra; (c) makna stilistik, apa yang dikomunikasikan secara sosial; (d) makna efektif, apa yang dikomunikasikan dari sikap penulis; (e) makna reflektif, apa yang diasosiasikan dari ekspresi yang sama; (f) makna kolokatif, asosiasi yang diperoleh melalui kata-kata yang muncul dalam lingkungannya; (g) makna tematik, makna menurut cara penulis dalam menata pesannya. Selain itu, menurut Huda (2005:195), kepada pembaca ditekankan untuk menemukan makna-makna dan pemikiran yang tertuang dalam sebuah tekstual serta konteksnya dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Artinya, budaya atau kehidupan sosial ditempatkan sebagai sebuah teks yang dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan. Dengan demikian, menurut Palmer (2005:14-36) ada tiga makna dasar tentang interpretasi yang diungkap, yaitu (1) mengedepan atau mengungkapkan kata-kata, (2) menjelaskan atau mempertegas, dan (3) menerjemahkan, seperti dalam sebuah transliterasi bahasa.

Pengungkapan makna terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih mengandung berbagai makna tergantung sudut pandang pembacanya, artinya tidak ada makna tunggal. Menurut Derrida (dalam Lajar, 2005:172-173) ada kebebasan untuk mengeksplorasi realitas sehingga membawa keberagaman makna yang sangat menekankan keanekaragaman cara berpikir, terhadap realitas yang ada. Hal ini jelas dapat dipergunakan untuk melihat makna keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. Adapun makna pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih adalah sebagai berikut.

1. Makna Kesejahteraan

Kata "kesejahteraan" dan "kebahagiaan" memiliki pengertian yang sama. Kedua kata tersebut memiliki arti yang amat mirip antara satu dengan yang lainnya. Seseorang merasa bahagia kalau orang itu sejahtera, sebaliknya seseorang merasa sejahtera kalau orang itu bahagia. Dalam menilai kesejahteraan dengan ukuran di atas hanya dipergunakan sebagai pembandingan terhadap konsep kesejahteraan yang ada di masyarakat.

Masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu mengajarkan kepada setiap umatnya untuk mencapai *jagaddhita* dan *moksartham*. *Jagaddhita* adalah tujuan agama Hindu untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan kelestarian alam sekitarnya. Kebahagiaan duniawi dimaksudkan adalah meliputi *dharma*, *artha*, dan *kama*. *Dharma* adalah kebahagiaan yang bersifat spiritual-keagamaan, yaitu penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran, nilai-nilai, norma-norma agama, serta tertib hukum dalam kehidupan. *Artha* adalah kebahagiaan manusia yang menyangkut kebutuhan yang berkaitan dengan material, yaitu makanan, pakaian, perumahan, dan keperluan ekonomi lainnya. *Kama* merupakan kebahagiaan manusia nonmaterial, seperti kasih sayang, kesetiaan, kebersamaan, hubungan seks, dan sebagainya. Menurut Gorda (1996:27) seluruh aspek *jagaddhita* dapat diwujudkan, dinikmati dan dirasakan oleh manusia pada saat hidup di dunia ini.

Berdasarkan pengamatan dan diskusi yang dilakukan dengan beberapa masyarakat, secara umum masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih merasa sejahtera kalau mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mampu melaksanakan upacara ritual secara teratur dan berkesinambungan, yaitu *pancayadnya* (*dewa yadnya*, *rsi yadnya*, *bbhuta yadnya*, *manusa yadnya*, dan *pitra yadnya*). Dengan demikian, tujuan masyarakat di sana hampir boleh dikatakan sama dengan tujuan seluruh umat Hindu, yaitu mencapai keseimbangan dan kebahagiaan hidup di dunia ini, yaitu sesuai *caturpurusa artha*.

Pelaksanaan upacara ritual menjadi simbol harmoni lahir batin. Oleh karena setiap manusia yang ber-*yadnya* dapat memenuhi kesejahteraan secara seimbang, baik fisik maupun spiritualnya. Secara lahir berarti sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi. Jika kebutuhan fisik ini sudah terpenuhi, maka dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan mereka akan merasa tenang sehingga mampu menciptakan konsentrasi yang terfokus pada pelaksanaan pemujaan kepada Tuhan (Sutrisno, 2005:190-199). Dengan demikian, seseorang atau masyarakat yang memiliki kedua unsur ini akan tercermin pada kehidupan yang *moksartham jagaddhita* memperoleh kebahagiaan lahir batin secara seimbang dan berkesinambungan ada dalam pengalaman spiritual, sosial, dan ekonomi (Pendit, 1993:112-113).

Pelaksanaan upacara yang terkait dengan ritual pengolahan sawah serta upacara *pancayadnya* membutuhkan sarana yang cukup banyak untuk menyukseskan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, maka terjadi proses jual-beli sarana upacara, seperti: beras, ketan, janur, bunga, buah-buahan, umbi-umbian, dedaunan, telur, hingga binatang yang dijadikan korban (Suardika, 2006:9-11). Kebutuhan tersebut tidak saja untuk upacara, tetapi juga untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti ini proses jual beli akan terjadi sehingga hukum pasar akan terjadi, yaitu ada yang menjual dan ada yang membeli. Kebutuhan akan sarana upacara tersebut tidak saja dipenuhi oleh warga masyarakat Hindu Bali, tetapi sebagian besar sudah dilakukan oleh masyarakat non-Hindu dari luar Bali (Suardika, 2006:10-11 dan Kerepun, 2007:121-127).

Dalam hal ini hasil penelitian seorang antropolog dari University of Auckland, Greame MacRae mengemukakan bahwa hampir keseluruhan waktu, tenaga, dan biaya terkait uang warga masyarakat Hindu Bali digunakan untuk kepentingan/kegiatan upacara agama, kegiatan adat, kegiatan seni, dan kegiatan budaya serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kegiatan ini melahirkan produk wisata yang mempunyai nilai jual tinggi dalam bisnis kepariwisataan (Kerepun, 2007:92-93). Masyarakat Bali mampu memproduksi berbagai bentuk upacara keagamaan yang tujuan utamanya ber-*yadnya*, seperti upacara pada proses penanaman padi yang dikenal sebagai *pula pali metandur padi bali ring carik* di Desa Wisata Jatiluwih.

Dalam kenyataannya *event* yang berupa upacara keagamaan secara tidak langsung memang akan dinikmati oleh wisatawan. Wisatawan tertarik menikmati karena warga masyarakat Hindu di Bali ingin berbuat yang terbaik dan terindah dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan (Geertz, 1992:129-146). Selanjutnya, untuk kepentingan dan keperluan pemujaan atau merealisasikan kehidupan beragama yang secara vertikal ditujukan kepada sang Pencipta, mereka berusaha membuat serta menghaturkan yang terbaik dan benar (Sutrisno, 2005:190-199) berdasarkan ajaran susila dan filosofi agama. Dalam hal ini, Bali ini unik karena ekspresi budaya yang terpancar berlandaskan ajaran agama Hindu. Menyatunya antara agama Hindu, budaya, dan adat secara harmonis dengan mengambil bentuk ritual keagamaan. Pelaksanaan upacara ritual keagamaan

seperti pada penanaman padi bali di Desa Wisata Jatiluwih akan dapat menumbuhkan kehidupan beragama (Setia, 1993:58).

Dalam hal ini bagi wisatawan, kehadiran mereka di Desa Wisata Jatiluwih untuk menyaksikan peristiwa budaya dan seni sebagai satu kasatuan sebagai Daya Tarik Wisata Desa Wisata Jatiluwih merupakan suatu aktivitas yang penuh makna kehidupan masyarakat (Soedarsono, 1999:119-121). Oleh karena pelaksanaan upacara-upacara keagamaan merupakan peristiwa budaya yang penuh dengan simbol-simbol sehingga wisatawan tertarik untuk menyaksikannya.

Simbol-simbol diangkat dari dunia material atau benda yang konkret yang pada dasarnya berfungsi untuk menjembatani dunia *niskala* dengan *skala*. Simbol mengandung kekuatan sakral, keramat, membangkitkan kesadaran spiritual, rasa hormat, takut, dan menarik serta mengasikan. Simbol tersebut tidak saja berupa *image* untuk membangkitkan kesadaran pemeluk agama dengan mendekati manusia pada realitas yang disimbolkan, tetapi juga mengomunikasikan realitas supernatural yang spiritual kepada manusia (Hendropuspito, 1983:100-101). Dalam hal ini benda-benda simbol tidak saja berfungsi untuk memperjelas dan mengartikulasikan yang ritual religius sebagai suatu yang sakral, tetapi menghadirkan serta memberi "nyawa" (Khan, 2002:239) dalam setiap pelaksanaan upacara keagamaan.

Pelaksanaan upacara *manusa yadnya*, *pitra yadnya*, dan *bhuta yadnya* juga mengalami peningkatan sebagai akibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan demikian, perolehan *artha* yang dibingkai oleh *dharma*, maka *artha* tersebut akan berkualitas dan berkesinambungan. Tata cara memperoleh *artha* juga dibingkai oleh *dharma* karena dilihat dari aspek kultural hal tersebut sebagai salah satu wujud *etika*. Hal ini telah ditunjukkan bahwa hasil ekonomi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan batiniah dengan cara melaksanakan *yadnya* yang berkualitas.

Makna kesejahteraan dari aspek budaya kiranya belum lengkap apabila tidak dibarengi dengan aspek keberlanjutan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Aspek keberlanjutan lingkungan terdiri atas ekologi pertanian (*subak*) dengan terasering sawah serta budaya pertaniannya. Menurut Adrian Philips, Direktur Komisi Pedesaan untuk Inggris dan Wales (dalam Boniface, 1999:34), menyatakan bahwa suatu unsur

warisan budaya biasanya berada dalam satu konteks sehingga untuk pemeliharaan konteks tersebut harus bersifat dukungan, dalam hal ini kepariwisataan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keadaan ini. Dengan demikian, pengusulan *Subak* Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia merupakan dukungan bagi pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat tidak saja dapat diciptakan melalui pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata secara langsung, tetapi dapat juga diciptakan melalui pelibatan masyarakat secara tidak langsung, antara lain melalui usaha peternakan. Jenis ternak yang terdapat di Desa Wisata Jatiluwih, yakni (1) ayam kampung, pada tahun 1991 sebanyak 2.150 ekor, kemudian tahun 2006 menjadi 2.766 ekor; (2) ayam ras, pada tahun 1991 sebanyak 21.800 ekor, kemudian pada tahun 2006 menjadi 350.000 ekor; (3) itik, pada tahun 1991 sebanyak 20 ekor, kemudian pada tahun 2006 menjadi 1000 ekor; (4) sapi, pada tahun 1991 sebanyak 274 ekor, kemudian pada tahun 2006 menjadi 1.366 ekor; (5) kuda, pada tahun 1991 sebanyak 1 ekor, kemudian pada tahun 2006 tidak ada; dan (6) babi, pada tahun 1991 sebanyak 1.307 ekor, kemudian pada tahun 2006 menjadi 1.622. Jika pada tahun 1991 tidak ada kerbau, maka tahun 2006 terdapat 25 kerbau di desa setempat (Hasil Survei FT UGM Tahun 1991 dan Kecamatan Penebel dalam Angka 2006/2007).

Kesejahteraan dapat juga dilihat dari segi mental. Sesuai indikator PBB, kesejahteraan dari segi mental ini diukur dari tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh masyarakat Desa Wisata Jatiluwih dapat diuraikan sebagai berikut (1) tamat SLTP atau sederajat, tahun 1991 sebanyak 42 orang, kemudian pada tahun 2003 menjadi 223 orang; (2) tamat SLTA atau sederajat, tahun 1991 sebanyak 52 orang, kemudian pada tahun 2003 menjadi 250 orang; (3) tamat perguruan tinggi (diploma sampai sarjana), tahun 1991 sebanyak 7 orang, kemudian pada tahun 2003 menjadi 257 orang (Hasil Survei FT UGM Tahun 1991 dan Monografi Desa Jatiluwih Tahun 2003).

Dalam hal ini dilihat dari penggunaan air bersih, dari 803 keluarga yang ada, pada tahun 2006 seluruhnya sudah mempergunakan air bersih dari PAM yang merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, dilihat dari penggunaan bahan bakar untuk memasak, tahun 2006 sebanyak 757 KK mempergunakan

kayu api dan hanya 46 KK yang mempergunakan gas. Kemudian, apabila dilihat dari penggunaan aliran listrik, tahun 2006 sebanyak 798 KK mempergunakan listrik berdaya 251-450 watt dan 5 KK mempergunakan listrik berdaya 451-900 watt.

Dilihat dari mata pencaharian utama penduduk (Tabel 4.4) dapat diuraikan sebagai berikut: (1) pertanian, tahun 1991 sebanyak 1.398 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 1.685 orang; (2) peternakan, tahun 1991 sebanyak 130 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 130 orang; (3) perkebunan, tahun 1991 sebanyak 17 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 112 orang; (4) perdagangan, tahun 1991 sebanyak 12 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 80 orang, (5) industri, tahun 1991 sebanyak 11 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 3 orang; (6) pengangkutan, tahun 1991 sebanyak 54 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 8 orang, dan (7) pemerintahan/jasa, tahun 1991 sebanyak 71 orang, kemudian tahun 2006 menjadi 152 orang (Hasil Survei FT UGM Tahun 1991 dan Kecamatan Penebel dalam Angka 2006/2007).

Dari segi pemilikan kendaraan bermotor, pada tahun 2006 di Desa Wisata Jatiluwih, masyarakat yang memiliki sepeda motor sebanyak 765 orang, kendaraan roda empat berupa sedan sebanyak 4 orang, mini bus sebanyak 5 orang, truk sebanyak 4 orang dan pic-up sebanyak 3 orang. Selain itu, kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya rumah masyarakat desa setempat yang sudah direnovasi mengikuti model rumah modern. Semua itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena peningkatan kesejahteraan dibingkai dengan *dharma* yang ber-*etika*, maka kemungkinan besar kesejahteraan akan dapat berlanjut sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan budaya.

2. Makna Pelestarian

Lingkungan yang lestari merupakan cerminan keberhasilan pengelolaan ekologi, yaitu terkait dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Hubungan manusia dengan lingkungannya (*palemahan*), termasuk juga hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*) dan hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*), yang menjadikan budaya sebagai pedoman sekaligus acuan dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat, budaya, dan lingkungan merupakan hubungan yang saling bersinergi dalam rangka pelestarian lingkungan.

Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih menimbulkan masalah ekologi dan budaya yang serius. Hal ini karena adanya konflik kepentingan yang menyangkut perebutan sumber daya, dalam hal ini adalah sumber daya alam (*natural resources*) yang terbatas, terutama secara fisik menyangkut tanah untuk membangun fasilitas kepariwisataan. Konflik kepentingan terhadap tanah merupakan konflik yang menyangkut ruang, yakni termasuk tanah di dalamnya. Perebutan ruang tersebut semakin meluas, paling tidak meliputi Bali karena tanah-tanah yang ada mengalami alih fungsi dan dipergunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Salah satu yang terjadi di Desa Wisata Jatiluwih adalah alih fungsi tanah hutan karena pembangunan Vila Petali. Lokasi pembangunannya tidak saja berdimensi ruang, tetapi juga terkait dengan budaya karena keberadaan pura-pura di sekitarnya, seperti Pura Luhur Petali. Dalam hal ini sebagai *pengempon* pura ini adalah *Desa Adat* Jatiluwih, dan sebagai *pengceng* adalah Puri Tabanan.

Pura sebagai tempat suci agama Hindu melambangkan alam semesta yang terungkap dari *trimandala* secara horizontal dan vertikal, yakni *jeroan* sebagai *swah loka*, *jaba tengah* gambaran *bwah loka*, dan *jaba sisi* sebagai *bhur loka*. Pada masyarakat Hindu Bali, pura sebagai tempat kediaman para Dewa sehingga dianggap suci (Geldern, 1982:6-8). Pura juga menjadi penghubung alam manusia (*marcapada*) dengan alam dewata (*mayapada*).

Selanjutnya, puri lebih dikenal sebagai istana, sebagai tempat tinggal raja yang sering dihormati, seperti halnya pura. Puri juga merupakan tempat terjadinya kontak-kontak makhluk supernatural dengan para dewa (Geldern, 1982:4-27 dan Agung, 2006:10-11). Pada kenyataannya kedua tempat itu sangat berbeda. Pura sebagai sebuah tatanan Dewata yang kedudukannya lebih tinggi daripada tempat tinggal raja. Puri merupakan puncak dari hierarki politik kekuasaan yang terfragmentasi, sementara pura adalah tempat yang memberikan bentuk terhadap tatanan ritual yang lebih luas (Nordholt, 2006:207). Lebih lanjut, masyarakat Hindu pada umumnya percaya bahwa seorang raja pada zamannya dianggap sebagai *inkarnasi* atau titisan Dewa atau keturunan Dewa terutama Dewa Siwa sebagai Dewa Gunung yang memulai pembangunan dinasti (keturunan raja-raja yang memerintah) (Geldern, 1982:11-17 dan Nordholt, 2006:442-450).

Raja memiliki kekuasaan secara total, politis, dan sekaligus tatanan keagamaan (Soedarsono, 2003:18-27). Hal ini hingga sekarang terpelihara di Bali dalam bangunan jiwa zaman yang berbeda melalui proses peralihan batiniah. Perubahan ini sejalan dengan terbukanya Bali menerima kontak langsung dan tidak langsung dengan dunia luar (Geertz, 1992:136-139), seperti pada pengaruh pariwisata dengan budaya globalnya.

Seiring dengan berjalannya sang waktu, tanggungjawab terhadap pura, termasuk ritual keagamaannya tidak lagi sepenuhnya berada pada keluarga puri, tetapi semakin meluas dan diletakkan pada kekuatan desa. Hal ini berarti pemujaan tidak saja menjadi urusan keluarga raja dengan dinasti-dinastinya, tetapi sudah melibatkan para pengiring, penyangga pura, dan penyangga istana. Dengan demikian, pelaksanaan ritual keagamaan di pura-pura dikenal sebagai peristiwa budaya yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengenali kekuatan "raja-dewa"-nya yang memberikan tuntunan kehidupan hingga ke pelosok desa.

Desa di Bali merupakan satu kesatuan hidup masyarakat yang didasarkan atas kesatuan tempat tinggal dengan batas-batas wilayah yang jelas, yang disebut *payar* (Parimatha, 2004:27). Sebuah desa juga ditandai dengan batas wilayah pemujaan dalam satu kesatuan ⁹⁷ pura yang disebut *kahyangan tiga*, yaitu *pura desa*, *puseh* dan *dalem* (Surpha, 1995:4-22 dan Astika, 1994:112).

Dalam hal ini antara pura, puri, dan desa terdapat relasi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kekuasaan yang dimiliki digunakan sebagai kekuatan politik kekuasaan yang berorientasi pengabdian kepada kemanusiaan (Siswanta, 2006:136). Walaupun kini puri-puri di Bali tidak memiliki kekuasaan seperti zaman kerajaan dahulu (Nordholt, 2006:136), tetapi puri masih tetap memiliki wibawa historis serta keberadaannya masih diakui oleh masyarakat setempat sebagai *pengenceng* pura, seperti pada Pura Luhur Petali (Tim Redaksi Bali Post, 2008:157).

Tata ruang wilayah Provinsi Bali dijiwai oleh agama Hindu yang utuh, serasi, serta seimbang sebagai wadah kehidupan dan kegiatan manusia serta makhluk lainnya sehingga tercapai kebahagiaan penduduk Bali dan ke-*ajeg*-an sumber daya manusia lokal, ¹¹³ sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya lainnya (Windia, 2005). Kekurangtepatan dalam pengelolaan, secara budaya dan secara lingkungan (ekologi), menimbulkan risiko yang dinikmati oleh masyarakat setempat. Risiko yang ditimbulkan

dan dinikmati oleh masyarakat, menurut Giddens (dalam Herwanto, 2005:188) memunculkan *risk society*, yang merupakan kebangkitan masalah-masalah ekologi. Kebangkitan masalah-masalah ekologi membawa kesadaran bahwa kita hidup pada masa yang dicirikan dengan situasi yang tidak dapat diperkirakan dan diwarnai bahaya yang datang secara silih berganti.

Munculnya perilaku yang tidak bersahabat dengan lingkungan yang diperankan oleh masyarakat desa setempat dan masyarakat dari luar pulau agak bertentangan dengan citra yang disandang. Bali yang dikenal memiliki nilai-nilai budaya yang adiluhung dengan citranya sebagai Pulau Sorga Terakhir (Kerepun dalam Ardika, 2005:144) selalu menyatakan bahwa masyarakatnya melaksanakan tindakan yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan sebagai sang Pencipta berlandaskan falsafah *trihita karana*. Berbagai jenis aktivitas keagamaan terkait *pancayadnya* dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Namun, dengan adanya permasalahan ekologi yang timbul, khususnya pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, maka hal ini merupakan suatu ironi terhadap pengembangan pariwisata tersebut. Terlebih-lebih Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia, seharusnya pelanggaran terhadap ekologi dalam kaitan pengembangan pariwisata tidak perlu terjadi atau sedapat mungkin diminimalisir.

Dalam masalah tanah, tidak saja orang luar (pemilik modal) yang perlu disalahkan, orang lokal sering juga berada dalam posisi salah. Menurut Glebet, dalam artikelnya di *Bali Post* tanggal 25 Juni 2004 berjudul "Tanah Bali Tanah Surga", menyebutkan bahwa masalah tanah di Bali disebabkan oleh faktor-faktor internal/lokal, yaitu *dharma*, *artha*, dan *kama*, di samping berbagai faktor eksternal seperti pengembangan pariwisata budaya dengan keinginan penguasaan tanah seluas-luasnya. Faktor-faktor yang menurutnya menyebabkan orang Bali (sebagai pendukung kebudayaan Bali) menjual tanah-tanahnya adalah karena hal-hal berikut. (1) Adanya ritual berbiaya tinggi, dengan tanah yang diwarisi, orang harus mendahulukan upacara agama berupa *pitra yadnya* bagi yang mewariskan. Upacara tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang diperoleh dari penjualan tanah warisan. (2) Adanya keinginan untuk berinvestasi, orang tidak menganggap bertani sebagai pekerjaan bergengsi. Untuk itu, tanah dialihkan untuk modal usaha (bisnis) yang diprediksi lebih menjanjikan.

Padahal ketika usaha bangkrut karena sesuatu hal, tanah sudah hilang karena dijual. (3) Adanya harapan untuk berinvestasi di dunia pendidikan (*ngetohin pianak*) meskipun kesempatan kerja setelah tamat juga sulit. Dalam hal ini apabila gagal, untuk kembali bertani juga tidak bisa, selain karena gengsi, tanah juga sudah habis terjual. (4) Adanya perasaan hedonisme, artinya keinginan untuk hidup secara nikmat dan sepuas-puasnya dengan mengonsumsi barang-barang mewah memicu penjualan tanah. (5) Adanya kelemahan dalam perangkat hukum, kelemahan tersebut misalnya, perangkat peraturan daerah, harus tunduk pada peraturan di atasnya. Peraturan-peraturan yang bersifat sentralistik dan selalu mendukung mega proyek mempermudah penjualan tanah. (6) Adanya kebijakan seolah-olah yang menyangkut tanah, dalam hal ini tukar guling, tukar lokasi, dan tukar menukar lainnya hanya merupakan spekulasi pemindahan hak atas tanah, pemilikan, penukaran, serta penguasaan tanah-tanah adat dan tanah negara. (7) Adanya dalih tanah untuk kepentingan yang lebih luas, dalam hal ini pemblokiran kawasan, penguasaan alam, penetapan lokasi, dan pembebasan tanah, dilakukan di bawah kekuasaan yang seakan-akan mendukung golongan minoritas, tetapi dengan alasan untuk kepentingan yang lebih luas tanah milik golongan minoritas tersebut harus dilepas. (8) Adanya proses pensertifikatan tanah, dalam hal ini terkesan membela kepentingan petani. Pronas mempercepat pemindahan hak atas tanah. Tujuannya adalah untuk mendongkrak target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membayar kontribusi mulai dari proses pensertifikatan, penjualan, izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak perusahaan dan sebagainya; (9) Adanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang didasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), pemerintah secara tidak langsung membujuk masyarakat untuk menjual tanah-tanah objek pajaknya yang strategis. (10) Adanya fenomena "*keh-keh siap*", maksudnya adalah, tanah-tanah habis di meja judi (sabung ayam). Kata bahasa Bali *siap* berarti 'ayam', dan *keh-keh* berarti 'mengais/dikais'. Dalam hal ini "*keh-keh siap*" berarti tanah-tanah habis karena dijual untuk kepuasan orang Bali, khususnya para laki-lakinya, untuk berpoya-poya di arena judi sabungan ayam yang disebut *tajen*, yang justru akhirnya selalu memelaratkan (membuat miskin).

Menurut Scheneider (1993) (dalam Putra, 2008:43) penjualan tanah dapat bermakna inflasi karena barang dan jasa yang dikonsumsi wisatawan mengakibatkan

masyarakat lokal harus membayar harga yang sama dengan harga yang dibayar wisatawan. Selanjutnya, penjualan tanah yang diikuti oleh perubahan atau alih fungsi lahan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan pada hubungan manusia (*purusa*) dan alam (*prakerti*). Untuk mengatasi ketidakharmonisan tersebut, menurut Santhiarsa (2004:25-26) secara *skala* (duniawi) dilakukan dengan memelihara lingkungan, seperti melakukan kegiatan yang bersifat ramah lingkungan serta penghijauan, sedangkan secara *niskala* (spiritual-religius) dilaksanakan dengan melakukan *yadnya* berupa *sadkerthi* atau enam upaya untuk membangun kesucian, kelestarian alam, keharmonisan masyarakat, dan kebahagiaan individual.

⁵⁰
Sadkerthi terdiri dari *atma kerthi*, *samudra kerthi*, *wana kerthi*, *danu kerthi*, *jagat kerthi*, dan *jana kerthi*. *Atma kerthi* adalah upaya untuk menyucikan *Sang Hyang Atma* dari belunggu *triguna*. *Samudra kerthi* adalah kelestarian samudra sebagai sumber alam yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dalam kehidupan umat manusia. *Wana kerthi* adalah kelestarian hutan. *Danu kerthi* adalah kelestarian sumber-sumber air tawar di daratan, seperti: mata air, danau, sungai, dan lain-lainnya. *Jagat kerthi* adalah kelestarian dan keharmonisan sosial. *Jana kerthi* adalah kelestarian kualitas manusia secara individu (Wiana, 2004).

Terkait dengan *wana kerthi*, salah satu restoran yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, yaitu Restoran Waka Land Cruise berada tengah hutan bambu wilayah Subak Munduk Kelesih. Untuk pelestarian ekologi di tengah hutan sebagai akibat pengembangan usaha pariwisata berupa restoran, yakni dilakukan pembatasan aktivitas yang membahayakan hutan, seperti tidak menyalakan api secara berlebihan, tidak menebang pepohonan sembarangan, tidak membuang sampah plastik, dan membatasi jumlah pengunjung. Menurut Peluso (dalam Hidayat, 2005:10), hal ini merupakan suatu pelaksanaan dari penggunaan lingkungan hutan dengan cara-cara yang khusus. Penggunaan "cara-cara khusus" tersebut merupakan usaha untuk menjaga agar sumber daya tidak berkurang, melindungi hutan agar tidak rusak sehingga tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Terjadinya kontra-hegemoni masyarakat dengan mempergunakan diskursus pariwisata kerakyatan berkelanjutan terhadap hegemoni pemerintah yang mempergunakan diskursus pariwisata berbasis masyarakat, menurut Ardika (2007:98),

pariwisata kerakyatan berkelanjutan memiliki pilar berupa kualitas, kontinuitas, dan keseimbangan, yang menelaraskan kebutuhan masyarakat lokal, kelestarian sumber daya fisik (fisik dan budaya), dan kepuasan wisatawan. Dalam hal ini terkait dengan hal yang dikonsepsikan Ardika (2007:98) sebagai "pariwisata kerakyatan berkelanjutan", maka dengan adanya pembangunan vila di tengah hutan dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, khususnya dari aspek kontinuitas, keterlibatan masyarakat di desa tersebut menjadi suatu masalah yang patut dipertanyakan keberlangsungannya. Oleh karena menurut laporan Brundtland (lihat Chitkara, 1998:108), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri. Hutan sebagai sumber air, dengan keberadaan bangunan vila akan berpengaruh terhadap ketersediaan air, di samping kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan aktivitas pertanian di desa setempat. Jika pertanian terancam, maka pariwisata juga akan terancam mengingat daya tarik utama di Desa Wisata Jatiluwih adalah terasering sawah, di samping budaya. Keterancaman pariwisata di desa ini secara otomatis akan mengancam keterlibatan masyarakat.

Dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang menawarkan produk utama berupa bentang alam, yaitu keindahan terasering sawah beserta pemandangan alam yang melatarbelakanginya, syarat konseptual pembangunan berkelanjutan, yakni terdiri atas (1) keberlanjutan ekologi, (2) keberlanjutan sosial dan budaya, dan (3) keberlanjutan ekonomis harus terpenuhi. Selanjutnya, terkait dengan keberlanjutan ekologi, pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dengan dukungan pembangunan sarana-sarana yang diperlukan (seperti sarana pokok yang berupa akomodasi dan restoran), telah menimbulkan penyimpangan dalam pembangunan antara lain dengan dibangunnya vila di tengah hutan yang berfungsi sebagai tempat resapan air serta pemanfaatan hutan bambu sebagai lokasi berdirinya restoran. Penyimpangan ini terjadi karena kuatnya hegemoni terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dibuat tidak berdaya dalam menghadapi tekanan khususnya dalam mempertahankan keberlanjutan ekologi wilayahnya. Dengan demikian, hal tersebut secara keseluruhan dalam jangka panjang secara potensial merusak ekologi kawasan hutan, dan dalam jangka pendek mengakibatkan kerusakan pada ekologi desa setempat.

Adat dan agama tidak bisa dilepaskan dari budaya atau kebudayaan Bali, yakni adat Bali dan agama Hindu. Dalam arti yang sempit, kebudayaan Bali adalah agama Hindu. Jadi, antara agama Hindu dengan kebudayaan Bali terdapat hubungan, dalam hal ini hubungan tersebut terletak pada ketiganya (adat, agama, dan budaya) tidak dapat dipisahkan dan tidak akan pernah dipisahkan. Filsafat agama Hindu yang berwujud *tatwa* dilaksanakan dalam bentuk kebiasaan sehari-hari yang disebut adat Bali. Aktivitas yang berupa adat Bali tersebut selanjutnya menyatu dengan kreativitas masyarakat Hindu Bali yang berwujud seni ⁵⁵ budaya yang dijiwai agama Hindu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa agama Hindu adalah jiwanya Bali, kebudayaan Bali adalah nafasnya Bali, dan adat Bali sebagai urat nadinya Bali.

Kehidupan manusia hampir tidak pernah terlepas dari simbol-simbol yang memiliki makna sangat dalam dan menggambarkan alam pikiran masyarakat pemiliknya (Soedarso Sp, 2006:37-40). Sebagai makhluk yang berpikir dan bertindak laku simbolik (*animal symbolicum*), seluruh kemajuan kebudayaan manusia senantiasa berdasarkan hal-hal yang simbolis, tidak saja dalam dunia fisik, tetapi juga dalam dunia simbolis. Hadirnya bahasa, kesenian, mitos, dan agama merupakan bagian-bagian dari dunia simbolis itu. Bahkan simbol tidak hanya dapat dijabarkan menjadi tanda, tetapi ada sesuatu yang dapat hidup di baliknya (Khan, 2002:237-244).

Mitos tentang hutan, juga hadir dalam kehidupan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih. Masyarakatnya yang sebagian besar beragama Hindu, memiliki pandangan bahwa alam dikendalikan oleh kekuatan gaib dan bersifat supernatural. Kepercayaan pada arwah-arwah nenek moyang (*leluhur*) dan kekuatan halus selalu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan alam dan lingkungan. Kepercayaan masyarakat Desa Wisata Jatiluwih akan adanya kekuatan-kekuatan halus, tercermin pada saat memerlukan binatang untuk keperluan upacara di ⁶¹ pura-pura yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, seperti: kera, *kidang* (kijang), atau binatang buas lainnya. Sebelum masyarakat setempat berburu (*meboros*) ke tengah hutan (*wana*), ditandai dengan upacara menghaturkan sesajen di suatu tempat di pinggiran hutan. Sesajen yang dihaturkan merupakan simbol kepatuhan masyarakat terhadap kekuatan supernatural yang ada di hutan. Upacara tersebut dipimpin oleh *pemangku patus*. Tujuan upacara tersebut agar

binatang yang dicari bisa diperoleh, seluruh masyarakat yang ikut *meboros* selamat dan tidak tersesat di hutan.

Menurut Cassirer (dalam Nugroho, 1987:36-62) simbol dan tanda merupakan dua hal yang berbeda. Simbol merupakan bagian dari dunia makna manusiawi yang memiliki nilai fungsional, sedangkan tanda merupakan bagian dari dunia fisik. Lebih lanjut, Sunardi (2002) menyatakan bahwa tanda dan simbol memang saling berhubungan. Suatu tanda memiliki makna yang dihasilkan lewat sistem tanda yang dipakai oleh kelompok masyarakat. Dalam sistem tanda, suatu tanda dapat menghasilkan makna. Oleh karena adanya prinsip perbedaan sehingga mampu menampilkan yang tidak dapat dihadirkan (Lyotard dalam Yulianto, 2005:128). Artinya, makna itu dihasilkan oleh sistem perbedaan atau sistem hubungan tanda-tanda. Oleh karena tanda senantiasa berada dalam posisi relasional yang hidup (Sunardi, 2004:40-83).

Tanda dapat digunakan untuk memaknai sesuatu yang lain secara lahiriah dan simbol membantu mempertajam dalam mengungkap tingkah laku dan prestasi kebudayaan yang memiliki pengaruh emosional serta makna yang lebih dalam, di samping tidak bersifat alamiah (Berger, 2005:11-53). Simbol sangat berperan dalam pembentukan kesadaran kelompok umat beragama terhadap agamanya sehingga mampu meningkatkan kesadaran spiritual. Dalam hal ini, mengungkap peristiwa keagamaan yang abstrak menjadi terang, sehingga jelas bagi para pemeluknya hanya dalam bahasa simbol dan religius magis (Dhavamony, 1995:174-179), seperti upacara *ngaturang* sesajen ke hutan pada saat *meboros* mencari binatang untuk keperluan upacara di pura merupakan budaya unik.

Kehadiran wisatawan serta masyarakat di luar Hindu dari luar Pulau Bali pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, menghadirkan makna keberagaman dalam usaha pelestarian ekologi dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan gambaran simbolik multidimensi, yang menurut Giddens (dalam Herwanto, 2005:188) berpotensi menjadi masyarakat bermasalah (*risk society*). Untuk menjembatani keberagaman dalam pelestarian ekologi dan budaya, maka diperlukan dialog multikultural, yakni dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, asimilasi, dan akulturasi, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang bersifat universal dari pelestarian tersebut. Kemudian, dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan keseimbangan. Menurut Bagus (2004:89)

keseimbangan adalah pembangunan yang implementasinya didasarkan atas kearifan lokal yang unik, seperti *trihita karana* menuju kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberagaman dalam pelestarian ekologi dan budaya pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan agar pariwisata berkelanjutan dapat terwujud di Desa Wisata Jatiluwih.

3. Makna Pemberdayaan

Makna pemberdayaan dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih dimaksudkan sebagai pembangunan yang berwawasan budaya, yakni menurut Bagus (1995:3) sebagai cara pandang bagaimana pembangunan seharusnya memberikan makna hidup kepada masyarakat sehingga dapat memperkokoh jati dirinya. Untuk mencapai maksud itu, masyarakat hendaknya tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat, baik sebagai manusia individu maupun sebagai makhluk sosial. Harkat dan martabat dapat dicapai menurut Aly (1991:308) dengan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar IPTEK menjadi bermakna. Dengan demikian, pembangunan berwawasan budaya bersasaran manusia yang seutuhnya, tidak boleh serakah dan juga harus untuk anak cucu (Soemarwoto, 1991:7).

Berkumpulnya seluruh anggota masyarakat dalam suatu *paruman adat*, di antara mereka saling bertegur sapa dan berada dalam suasana yang khidmat, untuk membicarakan nasib pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih adalah suatu aktivitas yang melahirkan bentuk kesadaran kolektif yang ikut membangun harmoni (Khan, 2002:166-177) yang dinamis terhadap kekuatan untuk menghadirkan kedamaian dalam pengembangan pariwisata. Keserasian dan keseimbangan kekuatan dapat terjadi melalui pendekatan dialogis antar masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Kesiediaan untuk hadir sebagai dasar yang bijak dan tulus dalam membangun rasa toleran di antara para ketua, dan anggota *desa adat*, turut memupuk kekuatan serta jati diri budaya pendukung pengembangan pariwisata tanpa meninggalkan modal sosial (Suyatna, 2006:60-64) yang dimiliki masyarakat desa setempat. Hal ini menguatkan bahwa masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda (Sanderson, 1993:59-70), di samping mampu beradaptasi sehingga menghargai perbedaan (Lyotard, 2005:141).

Adanya pertemuan-pertemuan dari anggota masyarakat yang memiliki ideologi yang sama terhadap pengembangan pariwisata, merupakan suatu upaya untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui pariwisata. Upaya ini memiliki peranan penting dalam membentuk serta membangun harmoni kekuatan partisipasi berbagai lapisan masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran kolektif. Dalam hal ini kekuatan partisipatif mendukung identitas dan solidaritas antar anggota masyarakat. Hal ini dilakukan dengan jalan saling melihat, saling mendengar, dan saling berdialog di antara warga *desa adat* yang ada di Desa Wisata Jatiluwih. Cara seperti ini mampu membangun kekuatan partisipasi yang menghargai perbedaan budaya antara satu dengan yang lainnya, di atas landasan pluralitas iman, yaitu sebagai wujud apresiasi atau heterogenitas ide (Lyotard dalam Yulianto, 2005:142).

Makna yang tersirat dan tersurat dalam membangun harmoni kekuatan di antara masyarakat anggota *desa adat* dalam keterlibatannya pada pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, mengarah pada penghargaan terhadap keterbukaan, menghormati, menerima orang lain, dan antar anggota masyarakat. Kesadaran itu senantiasa tumbuh, membentuk orang atau komunitas selalu siap, dan terbuka untuk saling mengasihi satu sama lain sehingga menjadi akrab dengan realitas keberagaman (Lajar, 2005:163-174 dan Lyotard dalam Yulianto, 2005:128). Pengembangan pariwisata mengajarkan kepada setiap anggota *desa adat* untuk senantiasa merayakan keberagaman dalam setiap aspek yang terkait dengan pengembangan pariwisata.

Adanya kemauan baik dari warga desa setempat yang sudah mampu berkiprah dalam bisnis kepariwisataan untuk saling membantu di antara sesama warga desa menjadi simbol gerakan yang membuka interaksi sosial bagi anggota masyarakat yang lain. Bagi setiap manusia yang ber-*yadnya* (Putra, 1982:9-10) mereka dapat memenuhi kesejahteraan secara seimbang antara lahir dan batin karena mereka selalu membuka ruang interaksi sosial (Sujana, 1994:50) di antara sesama warga desa. Dengan adanya interaksi sosial, maka antara masyarakat yang sudah berhasil dalam bisnis pariwisata dengan yang belum berhasil, akan terjadi pertemuan, bertukar pikiran, menambah pengalaman, dan menambah wawasan di antara anggota masyarakat. Dengan aktivitas seperti ini, mereka akan memperoleh penyegaran sebagai masyarakat yang dinamis (Supriyono, 2005:97).

Pengembangan desa wisata dengan melibatkan masyarakat setempat, diharapkan melahirkan rasa kebersamaan, rasa kolektivitas, dan solidaritas yang didasari oleh ideologi pengembangan pariwisata yakni berupa kesejahteraan. Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih yang hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat disadari atau tidak, belum mampu menjadi tali pengikat persaudaraan dan membangun kesadaran kolektif (Hendropuspito, 1983:100-101). Kesadaran bersama akan melahirkan solidaritas di antara para anggota masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata, yang mendorong bangkitnya kesegaran baru. Rasa kebersamaan untuk selalu mengawal pengembangan pariwisata perlu selalu di pupuk, sehingga menjadi fondasi yang kokoh, tidak mudah dipecah belah oleh kekuatan konflik-konflik yang menyesatkan (Kerepun, 2007:21-32).

Salah satu bentuk solidaritas positif yaitu dengan mempekerjakan beberapa orang masyarakat setempat sebagai porter (pengangkut barang) dari rombongan wisatawan yang akan melakukan wisata berjalan kaki (*trekking*) dari Dusun Gunungsari Umakayu menuju Danau Tamblingan menyusuri rute yang dibuat pada masa penjajahan Belanda di Desa Jatiluwih. Jalan setapak yang menjadi sasaran *trekking* oleh masyarakat setempat disebut sebagai "jalan *jaran*" karena lebarnya tidak lebih dari lebar badan kuda (*jaran*) ditambah manusia. Masyarakat setempat yang dipekerjakan sebagai *porter* menerima sejumlah imbalan. Masyarakat yang dipekerjakan umumnya masyarakat Dusun Gunungsari, yaitu Dusun Gunungsari Desa ataupun Dusun Gunungsari Umakayu.

Pemberian pekerjaan kepada sesama anggota masyarakat menunjukkan adanya kemauan baik (*political will*) dari anggota masyarakat yang sudah mampu berkiprah dalam bisnis kepariwisataan. Hal ini berarti masyarakat setempat dengan kemandiriannya, di antara anggota masyarakat saling memberdayakan sehingga meskipun tanpa dukungan *political will* dari penguasa, mereka tetap berjalan dan mulai mendapatkan hasil dari pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, meskipun secara kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat setempat masih sangat terbatas. Dalam pengembangan desa wisata, pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat merupakan sebuah keperluan.

F. PENUTUP

Dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di desa wisata, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. (1) Pengembangan pariwisata di desa wisata dapat menimbulkan komodifikasi dan konflik kepentingan; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih berupa partisipasi pada tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan; dan (3) Pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat di desa wisata (dengan mengambil kasus di Desa Wisata Jatiluwih) dapat berdampak terhadap pengelolaan desa wisata, pengambilan gambar oleh wisatawan, penyerapan pekerja dari masyarakat setempat, dan pelecehan *trihita karana* (*parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*). Sedangkan makna yang timbul dari pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat dapat berupa makna kesejahteraan, makna pelestarian, dan makna pemberdayaan.

Selanjutnya diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut. (1) Dalam pengembangan desa wisata sangat diperlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, pengusaha pariwisata), semua pihak hendaknya dapat menjaga keselarasan hubungan antara ketiganya; (2) Pada pengembangan produk apa pun di bidang pariwisata, terlebih-lebih yang mempergunakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*), dengan cara apapun masyarakat setempat (tempat produk pariwisata dikembangkan) harus dilibatkan; (3) Masyarakat setempat perlu lebih diberdayakan, yakni dengan bentuk-bentuk pemberdayaan seperti pola swadaya, pola kemitraan, dan pola pendampingan; (4) Pemerintah perlu melakukan tindakan nyata dalam pengembangan desa wisata melalui program-program pemberdayaan yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput.

GLOSARIUM

Ajeg

Langgeng, abadi, dikaitkan dengan Bali yang *ajeg*, berarti Bali yang lestari, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh berbagai dinamika.

Balih-balihan

Salah satu bagian dari konsep pembagian tiga seni tari pertunjukan Bali yang merupakan seni hiburan.

Banjar

Sistem organisasi sosial kemasyarakatan di Bali, terdiri atas *banjar adat* dan *banjar dinas*.

Bhisama

Fatwa keagamaan dari agama Hindu yang dikeluarkan untuk melindungi adat, budaya dan agama. Terkait dengan perlindungan kawasan suci pura, dikenal istilah *apeneleng*, *apenimpug* dan *apenyengker*.

Carik

Sawah, yang dapat terdiri atas sawah dengan irigasi teknis atau sawah tadah hujan.

Desa adat

Sering pula disebut desa *pekraman*, merupakan sistem sosial tradisional Bali yang ditandai dengan kepemilikan *kahyangan tiga* (tiga pura utama di suatu wilayah).

Dusun

Sama dengan *banjar*, yang merupakan unit terkecil dari sebuah desa.

Jalan jaran

Jalan yang lebarnya tidak melebihi lebar kuda ditambah lebar satu orang manusia.

Jineng

Lumbung tempat menyimpan padi setelah panen di sawah, dapat berupa padi yang masih ada batangnya atau berupa *jijih* (padi yang sudah dirontokkan).

Joged bumbung

Jenis tari pergaulan Bali yang bersifat profan, mempergunakan gamelan pengiring yang terbuat dari bambu.

Leteh

Suatu kondisi yang digolongkan kotor secara *niskala* (alam yang tidak nyata).

Niskala

Dunia atau alam tidak nyata, yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan seseorang.

Ngetohin

Dukungan orang tua kepada anak, dengan mengorbankan segala sesuatu untuk keberhasilan anak.

Parhyangan

Hubungan antara manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi* (Tuhan) yang merupakan komponen dari *trihita karena* (*parhyangan, pawongan, palemahan*).

Pengemong

Anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga, menunggu, memelihara, dan melaksanakan keberlangsungan upacara *yadnya*, sering juga disebut *pengempon pura*.

Penyengker

Tembok keliling, berfungsi sebagai batas dan melindungi bangunan rumah atau bangunan suci dari hal-hal yang *leteh* (kotor) secara *niskala*.

Pianak

Sebuatan untuk seorang anak, bisa terdiri atas *pianak luh* (anak perempuan) dan *pianak muani* (anak laki-laki).

Pula pali

Langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang wajib diikuti dan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang baik.

Purusa

Suatu istilah untuk menyebut simbol yang mengandung makna pria atau laki-laki sebagai suatu pasangan seimbang dari unsur *pradana* (perempuan atau wanita).

Pura kahyangan tiga

Tiga pura utama yang ada di setiap desa (*pura desa*, *pura puseh*, dan *pura dalem*) yang dimiliki oleh setiap desa di Bali.

Saka roras

Saka berarti 'tiang', *roras* berarti 'dua belas', sebuah bangunan tradisional Bali yang memiliki tiang dua belas.

Sekala

Untuk menyebut dunia atau alam nyata, kebalikan dari *niskala* (alam tidak nyata).

Semi sakral

Salah satu bagian dari konsep seni pertunjukan tradisional Bali, yang mencakup *wali* (sakral), *bebali* (semi sakral), dan *balih-balihan* (tontonan).

Subak

Organisasi pengairan di Bali, dapat terdiri dari *subak abian* (bagian dari areal *subak* yang merupakan kelompok lahan kering seperti *tegalan*) dan *subak carik* (bagian dari areal *subak* yang merupakan kelompok lahan basah terdiri atas sawah-sawah).

Sukla

Sesuatu yang belum terpakai, atau sesuatu yang masih bersih secara *sekala* atau secara *niskala*.

Teben

Sebutan untuk hilir, dan sebutan untuk hulu dalam bahasa Bali adalah *luwan*.

Tenggala

Peralatan tradisional Bali yang dipergunakan oleh petani untuk membajak sawah. Peralatan ini biasanya dilengkapi dengan *lampit*, dan *tenggala* ditarik oleh sepasang sapi atau sepasang kerbau.

Titi

Jembatan yang terbuat dari kayu atau bambu, yang menghubungkan antara satu parit dengan parit lain dan biasanya terdapat di parit sawah. Titi juga digunakan untuk menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lain yang dipisahkan oleh sungai.

Trihita karana

Konsep keseimbangan dan keharmonisan dalam budaya Bali yang menjadi sumber kebahagiaan hidup meliputi, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*).

Trikaya parisudha

Adalah tiga ajaran dalam agama Hindu, yang terdiri dari berpikir yang baik (*manacika*), berkata yang baik (*wacika*) dan berbuat yang baik (*kayika*).

Trimandala

Konsep untuk pembagian ruang/wilayah yang terdiri atas tiga tingkatan yaitu *jeroan* (ruang dalam), *jaba tengah* (ruang tengah) dan *jaba sisi* (ruang paling luar).

Ulun carik/andungan

Sama dengan pengalapan, petak sawah yang paling atas

Utamaning madya

Tingkatan tengah-tengah yang tertinggi dalam sistem upacara di Bali, dari urutan tertinggi ke terendah, terdiri atas *utamaning utama*, *utamaning madya*, *utama*, *madyaning utama*, *madyaning madya*, *madya*, *nistaning utama*, *nistaning madya* dan *nista*.

Yadnya

Korban suci yang didasari oleh ketulusan sebagai wujud berbhakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi* (Tuhan Yang Mahaesa).

DAFTAR PUSTAKA

- 124
Anonim. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. 1990.
- 25
Aditjondro, George Junus. 1995. *Bali, Jakarta's Colony: Social and Ecological Impact of Jakarta-based Conglomerates in Bali's Tourism Industry*. Working Papers Number 58, Asia Research Centre. Perth: Murdoch University.
- 21
Ardika, I Wayan. 2003. *Pariwisata Budaya Berkelanjutan Repleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- 87
Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arka, I Wayan. 1999. "Pemberdayaan Desa Adat dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Bali: Kasus Desa Wisata Terpadu Penglipuran Bangli" (tesis). Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Atmadja, I N.B., A.T. Atmadja. 2008. Ideologi Tri Hita Karana □Neoliberalisme=Vilanisasi Radius Suci Pura. Dalam: I Wayan Ardika, editor. *Dinamika Sosial Masyarakat Bali dalam Lintasan Sejarah*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Ali, Matius. *Estetika Sebuah Pengantar Filsafat Keindahan*. Sanggar Luxor, Tangerang, 2004.
- Abdullah, I. 2005. "Diversitas Budaya, Hak-Hak Budaya Daerah, dan Politik Lokal di Indonesia". Dalam Jamil Gunawan et.al. (ed). *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES. Halaman 81-94.
- 22
Agger, Ben. 2005. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- 49
Azra, A. 2002. Pendidikan Multikultural Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika. Makalah pada Simposium Internasional Bali ke-3 Jurnal Antropologi Indonesia. Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- Bali Post 4 September 2006 berjudul Jati Luwih Menuju "World Culture Heritage".
- 48
Barker, Christ. 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang.
- 11
Bennett, T. 1998. *Culture: A Reformer's Science*. St Leonards NSW: Allen & Urwin.

Bagus, I.G.N. dkk. 2002a. *Pemikiran Baru untuk Pembangunan Bali yang Berkelanjutan dan Perspektif Budaya*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.

151
Bagus, I.G.N. dkk. 2002b. *Masalah Budaya dan Pariwisata dalam Pembangunan*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.

Bagus, I.G.N. dkk. 2002c. *Menuju Terwujudnya Ilmu Pariwisata dalam Pembangunan*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.

48
Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. (Terjemahan). Yogyakarta: Bentang.

Bocock, Robert. 1986. *Hegemony*. Chichester: Ellis Horwood Limited.

54
Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Boniface, Priscilla. *Mengelola Wisata Budaya Bermutu*. Bagian Proyek Pengembangan Literatur Pariwisata (tidak dipublikasikan), Jakarta, 2000.

81
Blum, L.A. 2001. "Antirasisme, Multikulturalisme dan Komunitas Antar-Ras : Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural". Dalam Larry May, Shari Colin-Chabanian dan Kai Wong (ed). *Etika Terapan Sebuah Pendekatan Multikultural*. Penerjemah Sinta Carolina. Yogyakarta: Tiara Wacana. Halaman 1-15.

95
Britton, S.G. 1991. *Tourism and Underdevelopment in Fiji*. Canberra: Australian National University.

94
Cousins, E.H. 2000. "Hakekat Keyakinan dalam Dialog Antaragama". Dalam Ali Noer Zaman (ed). *Agama untuk Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 75-94.

53
Craik, J. 1991. *Resorting to Tourism: Cultural Policies for Tourism Development in Australia*. North Sydney: Allen & Unwin.

67
Dahrendorf, R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.

Dawam, A. 2003. *Emoh Sekolah*. Inspeial Ahimsakarya Press.

Dewantara, Ki Hadjar. *Pidato Promosi dalam Masalah Kebudayaan*.

Eagleton, T. 1991. *Ideology*. London: Verso.

93
Elliott, James. 1997. *Tourism Politics and Public Sector Management*. London: Routledge.

- 86
Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Foucault, Michael. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault 1954–1984*. (Terjemahan). Yogyakarta: Jalasutra.
- 66
Freire, P. 1999. *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* (diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartono). Yogyakarta: ReaD.
- Frondisi, Risieri. *Pengantar Filsafat Keindahan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- 75
Giddens, Anthony. 2003. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*. Jakarta: UI Press.
- 52
Gramsci, Antonio. 1976. *Selection from The Prison Notebooks*. (Quintin Hoare and Nowell Smith, editors). New York: International Publisher.
- Gie, The Liang. *Garis Besar Estetik (Filsafat Keindahan)*. Karya, Yogyakarta, 1976.
- 103
Gartner, William C. *Tourism Development: Principles, Processes, and Policies*. Thomson Publishing Company, USA, 1996.
- 11
Grossberg, L. 1992. *We Gotta Get Out of This Place: Popular Conservatism and Postmodern Culture*. London and New York: Routledge.
- 38
Gunawan, J. 2005. "Catatan Editor". Dalam Jamil Gunawan et.al. (ed) *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES. Halaman ix-xxvi.
- 65
Hall, S. 1997a. "The Work of Representation" dalam S. Hall (ed). *Representations*. London and Thousand Oaks, CA: Sage.
- Harvey, D. 1989b. *The Condition of Postmodernity*. London: Oxford Blackwell.
- 80
Hall, Colin Michael. 1994. *Tourism and Politics: Policy, Power and Place*. Chichester: Jhon Wiley.
- 51
Hall, Colin Michael. 2000. *Pariwisata dan Politik: Kebijakan, Kekuasaan dan Tempat*. Jakarta: Bagian Proyek Pengembangan Literatur Pariwisata Tahun Anggaran 2000.
- 110
Hitchcock, Michael, et al. 1993. *Tourism in South Asia-East Asia*. London, New York: Routledge.
- 72
Ismail, Faisal. 1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. (diterjemahkan oleh Imron Rosyidi). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- 64
Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Kleden, Ignas. *Sikap Ilmiah Dan Kritik Kebudayaan*. LP3ES, Jakarta, 1987.

⁷⁹
Lash, S. and Urry, J. 1994. *Economies of Signs and Space*. London: Sage.

⁷
Matthews, H.G. 1978. *International Tourism: A Political and Social Analysis*. Cambridge, MA: Schenkman.

Matthews, H.G. and Richter, L.K. 1991. Political Science and Tourism. *Annals of Tourism Research* 18(1):120-135.

Mantra, I.B. *Landasan Kebudayaan Bali*. Upada Sastra, Denpasar, 1996.

Mowforth, Martin., dan Maunt, Ian., *Pariwisata dan Yang Berkelanjutan: Pariwisata Baru Dunia Ketiga*. Bagian Proyek Pengembangan Literatur Pariwisata (tidak dipublikasikan), Jakarta, 2000.

Mudana, I Gede. Dari Filsafat Ilmu Ke Bentuk, Fungsi, dan Makna. Dalam (ed) *Pemahaman Budaya Di Tengah Perubahan*. Program Studi S2 dan S3 Kajian Budaya, Denpasar, 2003.

Mulder, N. 2001. *Ruang Batin Masyarakat Indonesia*. (diterjemahkan oleh Wisnu Hardana). Yogyakarta: LkiS.

⁶³
Natori, Masahiko, 2001. *A Guide Book for Tourism-Based Community Development*. Yokohama: Asia Pacific Tourism Exchange Center.

³⁷
Perlas, Nicanor. 2000. *Shapping Globalization Civil Society, Cultural Power and Threefolding*. New York: CADI and Global Network for Social Threefolding.

⁷¹
Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.

⁷⁸
Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali*. Denpasar: PT Bali Post.

Pitana, I Gde. 2003. ³¹Potensi Konflik, Adat Budaya, dan Pariwisata Bali. Dalam: I Gde Janamijaya, I Nyoman Wiratmaja, dan I Wayan Gde Suacana, editor. *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*. Denpasar: Yayasan Tri Hita Karana.

Prasiasa, D.P.O. 2000. "Produk Wisata Desa Wisata Terpadu Sebatu Kabupaten Gianyar dan Desa Wisata Terpadu Jatiluwih Kabupaten Tabanan Provinsi Bali: Suatu Analisis Persepsi Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara" (tesis). Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Sahid.

Piliang, Y.A. 2003. *Hiper-Moralitas Mengadili Bayang-Bayang*. Yogyakarta: Belukar.

⁷⁰
Philips, Andrian. Report of the Conference Tourism, Recreation and Conservation. Peak Park Joint Planning Board. 1985. Page 5.

- 123
Putra, I. Nyoman Darma. 2004. Bali Menuju Jagadhita: Sebuah Pengantar. Dalam (ed) *Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*. (Editor I Nyoman Darma Putra). Denpasar: Pustaka Bali Post. Halaman viii-xxii.
- Prasiasa, D.P.O. Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan (disertasi). Program Doktor Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2010.
- Ratna, Kutha. Konsep dan Aplikasi Bentuk, Fungsi, dan Makna. Dalam (ed) *Pemahaman Budaya Di Tengah Perubahan*. Program Studi S2 dan S3 Kajian Budaya, Denpasar, 2003.
- Ratna, Kutha. *Estetika Sastra dan Budaya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- 109
Sairin, Sjafrin. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Sutrisno, Mudji., Verhaak, Christ. *Estetika Filsafat Keindahan*. Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Sutrisno, Mudji. *Kisi-Kisi Estetika*. Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- 62
Storey, John. *Teori Budaya dan Budaya Pop: Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Qalam, Yogyakarta, 2003.
- 49
Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. (Elisabeth dan Misbah Zulfa, Penerjemah). Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Sulaeman. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata*. Dalam *Jurnal Kebudayaan dan Pariwisata*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta, Volume VIII Juli 2004 hal. 1-4.
- 59
Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesiatara.
- 20
Warren, Carrol. 1993. Tanah Lot: The Cultural and Environmental Politics of Resort Development in Bali. In: P. Hirsch and C. Warren, editors. *The Politics of Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance*. London: Routledge.
- 148
Woodley, Alison. 1992. Tourism and Sustainable Development: The Community Perspective. In: J.G. Nelson, R. Butler, G. Wall, editors. *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing*. University of Waterloo, Department of Geography Publication.

WACANA KONTEMPORER PARIWISATA

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.digilib.ui.ac.id Internet Source	<1%
2	aipi-politik.org Internet Source	<1%
3	ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1%
4	perwitosari.wordpress.com Internet Source	<1%
5	www.mongabay.co.id Internet Source	<1%
6	www.istanaagency.com Internet Source	<1%
7	ir.lib.pccu.edu.tw Internet Source	<1%
8	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
9	Rahmadi Rahmadi. "Meneliti Agama dengan Pendekatan Cultural Studies", Jurnal Ilmiah Ilmu	<1%

Ushuluddin, 2018

Publication

10	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1%
11	ccs.nccu.edu.tw Internet Source	<1%
12	idorastafara.blogspot.com Internet Source	<1%
13	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1%
14	immarf.wordpress.com Internet Source	<1%
15	mb4h-mbah.blogspot.com Internet Source	<1%
16	svaramahardika.wordpress.com Internet Source	<1%
17	diner13.wordpress.com Internet Source	<1%
18	karuniayeni.blogspot.com Internet Source	<1%
19	slidedocuments.org Internet Source	<1%
20	eprints.uwe.ac.uk Internet Source	<1%

21	daincredible.files.wordpress.com Internet Source	<1%
22	lembahperasaan.blogspot.com Internet Source	<1%
23	hindudamai.blogspot.com Internet Source	<1%
24	spi.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
25	partnership.or.id Internet Source	<1%
26	klikdiksos.blogspot.com Internet Source	<1%
27	kabarmapegaa.com Internet Source	<1%
28	www.goodreads.com Internet Source	<1%
29	shop.kanisiusmedia.co.id Internet Source	<1%
30	Norfia Eka Praesti, Novi Triana Habsari. "Peran Perempuan Dalam Perkembangan Ekonomi Di Kampung TKI (Studi Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2008-2013)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013 Publication	<1%

31 zadoco.site Internet Source <1%

32 Muhammad Taufik. "PANDANGAN KRITIS ISLAM LIBERAL ATAS ISU-ISU KONTEMPORER", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2015
Publication <1%

33 repository.unissula.ac.id Internet Source <1%

34 ilmuhamster.blogspot.com Internet Source <1%

35 mayaminarti10.wordpress.com Internet Source <1%

36 www.mysciencework.com Internet Source <1%

37 I G Mudana, I K Utama, C I S Widhari. "Local Community Entrepreneurship in Mount Agung Trekking", Journal of Physics: Conference Series, 2018
Publication <1%

38 Defni Aulia, Mahdi Bahar, M Ardhi Gunawan, Indra Gunawan, Wahyu Pratomo, Muhammad Alfath. "LEGITIMASI SENIMAN DAN KARYA SENI DI TAMAN BUDAYA JAMBI (TINJAUAN SOSIOLOGI SENI)", Titian: Jurnal Ilmu <1%

Humaniora, 2019

Publication

39

Afiliasi Ilafi, Bani Sudardi, Supana Supana.
"Kawiryan Discourse as The Legitimacy of The
Islamic Sultanate in Serat Saptastha", IBDA` :
Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 2018

Publication

<1%

40

www.rileksbook.com

Internet Source

<1%

41

pps.unud.ac.id

Internet Source

<1%

42

sariptrik.blogspot.com

Internet Source

<1%

43

gaganesvara.blogspot.com

Internet Source

<1%

44

www.cakrawayu.org

Internet Source

<1%

45

jurnalanakkampus.blogspot.com

Internet Source

<1%

46

jimiharianto.wordpress.com

Internet Source

<1%

47

Submitted to Lebanese International University

Student Paper

<1%

48

Putu Suryawati. "REAKTUALISASI FUNGSI

<1%

BALE BANJAR DI KOTA DENPASAR",
Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan
Kebudayaan, 2018

Publication

49

abdul4515.blogspot.com

Internet Source

<1%

50

pasramanmanikgeni.blogspot.com

Internet Source

<1%

51

ejournal.borobudur.ac.id

Internet Source

<1%

52

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

<1%

53

www.questia.com

Internet Source

<1%

54

journal.ummat.ac.id

Internet Source

<1%

55

balisustain.blogspot.com

Internet Source

<1%

56

abelpetrus.wordpress.com

Internet Source

<1%

57

staffnew.uny.ac.id

Internet Source

<1%

58

hukum.unsrat.ac.id

Internet Source

<1%

59	halimtrinanta.blogspot.com Internet Source	<1%
60	ez-eldifore.blogspot.com Internet Source	<1%
61	ahmadnaisaburi.blogspot.com Internet Source	<1%
62	yunieka.blogspot.com Internet Source	<1%
63	macrothink.org Internet Source	<1%
64	www.jesoc.com Internet Source	<1%
65	Submitted to 7996 Student Paper	<1%
66	rafiuddinblog.wordpress.com Internet Source	<1%
67	etheses.lse.ac.uk Internet Source	<1%
68	arkeologika.files.wordpress.com Internet Source	<1%
69	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
70	Submitted to University College London Student Paper	<1%

<1%

71

Elya Munfarida. "PERAN KELUARGA DI ERA BUDAYA KONSUMEN", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970

Publication

<1%

72

Ali Riyadi. "BAHASA POLITIK ISLAM DI INDONESIA", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2013

Publication

<1%

73

Rusdin Ahmad. "DEMOKRASI DAN MULTI KULTURALISME DALAM KONTESTASI DAKWAH ISLAM", Al-Mishbah | Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2017

Publication

<1%

74

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1%

75

ejournal.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1%

76

vysikom.wordpress.com

Internet Source

<1%

77

persmauntan.blogspot.com

Internet Source

<1%

78

Igde Pitana. "Tri Hita Karana – The Local Wisdom of the Balinese in Managing

<1%

Development", Trends and Issues in Global Tourism, 2010

Publication

79	is.muni.cz Internet Source	<1%
80	Submitted to City University of Hong Kong Student Paper	<1%
81	rektor.umm.ac.id Internet Source	<1%
82	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1%
83	sukabumi.olx.co.id Internet Source	<1%
84	aliangcurly.blogspot.com Internet Source	<1%
85	kinetica.nla.gov.au Internet Source	<1%
86	Submitted to Taipei Medical University Student Paper	<1%
87	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
88	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1%

89

makalahdasar.blogspot.com

Internet Source

<1%

90

Hardiman Hardiman, Ardianto Ardianto.
"KABHANTI WUNA MEDIA KOMUNIKASI
TRADIOSONAL DAN TANTANGANNYA DI
ERA GLOBALISASI", Potret Pemikiran, 2016

Publication

<1%

91

diskotikmerah.wordpress.com

Internet Source

<1%

92

dickyslengekan.blogspot.com

Internet Source

<1%

93

repositories.lib.utexas.edu

Internet Source

<1%

94

e-journal.metrouniv.ac.id

Internet Source

<1%

95

research-repository.griffith.edu.au

Internet Source

<1%

96

Poerbo, Heru Wibowo. "Urban Design
Guidelines as Design Control Instrument with a
case study of the Silver Triangle Superblock,
Jakarta", KLUEDO, 2011.

Publication

<1%

97

delempunyah.blogspot.com

Internet Source

<1%

98	Submitted to Sim University Student Paper	<1%
99	www.ukm.my Internet Source	<1%
100	www.kpa.or.id Internet Source	<1%
101	gendhotwukir.multiply.com Internet Source	<1%
102	www.mediawisata.net Internet Source	<1%
103	btechndcourse.blogspot.com Internet Source	<1%
104	dimasuniska.blogspot.com Internet Source	<1%
105	kaltimbkd.info Internet Source	<1%
106	theindonesianinstitute.com Internet Source	<1%
107	beritajatim.com Internet Source	<1%
108	raflinurramadhan.blogspot.com Internet Source	<1%
109	Somchanok Passakonjaras, Yanki Hartijasti.	

"Transactional and transformational leadership: a study of Indonesian managers", Management Research Review, 2019

Publication

<1%

110

www.erudit.org

Internet Source

<1%

111

arjana-stahn.blogspot.com

Internet Source

<1%

112

seniormentoring.blogspot.com

Internet Source

<1%

113

pariwisataindonesia2015.blogspot.com

Internet Source

<1%

114

Wayan Ginawa, I.G.A Artatik. "RITUAL BAYUH AGUNG DI GRIYA KAWAN GANGGAWATI DESA KAWAN, KABUPATEN BANGLI", VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2019

Publication

<1%

115

www.sapos.co.id

Internet Source

<1%

116

kajiansejarahbaliutara.blogspot.com

Internet Source

<1%

117

mbukubali.blogspot.com

Internet Source

<1%

118

aishabalqisyah.blogspot.com

	Internet Source	<1%
119	pukul-rata.blogspot.com Internet Source	<1%
120	juliyany236.blogspot.com Internet Source	<1%
121	bukubukubekas.wordpress.com Internet Source	<1%
122	s3kajianbudaya.pps.unud.ac.id Internet Source	<1%
123	doaj.org Internet Source	<1%
124	landakkab.go.id Internet Source	<1%
125	www.hendrinoviyanto.com Internet Source	<1%
126	gedeastawan.blogspot.com Internet Source	<1%
127	Submitted to Sekolah Ciiputra High School Student Paper	<1%
128	kompetisi.co.id Internet Source	<1%
129	bingkaimerah-indonesia.blogspot.com Internet Source	<1%

130 www.dprd-kaltimprov.go.id <1 %
Internet Source

131 www.duniaperikanan.com <1 %
Internet Source

132 bestcelebritynudes.blogspot.com <1 %
Internet Source

133 Submitted to Cita Hati Christian High School <1 %
Student Paper

134 Maulana Khusen. "Bias Gender Dalam Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Tingkat Madrasah Tsanawiyah Karya Darsono dan T. Ibrahim", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2017 <1 %
Publication

135 www.dinkes-tts.web.id <1 %
Internet Source

136 Submitted to Universiti Teknologi Malaysia <1 %
Student Paper

137 garuda.ristekdikti.go.id <1 %
Internet Source

138 salamahnur.blogspot.com <1 %
Internet Source

139 ojs.uajy.ac.id <1 %
Internet Source

isi.ac.id

140	Internet Source	<1%
141	dhar321.blogspot.com Internet Source	<1%
142	garasikeabadian.blogspot.com Internet Source	<1%
143	ekosujadi-bintan.blogspot.com Internet Source	<1%
144	kodokjomblo.blogspot.com Internet Source	<1%
145	moxeeb.wordpress.com Internet Source	<1%
146	relasigender07pab.blogspot.com Internet Source	<1%
147	lenteraji.blogspot.com Internet Source	<1%
148	www.intellectbase.org Internet Source	<1%
149	Rachmawati Novaria, Afifatur Rohimah. "Community Based Tourism Development as A Strategy of Community Empowering and Tourism Marketing in Wonosalam District, Jombang", Prosiding Semnasfi, 2018 Publication	<1%

150

Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram

Student Paper

<1%

151

Brigitta Hauser-Schäublin. "The Precolonial
Balinese State Reconsidered", Current
Anthropology, 2003

Publication

<1%

152

mencapaibahagia.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4 words

Exclude bibliography On

WACANA KONTEMPORER PARIWISATA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120
